

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Tahun 2025 merupakan tahun transisi dimana Kepala Daerah hasil pemilihan umum serentak tahun 2024 dilantik, sedangkan perencanaan pembangunan daerah telah disusun sebelumnya. Oleh karena itu penyesuaian dengan visi misi Kepala Daerah yang baru harus segera dilakukan. Perubahan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 diarahkan dalam upaya pencapaian visi, misi Kepala Daerah terpilih dan tujuan, sasaran pembangunan yang tertuang di dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2025 – 2029; serta untuk menjamin keselarasan dengan visi misi Presiden dan prioritas pembangunan nasional.

Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS), teknokratis, partisipatif, politis, dan *top down-bottom-up planning*. Selain itu, digunakan pendekatan perencanaan berbasis kewilayahan yang bertujuan untuk memberikan arahan pembangunan sesuai dengan potensi daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Perumusan isu strategis, tujuan dan sasaran dalam penyusunan perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan pendefinisian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2025 sampai dengan triwulan kesatu dan Visi Misi Kepala Daerah terpilih serta penjabaran terhadap tujuan, sasaran arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang di dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah dengan memperhatikan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan pada pelaksanaan Tahap I RPJPD Tahun 2025 – 2045 dan RPJMN Tahun 2025 – 2029. Adapun Visi Pembangunan Tahun 2025 – 2029 yaitu :

**“KALSEL BEKERJA,
(Berkelanjutan, Berbudaya, Religi dan Sejahtera)
Menuju Gerbang Logistik Kalimantan”.**

Perwujudan visi tersebut dilaksanakan melalui 5 (lima) misi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

- Misi 1 : Misi 1 Pembangunan sumber daya manusia (SDM) selain difokuskan pada penguatan pendidikan dan kesehatan, juga diarahkan pada aspek spiritual dan nilai-nilai hidup yang luhur, berbudaya, dan berakhlak mulia.
- Pembangunan Manusia yang Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia
- Misi 2 : Misi 2 Pembangunan di berbagai sektor didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana yang diutamakan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mendorong perekonomian daerah serta posisi Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik. Penyediaan sarana dan prasarana diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan yang menjangkau seluruh wilayah serta tekoneksi dengan wilayah lain.
- Pembangunan Infrastruktur yang Handal
- Misi 3 : Misi 3 Perekonomian daerah dikembangkan dengan mengelola sumber daya alam didukung dengan sumber daya manusia yang unggul, dan infrastruktur yang handal. Penerapan inovasi serta teknologi informasi dan komunikasi dengan mengedepankan prinsip inklusif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan, menjadi keniscayaan untuk menjawab tantangan ekonomi global. Posisi strategis Kalimantan Selatan yang berdampingan dengan IKN menjadi peluang untuk
- Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Merata, dan Syariah

**PERUBAHAN RKPD 2025
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

mewujudkan gerbang logistik yang maju dan unggul

Misi 4 : Misi 4 Pembangunan daerah dilakukan secara lestari dan berkelanjutan, sehingga akan memperkuat ketahanan daerah terhadap perubahan iklim dan bencana. Sumber daya alam dan potensi wilayah dikelola secara berimbang sehingga selain bermanfaat untuk peningkatan perekonomian daerah, juga dapat mempertahankan kualitas lingkungan hidup.

Penguatan Terhadap Perubahan Iklim

Misi 5 : Misi 5 Penyelenggaraan pemerintahan daerah mengedepankan prinsip profesional, bersih, dan melayani serta berbasis digital Pelayanan publik yang mudah, cepat, dan transparan menjadi komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus daya tarik bagi peningkatan investasi daerah.

Tata Kelola Pelayanan Publik yang Mudah dan Cepat

Hubungan antara misi, tujuan, dan sasaran pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Hubungan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan

MISI		TUJUAN		SASARAN	
1	Misi 1: Pembangunan Manusia yang Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia	1	Penguatan fondasi tranformasi sosial	1	Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia
				2	Terwujudnya Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlak Mulia
				3	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat
2	Misi 2: Pembangunan Infrastruktur yang Handal	2	Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan untuk	4	Meningkatnya Mutu Layanan Sarana dan Prasarana yang Menjangkau Seluruh Wilayah

**PERUBAHAN RKPD 2025
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

MISI		TUJUAN		SASARAN	
			pemerataan pembangunan	5	Mewujudkan pembangunan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan
3	Misi 3: Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Merata, dan Syariah	3	Penguatan fondasi tranformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan	6	Meningkatnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan
				7	Berkembangnya Investasi dan Sistem Logistik yang Efisien
		4	Perekonomian daerah yang inklusif	8	Berkembangnya Perekonomian Syariah
				9	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja dan UMKM
				10	Meningkatnya taraf kehidupan dan perekonomian masyarakat desa
4	Misi 4: Penguatan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim	5	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Iklim	11	Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan
		6	Menurunnya Risiko Bencana	12	Meningkatnya Mitigasi dan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana
5	Misi 5: Tata Kelola Pelayanan Publik yang Mudah dan Cepat	7	Penguatan fondasi tranformasi tata kelola pemerintahan	13	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah
				14	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang berbasis digital

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

4.2.1 Isu Strategis Pembangunan

Isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan untuk perubahan perencanaan Tahun 2025 diidentifikasi berdasarkan data-data dan pencapaian target pada Tahun 2024, evaluasi pelaksanaan rencana s.d triwulan II tahun 2025, dan isu strategis yang muncul berdasarkan kebijakan nasional. Merujuk pada hasil tersebut, maka dilakukan inventarisasi permasalahan per urusan sebagai upaya identifikasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya.

Salah satu isu strategis dalam memperkuat pelayanan dasar dan mewujudkan pembangunan manusia yang unggul di Kalimantan Selatan yaitu

**PERUBAHAN RKPD 2025
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

pengembangan program *New Posyandu yang mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu* akan difokuskan pada peningkatan kapasitas kader, penyediaan sarana prasarana yang memadai, integrasi layanan dasar, serta pengembangan sistem informasi posyandu berbasis teknologi. Dengan pendekatan ini, *New Posyandu* diharapkan mampu menjadi garda terdepan pelayanan dasar di tingkat komunitas dan mendukung pencapaian target indikator SPM, RPJMD, dan SDGs. *New Posyandu* bukan hanya revitalisasi layanan kesehatan masyarakat, melainkan transformasi Posyandu menjadi pusat layanan terpadu yang menjangkau berbagai aspek kehidupan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan dengan 6 Bidang layanan dasar.

Adapun program lain yang diharapkan dapat mendukung pembangunan manusia, yaitu program sekolah rakyat yang diatur dalam *Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem*. Pada pasal keempat poin delapan menginstruksikan kepada Menteri Pendidikan dasar dan menengah, Menteri Agama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan kepala Badan Kepegawaian Negara untuk menyediakan guru, tenaga pendidik, dan siswa untuk program sekolah rakyat. Sekolah rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo yang memiliki visi mencetak agen perubahan pada setiap keluarga miskin melalui pendidikan berkualitas guna memutus transmisi kemiskinan.

Selain itu, sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih yang bertujuan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan sebagai perwujudan Asta Cita kedua dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam. Diharapkan dengan adanya koperasi merah putih, pembangunan ekonomi yang dimulai dari level terbawah yaitu desa dapat menjadi pondasi perekonomian negara yang lebih maju dan berdaya saing kuat.

Dari hasil identifikasi tersebut, secara garis besar dapat diangkat beberapa isu-isu strategis daerah sebagai berikut.

Tabel 4.2. Isu Strategis Daerah Tahun 2025

No	Isu Strategis RKPD 2025	Fokus
----	----------------------------	-------

**PERUBAHAN RKPD 2025
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

1	<p>Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) yang Masih Rendah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kualitas pendidikan 2. Belum optimalnya kualitas kesehatan 3. Belum optimalnya keterampilan dan kompetensi Tenaga Kerja. 4. Masih adanya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial 5. Masih belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan
2	<p>Fondasi Perekonomian Berbasis Sumber Daya Alam Terbarukan yang Masih Belum Kuat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya produktivitas daerah, sebagai akibat dari belum optimalnya hilirisasi 2. Konsumsi masyarakat masih fokus pada kebutuhan dasar 3. Konsumsi terhadap substitusi impor untuk bahan baku dan bahan penolong masih tinggi 4. Sistem distribusi yang belum menghadirkan efisiensi daerah sebagai akibat dari skala produksi yang belum mencapai skala ekonomi kawasan
3	<p>Pembangunan Infrastruktur Perekonomian Berbasis Kewilayahan Berkelanjutan yang Belum Merata</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur perekonomian dan integrasinya terhadap pusat-pusat pertumbuhan ekonomi 2. Keterkaitan antar moda masih belum optimal
4	<p>Belum Optimalnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan akses infrastruktur dasar yang belum merata
5	<p>Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Berketahanan Iklim dan Ketahanan Bencana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan Indeks Kualitas Air 2. Peningkatan luas lahan kritis pada kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan; 3. Masih terjadinya banjir serta kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah Kalimantan Selatan 4. Indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) di Kalimantan Selatan cenderung masih tinggi 5. Konsep mitigasi bencana yang belum optimal

**PERUBAHAN RKPD 2025
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

6. Peningkatan pelayanan SPM Bencana secara lintas sektor	
6 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	1. Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Kalimantan Selatan masih rendah 2. Masih belum optimalnya pelayanan masyarakat berbasis elektronik. 3. Masih tingginya persepsi masyarakat terhadap korupsi 4. masih belum optimalnya profesionalisme ASN 5. Masih belum optimalnya penerapan informasi publik (SAKIP)

4.2.2 Prioritas Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2025-2029 dan RKP 2025

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama transisi pelaksanaan RPJPN Tahun 2025 – 2045 dan RPJMN Tahun 2025 – 2029. Pada rancangan RPJMN Tahun 2025 – 2029, arah kebijakan difokuskan pada Perkuatan Fondasi Transformasi yang kemudian dituangkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKP Tahun 2025 sebagai tahap awal pelaksanaan RPJMN Tahun 2025 – 2029 memiliki kedudukan strategis sebagai fondasi awal perwujudan fondasi transformasi, yang meliputi transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Tema RKP Tahun 2025 adalah “**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”, difokuskan pada perkuatan fondasi transformasi dalam perkuatan beberapa komponen, yaitu :

1. Infrastruktur berkualitas yang berfokus pada infrastruktur untuk peningkatan produktivitas;

**PERUBAHAN RKPD 2025
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

2. Sumber daya manusia berkualitas, yang berdaya saing dan produktif;
3. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan, melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan penciptaan produk ramah lingkungan.

Visi Presiden periode 2025 – 2029 yaitu **“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi ini dicapai melalui delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita. Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins*.

RPJMN Tahun 2025 – 2029 memuat delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah yang merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita. Tahun 2025 memiliki kedudukan strategis sebagai fondasi awal perwujudan fondasi transformasi, yang meliputi transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinann Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.



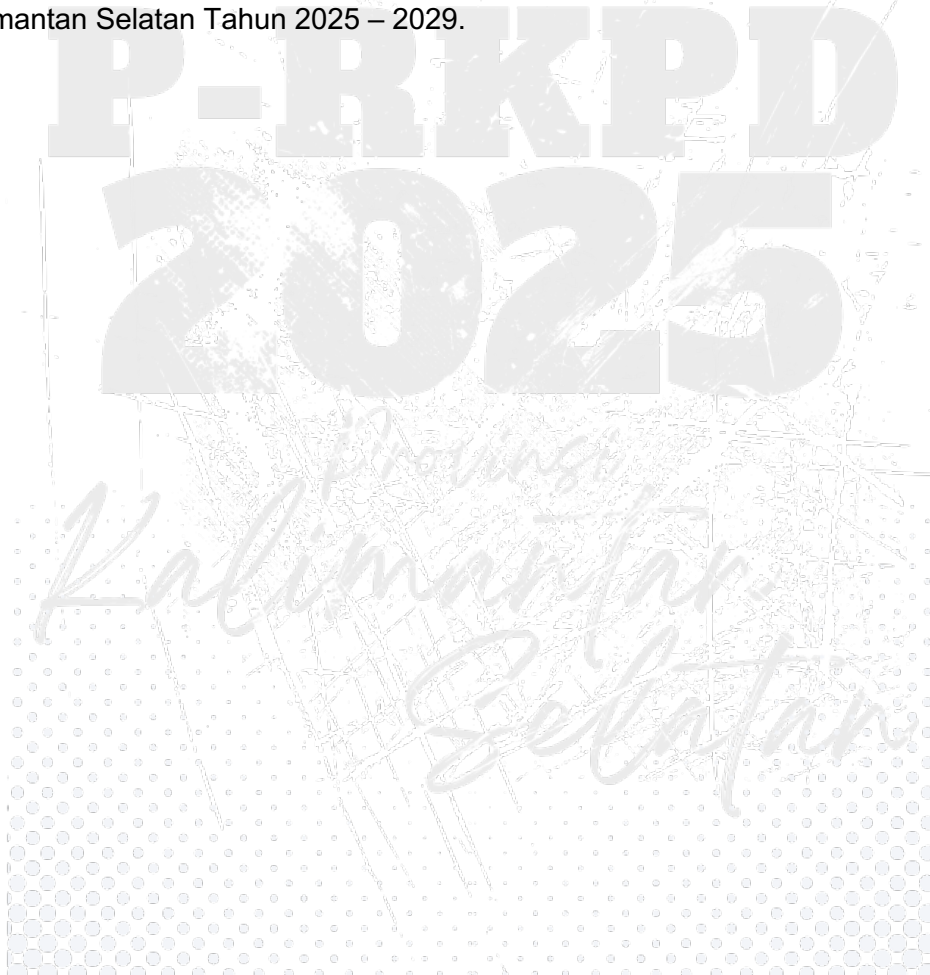
Gambar 4.1. Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan (Sumber: Perpres RPJMN Tahun 2025 – 2029, Bappenas)

**PERUBAHAN RKPD 2025
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

4.2.1. Prioritas dan Sasaran RKPD Tahun 2025

Perubahan perencanaan pembangunan Tahun 2025 sesuai dengan arah kebijakan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029 bertemakan “Mewujudkan Kemandirian Daerah menuju Kalimantan Selatan yang Makmur dan Sejahtera” dengan arah kebijakan “Memantapkan kualitas SDM dan prasarana wilayah menuju Kalsel MAJU (Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan)”. Merujuk pada kebijakan nasional dan isu-isu strategis yang telah dirangkum beserta rancangan awal RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029.

Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen transisi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 ke RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029. Di dalamnya memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran dari RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029.



**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Tabel 4.3. Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja RPJMD Tahun 2025 - 2029

Misi, Tujuan, dan Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran		Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan
1	MISI 1: PEMBANGUNAN MANUSIA YANG UNGGUL, BERBUDAYA, DAN BERAKHLAK MULIA					
1.1	Tujuan: Penguatan fondasi tranformasi sosial	1	Indeks Modal Manusia (IMM)	0,56	1. Pemantapan Kesehatan untuk Semua 2. Pemantapan Pendidikan Berkualitas yang Merata 3. Penguatan Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif 4. Pemantapan Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju 5. Pemantapan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Kehidupan Berdemokrasi 6. Perlindungan Sosial yang Adaptif	1. Peningkatan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, termasuk olah raga 2. Penuntasan stunting dan percepatan eliminasi malaria melalui pendekatan integrasi multisektor dan rekayasa lingkungan habitat vector 3. Peningkatan pemenuhan dan distribusi tenaga medis dan Kesehatan 4. Penyediaan layanan kesehatan primer dan lanjutan, dan diversifikasi spesialisasi keahlian medis 5. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta kesehatan reproduksi 6. Penerapan Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya 7. Peningkatan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah 8. Koordinasi dan fasilitasi partisipasi Pendidikan tinggi dan pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah 9. Peningkatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3. 10. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi dan program studi berstandar internasional berbasis riset dan bidang keilmuan khusus sesuai klaster ekonomi potensial masa depan melalui kemitraan bersama perguruan tinggi global 11. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman sesuai potensi terutama pertambangan, perkebunan, industri pengolahan serta keterkaitan dengan dunia
		2	Indeks Pembangunan Manusia	75,72		
		3	Persentase Penduduk Miskin	3,44-3,94		
1.1.1	Sasaran: Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,42		
		2	Prevalensi <i>Stunting</i>	23		
		3	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	8,74		
		4	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,33		
		5	Indeks Ketimpangan Gender	0,488		
1.1.2	Sasaran: Terwujudnya Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlak Mulia	1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	74,3		
		2	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	64,74		
		3	Indeks Demokrasi Indonesia	80,44		
1.1.3	Sasaran: Meningkatnya	1	Pengeluaran Per-Kapita Disesuaikan	13.860		

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Misi, Tujuan, dan Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan
	standar hidup layak masyarakat	(Ribu Rupiah/Orang/Tahun)			<p>usaha dan dunia industri (DUDI) yang dikembangkan melalui skema education to employment</p> <p>12. Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk daerah terpencil dengan mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK</p> <p>13. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan local</p> <p>14. Peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang</p> <p>15. Peningkatan pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang Pembangunan</p> <p>16. Peningkatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam Pembangunan</p> <p>17. Peningkatan pendidikan yang berbasis agama</p> <p>18. Peningkatan kerukunan antar etnis dan antar umat beragama</p> <p>19. Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat Masyarakat</p> <p>20. Peningkatan perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui pengembangan cagar budaya</p> <p>21. Penerapan nilai-nilai luhur budaya lokal serta kearifan lokal dalam berbagai aktivitas sosial serta pendidikan karakter khususnya generasi muda</p> <p>22. Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antarwarga dan ekspresi budaya</p> <p>23. Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas.</p> <p>24. Peningkatan kualitas demokrasi</p>
		2 Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	96,88		

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Misi, Tujuan, dan Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan
					<p>25. Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif dan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)</p> <p>26. Peningkatan perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.</p> <p>27. Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran</p> <p>28. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta peningkatan komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.</p> <p>29. Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.</p> <p>30. Pengembangan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas</p> <p>31. Peningkatan pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang</p>

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Misi, Tujuan, dan Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran		Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan
						terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah tertinggal
2	MISI 2: PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG HANDAL					
2.1	Tujuan: Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan untuk pemerataan pembangunan	1	Indeks Infrastruktur	0,59	1. Pengembangan Infrastruktur Berkualitas 2. Pengembangan Wilayah yang Berkelanjutan 3. Meningkatkan Ketahanan Energi yang Ramah Lingkungan	1. Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan 2. Penyediaan lembaga pelaksana penyelenggara SPAM yang berkriteria baik dan optimal. 3. Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum 4. Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah 5. Pengembangan pelabuhan-pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi yang dikembangkan secara terpadu (pelabuhan simpul domestik) 6. Pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II di sisi Timur wilayah Kalimantan Selatan secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik daerah ke rantai pasok/nilai nasional dan global dengan pembangunan dan pengembangan jaringan konektivitas yang terpadu 7. Koordinasi Pengembangan bandara utama (Bandara Syamsudin Noor di Banjarbaru) dan bandara lainnya yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah 8. Penyelesaian jalan Trans Kalimantan dan pembangunan jaringan jalur kereta api serta pembangunan dan peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah 9. Pengembangan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi 10. Koordinasi pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal di wilayah metropolitan Banjarmasin serta kota-kota besar dan sedang yang andal
2.1.1	Sasaran: Meningkatnya Mutu Layanan Sarana dan Prasarana yang Menjangkau Seluruh Wilayah	1	Indeks Infrastruktur Dasar	0,46		
		2	Indeks Konektivitas	0,63		
2.1.2	Sasaran: Mewujudkan pembangunan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan	1	Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	15		

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Misi, Tujuan, dan Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan
				<p>sesuai dan modern dalam melayani penumpang dengan proyeksi perkembangan penduduknya</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Peningkatan pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh. 12. Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan. 13. Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau untuk daerah kepulauan dan afirmasi. 14. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah 15. Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan. 16. Pembangunan perkotaan yang cerdas, hijau, dan Berkelanjutan 17. Pengembangan kawasan perkotaan, termasuk wilayah metropolitan dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung 18. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana dasar desa berbasis karakteristik wilayah serta konektivitas dengan pusat-pusat kota 19. Fasilitasi penyusunan dan penetapan RDTR kab/kota serta kewenangan tata ruang laut 20. Koordinasi pelaksanaan reforma agraria 21. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) engembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Misi, Tujuan, dan Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran		Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan
						<p>keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan</p> <p>22. Pengembangan grid skala kecil terisolasi (<i>isolated mini grid</i>) untuk memperluas penyediaan layanan listrik yang lebih berkualitas dan jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) untuk mendukung peningkatan keandalan dan dekarbonisasi pasokan tenaga listrik</p> <p>23. Mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik di wilayah Kalimantan Selatan sebagai pasokan di wilayah Kalimantan Selatan maupun antarpulau.</p>
3	MISI 3: PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN, MERATA, DAN SYARIAH					
3.1	Tujuan: Penguatan fondasi tranformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 - 5,4	<p>1. Pengembangan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi</p> <p>2. Penerapan Ekonomi Hijau</p> <p>3. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global dengan Sistem Logistik yang Andal</p> <p>4. Pengembangan Transformasi Digital</p> <p>5. Pengembangan Ekonomi Syariah</p>	1. Pembangunan dan pengembangan Kalimantan Selatan sebagai daerah mitra dalam mendukung superhub ekonomi yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing
		2	PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah)	68,94-69,29		2. Pengembangan pusat-pusat industri di berbagai wilayah Kalimantan Selatan melalui hilirisasi komoditi unggulan
3.1.1	Sasaran: Meningkatnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan	1	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	11,68-12,46		3. Peningkatan hilirisasi industri strategis berbasis sektor ekonomi eksisting yang ditingkatkan seperti petrokimia dan oleokimia.
		2	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	54,73		4. Pengembangan basis sektor-sektor ekonomi baru yang didorong berbagai pengembangan inovasi seperti biosimilar dan vaksin, protein nabati, dan energi terbarukan
		3	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	23,78		5. Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.
		4	Laju PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	4,19	6. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.	
		5	Laju PDRB Penyediaan	8,08	7. Pengembangan pariwisata unggulan dan ekonomi kreatif	

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Misi, Tujuan, dan Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran		Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan
			Akomodasi Makan dan Minum (%)			
3.1.2	Sasaran: Berkembangnya Investasi dan Sistem Logistik yang Efisien	1	Laju PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor (%)	6,37		8. Peningkatan produktivitas BUMD
		2	Persentase Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB (%)	77,74		9. Pemberian kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan
		3	Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB (%)	21,43		10. Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah pertanian dan kompleksitas industri
		4	Tingkat Inflasi (%)	3,2-3,9		11. Peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam mendukung sistem ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya secara efisien, pengurangan limbah, dan pengembalian material ke dalam siklus produksi
3.2	Tujuan: Perekonomian daerah yang inklusif	1	Indeks Williamson	0,433		12. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
		2	Rasio gini	0,29 - 0,301		13. Peningkatan pengendalian inflasi daerah.
3.2.1	Sasaran: Berkembangnya Perekonomian Syariah	1	Indeks Ekonomi Syariah			14. Peningkatan rantai nilai domestik Kalimantan Selatan untuk mendukung rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dengan Asia Timur dan Pasifik

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Misi, Tujuan, dan Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran		Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan
3.2.2	Sasaran: Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja dan UMKM	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,63 - 4,18		15. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, berkelanjutan, dan beradaptasi dengan perubahan iklim untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan, menjaga produktivitas pertanian dan perkebunan, serta peningkatan kesejahteraan petani
		2	Rasio Kewirausahaan	3,02		16. Pengembangan interkoneksi antarwilayah untuk evakuasi daya listrik terbarukan dan peningkatan keandalan.
3.2.3	Sasaran: Meningkatnya taraf kehidupan dan perekonomian masyarakat desa	1	Indeks Desa	0,7943		17. Pengembangan pasokan listrik terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi yang tersedia.
						18. Peningkatan daya saing daerah
						19. Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok serta kawasan industri dan pertambangan
						20. Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis
						21. Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau <i>digital skill</i>
						22. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, diantaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, dan perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah.
						23. Peningkatan pelaksanaan pelatihan <i>reskilling</i> dan <i>upskilling</i> dan transisi <i>school-to-work</i>

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Misi, Tujuan, dan Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran		Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan
						24. Peningkatan penempatan tenaga kerja
						25. Penerapan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan
						26. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di KI, KEK, dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja.
						27. Peningkatan upaya industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi
						28. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, dengan meningkatkan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha
						29. Peningkatan daya saing, produktivitas, dan ketahanan aktivitas perekonomian perdesaan
4	MISI 4: PENGUATAN KETAHANAN TERHADAP PERUBAHAN IKLIM					
4.1	Tujuan: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Iklim	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,32	1. Penguatan Lingkungan Hidup yang Berkualitas 2. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan khususnya kondisi kritis, ruang terbuka hijau, serta penghambatan laju deforestasi 2. Peningkatan rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang 3. Peningkatan pelestarian geosites di kawasan Pegunungan Meratus 4. Peningkatan pelestarian bentang alam yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal 5. Peningkatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range)
4.1.1	Sasaran: Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	1	Indeks Kualitas Air	70,45		
		2	Indeks Kualitas Udara	70,97		

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Misi, Tujuan, dan Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran		Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan		
		3	Indeks Kualitas Air Laut	72,52		<p>6. Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana</p> <p>7. Pengelolaan sampah dan limbah yang terpadu dari hulu ke hilir melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber serta sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (melalui daur ulang) guna mendorong ekonomi sirkular.</p> <p>8. Peningkatan mitigasi struktural dan non-struktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim</p> <p>9. Pengembangan solusi berbasis alam (natural based solution) untuk pengendalian bencana seperti banjir, kebakaran hutan dan tanah longsor</p> <p>10. Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, respons terhadap bencana, serta peningkatan kapasitas dan adaptasi masyarakat</p> <p>11. Pengembangan area yang didedikasikan sebagai retarding basin</p> <p>12. Pembangunan check dam pengendali aliran sedimen untuk menjamin keberlanjutan fungsi sungai sebagai alur pelayaran.</p>		
		4	Indeks Kualitas Lahan	70,37				
		5	Persentase Penurunan Emisi GRK (tahunan) (%)	22,95				
4.2	Tujuan: Menurunnya Risiko Bencana	1	Indeks Risiko Bencana	120.889				
4.2.1	Sasaran: Meningkatkan Mitigasi dan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	1	Indeks Ketahanan Daerah	0,56				
5	MISI 5: TATA KELOLA PELAYANAN PUBLIK YANG MUDAH & CEPAT							
5.1	Tujuan: Penguatan fondasi transformasi tata kelola pemerintahan	1	Indeks Reformasi Birokrasi	84,68			<p>1. Penataan Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif</p> <p>2. Pemantapan Pelayanan Publik</p>	<p>1. Optimasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah</p> <p>2. Peningkatan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk pelibatan masyarakat suku asli Kalimantan Selatan dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.</p> <p>3. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa serta transparansi layanan perizinan berbasis digital</p> <p>4. Pengawasan proses implementasi budaya birokrasi BerAKHLAK dengan pemanfaatan teknologi informasi</p> <p>5. Penguatan integritas partai politik</p>
5.1.1	Sasaran: Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	1	Nilai SAKIP	82,96				
		2	Opini BPK	WTP				
		3	Indeks Integritas	76,36				
		4	Indeks Sistem Merit	293,2				

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Misi, Tujuan, dan Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran		Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan
		5	Indeks Manajemen Risiko			
5.1.2	Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang berbasis digital	1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,64		<ul style="list-style-type: none"> 6. Peningkatan sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah 7. Sinkronisasi substansi dan periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi. 8. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran Prioritas Nasional. 9. Peningkatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko 10. Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan 11. Peningkatan integrasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di lingkungan pemerintahan daerah 12. Pengembangan jaringan informasi Geospasial Daerah untuk mendukung perencanaan pembangunan berkualitas, mendorong percepatan kebijakan Satu Peta dan kebijakan Satu Data 13. Pengembangan pembiayaan inovatif 14. Peningkatan kualitas pelayanan publik masyarakat, termasuk kecepatan respon terhadap laporan masyarakat 15. Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah 16. Peningkatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
		2	Indeks Pelayanan Publik	4,53		

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026, tema Pembangunan RKPD Tahun 2025 yaitu **“Pemantapan Kualitas Daya Saing Daerah Menuju Kemandirian melalui intensitas kerjasama yang Mendukung Pembangunan”**. Merujuk pada kebijakan nasional dan isu-isu strategis yang telah dirangkum, maka tema Pembangunan RKPD Tahun 2025 telah dilakukan penyesuaian menjadi :

**PEMANTAPAN DAYA SAING DAERAH DENGAN PENINGKATAN KUALITAS
SARANA PRASARANA UNTUK MENDUKUNG KALIMANTAN SELATAN
SEBAGAI GERBANG LOGISTIK KALIMANTAN**

Tema Pembangunan tahun 2025 memiliki makna penting yang diwakili 3 kata kunci (key words), yaitu :

1. Pemantapan Daya Saing Daerah : Menunjukkan pentingnya daya saing daerah dalam konteks lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Dalam hal ini, fokus dilakukan untuk mendukung pengembangan peran Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik guna memperkuat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana : meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta fasilitas pendukung seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, terminal, gudang, pasar dan lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran dan efisiensi distribusi barang/jasa dalam kegiatan logistik.
3. Pembangunan Gerbang Logistik Kalimantan : mengembangkan Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik regional yang akan menjadi titik penting dalam rantai pasok regional (produksi skala regional), memfasilitasi pergerakan barang secara efisien dan berkelanjutan (distribusi).

Berdasarkan ketiga poin tersebut maka tema Tahun 2025 memiliki makna bahwa pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 bertujuan dalam meningkatkan daya saing daerah untuk mendukung pembangunan ekonomi inklusif dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, kesetaraan, keberlanjutan, dan mengutamakan potensi dan sektor unggulan Provinsi Kalimantan Selatan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta fasilitas pendukung.

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Perencanaan pembangunan Tahun 2025 sesuai dengan arah kebijakan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 diarahkan pada **“Pengembangan Kualitas SDM dan Prasarana Wilayah Mendukung perekonomian berkelanjutan Berpedoman pada Pencapaian Pembangunan Global (SDGs)”**. Sehingga, dalam perumusan prioritas juga telah diselaraskan terhadap dokumen TPB/SDGs melalui pengintegrasian 17 goal SDGs kedalam 5 Prioritas Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025. Selain pengintegrasian 17 Goal SDGs kedalam prioritas daerah, menjadikan isu SDGs/TPB sebagai isu pembangunan Bersama juga menjadi salah satu bentuk tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi capaian TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan yang telah dilakukan. Seperti pada data pada tahun 2018 – 2020, di dalam isu SDGs/TPB Provinsi Kalimantan

Selatan Tahun 2023 yang menjadi fokus perhatian ada pada 2 pilar, tujuan TPB dengan status capaian tidak tercapai terbanyak di Provinsi Kalimantan Selatan masih terus ada pada Tujuan 4 Pendidikan yang Berkualitas serta pada Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 dan rumusan prioritas, maka dapat dijabarkan kebijakan pembangunan daerah ke dalam 5 Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut.

1. PD 1: Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan

- 1) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Teknologi Pertanian
- 2) Peningkatan Rantai Pasok Untuk Mendukung Hilirisasi Industri Berbasis Sumber Daya Alam Berkelanjutan
- 3) Peningkatan Pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM Berbasis Digital dan Berdaya Saing
- 4) Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja yang Berdaya Saing
- 5) Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)

2. PD 2: Pemanjapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing

- 1) Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
- 2) Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

- 3) Pemerataan Akses Layanan Kesehatan
- 4) Penurunan Prevalensi Stunting
- 5) Penurunan Angka Pernikahan Anak
- 6) Peningkatan Prestasi Olahraga
- 7) Pengembangan Budaya Daerah

3. PD 3 : Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi

- 1) Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar
- 2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Menunjang Konektivitas antar Wilayah
- 3) Pengembangan Kawasan Prioritas dan Pedesaan yang Terintegrasi dengan Infrastruktur sebagai Gerbang Logistik Kalimantan

4. PD 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik dan Investasi

- 1) Penguatan Reformasi Birokrasi
- 2) Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif
- 3) Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik
- 4) Pengembangan Satu Data Kalsel
- 5) Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN)
- 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

5. PD 5 : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Ketahanan Bencana

- 1) Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
- 2) Penguatan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana

Dalam rangka melaksanakan prioritas di atas, dikembangkan Strategi dan arah kebijakan Pembangunan tahun 2025 sebagai berikut.

1. Peningkatan Daya Saing Daerah dengan strategi :
 - a. Peningkatan Lingkungan Pendukung dengan arah kebijakan sebagai berikut :

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

- Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana dasar dan perekonomian : pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar maupun infrastruktur yang mendorong aktivitas perekonomian.
 - Meningkatkan stabilitas ekonomi makro : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui transformasi ekonomi, penciptaan nilai tambah produk, dan perkuatan investasi.
 - Memberikan insentif bagi investor: Memberikan insentif bagi investor yang berinvestasi di kawasan industri dan logistik, seperti keringanan pajak dan kemudahan perizinan.
- b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan arah kebijakan sebagai berikut :
- Meningkatkan pendidikan dan pelatihan untuk tenaga kerja: Meningkatkan pendidikan dan pelatihan untuk tenaga kerja agar memiliki keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan oleh industri dan sektor logistik.
 - Meningkatkan keterampilan dan keahlian tenaga kerja: Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian mereka di bidang-bidang seperti teknologi informasi, bahasa asing, dan manajemen.
 - Menciptakan lapangan kerja yang berkualitas: Menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dengan gaji yang layak bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
- c. Peningkatan dan Pengembangan Pasar Barang dan Jasa dengan arah kebijakan :
- Memberikan bantuan modal dan pelatihan bagi UMKM: Memberikan bantuan modal dan pelatihan bagi UMKM untuk meningkatkan kualitas produk dan daya saing mereka di pasar.
 - Membuka akses pasar bagi produk lokal: Membantu UMKM untuk memasarkan produk mereka di pasar lokal, nasional, dan internasional.
 - Meningkatkan promosi produk lokal: Melakukan promosi produk lokal melalui berbagai media seperti pameran, iklan, dan internet.
- d. Peningkatan Ekosistem Inovasi, dengan arah kebijakan : Mendorong pengembangan kajian dan inovasi untuk menciptakan diversifikasi

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

pengetahuan dan ide inovatif dalam mendorong perkuatan perencanaan, kelembagaan, dan konsep-konsep pembangunan baru.

2. Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana dengan strategi :
 - a. Peningkatan Konektivitas Wilayah dengan arah kebijakan :
 - Memperbaiki dan membangun jalan yang menghubungkan kawasan industri, pelabuhan, dan pusat-pusat ekonomi lainnya.
 - Membangun jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di Kalimantan Selatan dan meningkatkan konektivitas antar daerah.
 - Memperluas dan meningkatkan kapasitas pelabuhan untuk mendukung kegiatan logistik dan perdagangan internasional.
 - Meningkatkan akses internet dan telekomunikasi di seluruh wilayah Kalimantan Selatan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial.
 - b. Peningkatan Layanan Infrastruktur Dasar dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - Peningkatan cakupan Layanan Air Bersih
 - Peningkatan Layanan Sanitasi Layak, dan
 - Pengurangan kawasan kumuh perkotaan.
3. Perwujudan Gerbang Logistik dengan strategi
 - a. Optimalisasi dan Integrasi Pusat Kegiatan, dengan arah kebijakan :
 - Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru berbasis wilayah
 - Mendorong pengembangan konektivitas antar kawasan-kawasan sentra bahan baku dan pendukung pendukung produksi lainnya pembangunan jalan, jembatan, dan jaringan kereta api.
 - b. Optimalisasi Kawasan Industri dan Jalur Logistik dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - Membangun kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan, kawasan industri yang dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai dan terhubung dengan pelabuhan untuk memudahkan kegiatan logistik.
 - Meningkatkan system Distribusi barang dan jasa antar kawasan seperti terminal barang, pusat distribusi yang efektif.

Berbagai macam metode dan pendekatan perencanaan dalam pembangunan diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Capaian pembangunan harus berkontribusi terhadap indikator makro daerah

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu, pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan harus mampu menjawab berbagai permasalahan yang berkembang dan fokus terhadap sasaran prioritas. Kelima rumusan prioritas pembangunan Kalimantan Selatan kemudian diselaraskan dengan sasaran pembangunan yang kemudian dijabarkan ke dalam program prioritas untuk mencapai target indikator kinerja program daerah pada Tahun 2025

Perubahan perencanaan pembangunan Tahun 2025 sesuai dengan arah kebijakan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029 bertepatan dengan “**Mewujudkan Kemandirian Daerah menuju Kalimantan Selatan yang Makmur dan Sejahtera**” dengan arah kebijakan “**Memantapkan kualitas SDM dan prasarana wilayah menuju Kalsel MAJU (Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan)**”. Merujuk pada kebijakan nasional dan isu-isu strategis yang telah dirangkum beserta rancangan awal RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2030, maka tema Pembangunan RKPD Tahun 2026 adalah :

“Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sektor Unggulan Daerah yang Mendukung Pusat Distribusi Regional”

Tema Pembangunan tahun 2026 memiliki makna penting yang diwakili tiga kata kunci (*key words*), yaitu :

1. **Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia** : Menunjukkan pentingnya peningkatan daya saing daerah pada beberapa komponen terutama sumber daya manusia yang didukung dengan kebutuhan sarana dan prasarana. Dalam hal ini, fokus peningkatan dilakukan untuk mendukung pengembangan peran Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik guna memperkuat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memastikan kelancaran dan efisiensi distribusi barang/jasa dalam kegiatan logistik.
2. **Pengembangan Sektor Unggulan** : Merupakan fondasi dalam membangun dasar yang kokoh untuk mengembangkan daya saing daerah, memastikan keberlanjutan ekonomi, dan memposisikan wilayah sebagai pusat logistik strategis di Kalimantan, yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mendorong terwujudnya

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

sistem ekonomi yang mengedepankan keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan sosial melalui upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tidak merusak lingkungan, menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam, serta menjamin kesejahteraan sosial secara berkelanjutan dalam jangka panjang

3. **Pembangunan Pusat Distribusi Regional** : merupakan hub penting dalam mengembangkan Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik regional yang akan menjadi titik penting dalam rantai pasok regional (produksi skala regional), memfasilitasi pergerakan barang secara efisien dan berkelanjutan (distribusi).

Berdasarkan ketiga poin tersebut maka tema Tahun 2026 memiliki makna bahwa pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 bertujuan dalam meningkatkan daya saing daerah untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, kesetaraan, keberlanjutan, dan mengutamakan potensi dan sektor unggulan Provinsi Kalimantan Selatan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta fasilitas pendukung.

Perencanaan pembangunan Tahun 2026 juga Berpedoman pada Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)". Sehingga, dalam perumusan prioritas juga telah diselaraskan terhadap dokumen TPB/SDGs melalui pengintegrasian 17 goal SDGs kedalam 5 Prioritas Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025. Selain pengintegrasian 17 Goal SDGs kedalam prioritas daerah, menjadikan isu SDGs/TPB sebagai isu pembangunan Bersama juga menjadi salah satu bentuk tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi capaian TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan yang telah dilakukan. Seperti pada data pada tahun 2018 – 2020, di dalam isu SDGs/TPB Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 yang menjadi fokus perhatian ada pada 2 pilar, tujuan TPB dengan status capaian tidak tercapai terbanyak di Provinsi Kalimantan Selatan masih terus ada pada Tujuan 4 Pendidikan yang Berkualitas serta pada Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 dan rumusan prioritas, maka dapat dijabarkan kebijakan pembangunan daerah ke dalam 5 Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut.

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

- 1. PD 1: Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berbudaya**
 - 1) Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Akademik dan Vokasi
 - 2) Peningkatan Akses dan Kualitas Sarana, Prasarana, dan Layanan Kesehatan
 - 3) Peningkatan Prestasi Olahraga dan Kepemudaan
 - 4) Penurunan Prevalensi Stunting
 - 5) Pelestarian Budaya

- 2. PD 2: Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Perekonomian Berbasis Kewilayahan**
 - 1) Peningkatan Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar Berbasis Kewilayahan
 - 2) Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Ekonomi dan Pendukung Konektivitas Antar Wilayah Berbasis Kewilayahan
 - 3) Pengembangan Moda Transportasi Massal

- 3. PD 3 : Peningkatan Sektor Unggulan (Industri, UMKM, Perdagangan, Pertanian dan Pariwisata) Didukung oleh Investasi, Tenaga Kerja Berdaya Saing, dan Energi Berkelanjutan**
 - 1) Peningkatan Investasi Berdampak Pada Daerah dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) Mendukung Hilirisasi Industri
 - 2) Peningkatan Produksi dan Produktivitas dengan Teknologi Pertanian untuk Mendukung Hilirisasi Industri
 - 3) Pengembangan Distribusi Logistik dan Penguatan UMKM Berbasis Digital untuk Menuju Gerbang Logistik Kalimantan
 - 4) Peningkatan Pariwisata Unggulan Daerah dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing
 - 5) Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Berdaya Saing

- 4. PD 4 : Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Kapasitas Mitigasi serta Penanganan Bencana**
 - 1) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

2) Meningkatkan Ketahanan Daerah yang Berkelanjutan

5. PD 5 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik

- 1) Penguatan Reformasi Birokrasi
- 2) Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik
- 3) Pengembangan Satu Data Kalsel

Dalam rangka melaksanakan prioritas di atas, dikembangkan Strategi dan arah kebijakan Pembangunan tahun 2026 sebagai berikut.

1. Peningkatan Daya Saing Daerah dengan strategi :

a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- **Meningkatkan pendidikan dan pelatihan untuk tenaga kerja:** Meningkatkan pendidikan dan pelatihan untuk tenaga kerja agar memiliki keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan oleh industri dan sektor logistik.
- **Meningkatkan keterampilan dan keahlian tenaga kerja:** Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian mereka di bidang-bidang seperti teknologi informasi, bahasa asing, dan manajemen.
- **Menciptakan lapangan kerja yang berkualitas:** Menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dengan gaji yang layak bagi masyarakat Kalimantan Selatan.

2. Perwujudan Gerbang Logistik dengan strategi

a. Optimalisasi dan Integrasi Pusat Kegiatan, dengan arah kebijakan :

- Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru berbasis wilayah
- Mendorong pengembangan konektivitas antar kawasan-kawasan sentra bahan baku dan pendukung pendukung produksi lainnya pembangunan jalan, jembatan, dan jaringan kereta api.

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

b. Optimalisasi Kawasan Industri dan Jalur Logistik dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- Membangun kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan, kawasan industri yang dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai dan terhubung dengan pelabuhan untuk memudahkan kegiatan logistik.
- Meningkatkan system Distribusi barang dan jasa antar kawasan seperti terminal barang, pusat distribusi yang efektif.

c. Peningkatan dan Pengembangan Pasar Barang dan Jasa dengan arah kebijakan :

- Memberikan bantuan modal dan pelatihan bagi UMKM: Memberikan bantuan modal dan pelatihan bagi UMKM untuk meningkatkan kualitas produk dan daya saing mereka di pasar.
- Membuka akses pasar bagi produk lokal: Membantu UMKM untuk memasarkan produk mereka di pasar lokal, nasional, dan internasional.
- Meningkatkan promosi produk lokal: Melakukan promosi produk lokal melalui berbagai media seperti pameran, iklan, dan internet.

d. Peningkatan Ekosistem Inovasi, dengan arah kebijakan :

- Mendorong pengembangan kajian dan inovasi untuk menciptakan diversifikasi pengetahuan dan ide inovatif dalam mendorong perkuatan perencanaan, kelembagaan, dan konsep-konsep pembangunan baru.

e. Peningkatan Lingkungan Pendukung dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana dasar dan perekonomian : pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar maupun infrastruktur yang mendorong aktivitas perekonomian.
- Meningkatkan stabilitas ekonomi makro : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui transformasi ekonomi, penciptaan nilai tambah produk, dan perkuatan investasi.
- Memberikan insentif bagi investor: Memberikan insentif bagi investor yang berinvestasi di kawasan industri dan logistik, seperti keringanan pajak dan kemudahan perizinan.

3. **Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana dengan strategi :**

a. **Peningkatan Konektivitas Wilayah dengan arah kebijakan :**

- Memperbaiki dan membangun jalan yang menghubungkan kawasan industri, pelabuhan, dan pusat-pusat ekonomi lainnya.
- Membangun jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di Kalimantan Selatan dan meningkatkan konektivitas antar daerah.
- Memperluas dan meningkatkan kapasitas pelabuhan untuk mendukung kegiatan logistik dan perdagangan internasional.
- Meningkatkan akses internet dan telekomunikasi di seluruh wilayah Kalimantan Selatan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial.

b. **Peningkatan Layanan Infrastruktur Dasar dengan arah kebijakan sebagai berikut :**

- Peningkatan cakupan Layanan Air Bersih
- Peningkatan Layanan Sanitasi Layak, dan
- Pengurangan kawasan kumuh perkotaan.

Berbagai macam metode dan pendekatan perencanaan dalam pembangunan diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Capaian pembangunan harus berkontribusi terhadap indikator makro daerah sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu, pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan harus mampu menjawab berbagai permasalahan yang berkembang dan fokus terhadap sasaran prioritas. Kelima rumusan prioritas pembangunan Kalimantan Selatan kemudian diselaraskan dengan sasaran pembangunan yang kemudian dijabarkan ke dalam program prioritas untuk mencapai target indikator kinerja program daerah pada Tahun 2026.

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Tabel 4.4. Program Prioritas Daerah RPJMD Tahun 2021 – 2026 dan RPJMD Tahun 2025 - 2029

No.	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas	RPJMD 2021 - 2026			RPJMD 2025 - 2029			Program Prioritas P-RKPD 2025	OPD	
				Indikator	Tahun 2025		Indikator	Tahun 2025				
					Target	Satuan		Target	Satuan			
1.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya Nilai Tambah Hasil Industri, Perdagangan, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan Pariwisata ▪ Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja ▪ Meningkatnya Pendapatan masyarakat 	PD 1 : Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan	1	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Teknologi Pertanian	LPE Sektor Pertanian dan Perikanan (%)	3,5 - 4,2	%	LPE Sektor Pertanian dan Perikanan (%)	4,19	%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Program Penyuluhan Pertanian 4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 5. Program Perizinan Usaha Pertanian 6. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 7. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 8. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 9. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan 10. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 11. Program Penanganan Kerawanan Pangan 12. Program Pengawasan Keamanan Pangan 13. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 14. Program Perekonomian dan Pembangunan 15. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Disbunak, Dislutkan, Dinas PUPR, Biro Perekonomian
				Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan dan Hortikultura (%)	1,42	%						
				Produktivitas Tanaman Perkebunan (Karet) per Hektar per tahun	76,5	%						
				Persentase peningkatan produksi peternakan (%)	8	%						
				Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (Ton)	221.000	Ton						
				Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di	187.465	Ton						

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

No.	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas	RPJMD 2021 - 2026			RPJMD 2025 - 2029			Program Prioritas P-RKPD 2025	OPD	
				Indikator	Tahun 2025		Indikator	Tahun 2025				
					Target	Satuan		Target	Satuan			
				wilayah provinsi (Ton)						16. Program Penyelenggaraan Jalan		
				Nilai Tukar Petani (%)	103,69	%						
			2	Peningkatan Rantai Pasok Untuk Mendukung Hilirisasi Industri Berbasis Sumber Daya Alam Berkelanjutan	LPE Sektor Industri Pengolahan	4,5 - 5,25	%	LPE Sektor Industri Pengolahan	11,68-12,46	%	17. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 18. Program Pengendalian Izin Industri 19. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 20. Program Pengembangan Ekspor 21. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 22. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan 23. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 24. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 25. Program Promosi Penanaman Modal 26. Program Pelayanan Penanaman Modal 27. Program Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal 28. Program Pengelolaan dan Sistem Informasi Penanaman Modal 29. Program Perekonomian dan Pembangunan 30. Program Pengelolaan Hutan	Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas PMPTSP, Dinas Kehutanan, Biro Perekonomian
				LPE Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,2 - 9,1	%	LPE Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,37	%			
				Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)	13	%						
				Peningkatan Nilai Ekspor Non Migas (%)	12	%	Persentase Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB	77,74	%			
				Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rupiah)	14,55	Triliun Rupiah	Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB	21,43	%			
			3	Peningkatan Pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM Berbasis Digital dan Berdaya Saing	LPE sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum	7,8 - 8,25	%				31. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 32. Program Pemasaran Pariwisata 33. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas PMD, Dinas

PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No.	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas	RPJMD 2021 - 2026			RPJMD 2025 - 2029			Program Prioritas P-RKPD 2025	OPD	
				Indikator	Tahun 2025		Indikator	Tahun 2025				
					Target	Satuan		Target	Satuan			
				Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	5	%				34. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) 35. Program Pengembangan UMKM 36. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 37. Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi 38. Program Peningkatan Kerjasama Desa 39. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 40. Program Perekonomian dan Pembangunan 41. Program Pengelolaan Hutan 42. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Kehutanan, Diskominfo, Biro Perekonomian	
				Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi (%)	10	%						
				Tingkat hunian akomodasi (%)	52	%						
				Persentase Peningkatan Pendapatan Produk Kreatif (%)	5	%						
				Pengeluaran Per Kapita (Rp/org/thn)	12.320.671	Rp/org/thn	PDRB per Kapita	68,94-69,92	Ribu Rupiah			
			4	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja yang Berdaya Saing								
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	70,38	%				43. Program Perencanaan Tenaga Kerja 44. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 45. Program Penempatan Tenaga Kerja 46. Program Hubungan Industrial 47. Program Pengawasan Ketenagakerjaan 48. Program Pengelolaan Pendidikan 49. Program Pengembangan Kurikulum	Disnakertrans, Disdikbud	
				Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,88	%	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,63-4,18	%			
				Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	21,63	%						
			5	Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Bauran Energi	19,6	%	Porsi EBT dalam Bauran Energi	15	%	50. Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Dinas ESDM

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

N o.	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas	RPJMD 2021 - 2026			RPJMD 2025 - 2029			Program Prioritas P-RKPD 2025	OPD
				Indikator	Tahun 2025		Indikator	Tahun 2025			
					Target	Satuan		Target	Satuan		
									51.	52.	
2.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya Akses Pendidikan ▪ Meningkatnya Kualitas Kepemudaan ▪ Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat ▪ Menurunnya Pernikahan Anak ▪ Meningkatnya Prestasi dan Partisipasi Masyarakat di Bidang Olahraga ▪ Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan 	PD 2 : Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	1	Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,74	%			53. Program Pengelolaan Pendidikan 54. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Disdikbud, DP3A KB
			2	Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	53,995	Indeks			55. Program Pengelolaan Pendidikan 56. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Disdikbud, DispORA
			3	Pemerataan Akses Layanan Kesehatan	Usia Harapan Hidup	71,99	Tahun			57. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 58. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 59. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinkes, RSULIN, RSANSAL, RSJ SAMLIH, RSGM
			4	Penurunan Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	14	%			60. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 61. Program Pengawasan Keamanan Pangan 62. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 63. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 64. Program Rehabilitasi Sosial 65. Program Pengelolaan Persampahan 66. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 67. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 68. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 69. Program Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dislutkan, Dinsos, Dinas LH, Dinas PUPR, Dinas PMD, Biro Kesra, DP3A KB, Dinkes,

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

No.	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas	RPJMD 2021 - 2026			RPJMD 2025 - 2029			Program Prioritas P-RKPD 2025	OPD
				Indikator	Tahun 2025		Indikator	Tahun 2025			
					Target	Satuan		Target	Satuan		
									70. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 71. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 72. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 73. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 74. Program Pengendalian Penduduk		
			5	Penurunan Angka Pernikahan Anak Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 19 tahun	11,29	%			75. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 76. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 77. Program Perlindungan Perempuan 78. Program Perlindungan Khusus Anak	DP3A KB	
			6	Peningkatan Prestasi Olahraga Persentase Masyarakat Usia 7-60 Tahun yang berolahraga	41	%	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas %	46,67	79. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dispora	
							Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/Internasional %	10,76			
							Persentase partisipasi masyarakat berusia 10 - 60 tahun yang berolahraga %	0,417			

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

No.	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas	RPJMD 2021 - 2026			RPJMD 2025 - 2029			Program Prioritas P-RKPD 2025	OPD	
				Indikator	Tahun 2025		Indikator	Tahun 2025				
					Target	Satuan		Target	Satuan			
				Jumlah Medali Emas	35	Buah	Persentase Pemuda yang Berolahraga	%	30,1		80.	
			7	Pengembangan Budaya Daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	64,74	Indeks			81. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 82. Program Pengembangan Kebudayaan 83. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 84. Program Pembinaan Sejarah 85. Program Pengelolaan Permuseuman 86. Program Pembinaan Perpustakaan 87. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno 88. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Disdikbud, Dispersip, Dinsos	
3.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar ▪ Meningkatnya Konektivitas antar kawasan ▪ Terwujudnya pembangunan kawasan-kawasan strategis berdasarkan keseimbangan keruangan 	PD 3 : Pemanfaatan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi	1	Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar	Indeks Infrastruktur Dasar Wilayah	87,04	Indeks	Indeks Infrastruktur Dasar Wilayah	0,46	point	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 3. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional 4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 6. Program Pengelolaan Persampahan 7. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Kominfo, Dinas ESDM

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

No.	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas	RPJMD 2021 - 2026			RPJMD 2025 - 2029			Program Prioritas P-RKPD 2025	OPD	
				Indikator	Tahun 2025		Indikator	Tahun 2025				
					Target	Satuan		Target	Satuan			
			2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Menunjang Konektivitas antar Wilayah	Rasio Konektivitas	0,65	Indeks	Indeks Konektivitas	0,63	point	8. Program Pengembangan Perumahan 9. Program Kawasan Permukiman 10. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 11. Program Pengelolaan Persampahan 12. Program Ketenagalistrikan	
			3	Pengembangan Kawasan Prioritas dan Pedesaan yang Terintegrasi dengan Infrastruktur sebagai Gerbang Logistik Kalimantan	Persentase Kesesuaian Tata Ruang	85,5	%				1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 3. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 4. Program Penataan Bangunan Gedung 5. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 6. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 7. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 8. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 9. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan 10. Program Penatagunaan Tanah 11. Program Pengelolaan Pelayaran 12. Program Pengelolaan Perkeretaapian 13. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
4.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 	PD 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada	1	Penguatan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	75,64	Indeks				14. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 15. Program Penataan Organisasi 16. Program Perekonomian dan Pembangunan 17. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	BPSDM, Biro Organisasi, Biro Perekonomian, Biro Hukum, Biro
					Opini BPK	WTP						
					SAKIP	A	Indeks					

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

No.	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas	RPJMD 2021 - 2026		RPJMD 2025 - 2029		Program Prioritas P-RKPD 2025	OPD		
				Indikator	Tahun 2025		Indikator			Tahun 2025	
					Target	Satuan				Target	Satuan
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesetaraan Gender ▪ Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah ▪ Meningkatnya Pelayanan Publik ▪ Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah ▪ Meningkatnya Investasi yang Berdampak ke Daerah 	Pelayanan Publik dan Investasi							18. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan 19. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah 20. Program Kepegawaian Daerah 21. Program Penyelenggaraan Pengawasan 22. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 23. Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah 24. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 25. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 26. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 27. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 28. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 29. Program Pelayanan Penghubung 30. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 31. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (BLUD) 32. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Adbang, Biro Pemerintahan, BKD, Inspektorat, Bappeda, BKPAD, Bapenda, Setwan, Banhub, BRIDA, RSULIN, RSANSAL, RSJ SAMLIH, RSGM	
			2	Perencanaan Penganggaran yang Responsif	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,16	Indeks			33. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DP3A KB

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

No.	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas	RPJMD 2021 - 2026			RPJMD 2025 - 2029			Program Prioritas P-RKPD 2025	OPD
				Indikator	Tahun 2025		Indikator	Tahun 2025			
					Target	Satuan		Target	Satuan		
			Gender dan Inklusif								
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	78,21	Indeks				34.	
			3	Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,55	Indeks			35. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 36. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 37. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Dinas Kominfo, Biro PBJ
			4	Pengembangan Satu Data Kalsel	Meningkatnya Data Statistik Sektoral Yang Akurat	250	Jenis			38. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 39. Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Dinas Kominfo, Bappeda
			5	Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN)	Presentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	Minimal 25%	%			40. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 41. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 42. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 43. Program Pengembangan UMKM 44. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Biro PBJ, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan
			6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Dinas PMPTSP	88,75	%			45. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dinas PMPTSP

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

No.	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas	RPJMD 2021 - 2026			RPJMD 2025 - 2029			Program Prioritas P-RKPD 2025	OPD
				Indikator	Tahun 2025		Indikator	Tahun 2025			
					Target	Satuan		Target	Satuan		
5.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan ▪ Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca 	PD 5 : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Ketahanan Bencana	1 Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lahan	55,44	Indeks	Indeks Kualitas Lahan	70,37	point	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 5. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh 6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 8. Program Pengelolaan Persampahan 9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 10. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 11. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) 12. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 	Dinas LH, Dinas Kehutanan, Dislutkan, Dinas ESDM
				Indeks Kualitas Air	56,19	Indeks	Indeks Kualitas Air	70,45	point		
				Indeks Kualitas udara	88,97	Indeks	Indeks Kualitas Udara	70,97	point		
				Indeks Kualitas Air Laut	71,6	Indeks	Indeks Kualitas Air Laut	75,52	point		
				Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	26,6	%	Persentase Penurunan Emisi GRK	22,95	%		
	Luas kawasan ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi (ha)			175,8	Ha						

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

N o.	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas	RPJMD 2021 - 2026			RPJMD 2025 - 2029			Program Prioritas P-RKPD 2025	OPD
				Indikator	Tahun 2025		Indikator	Tahun 2025			
					Target	Satuan		Target	Satuan		
									13. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 14. Program Pengelolaan Hutan 15. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 16. Program Pengelolaan Hutan 17. Program Pengelolaan Sumber Daya Air 18. Program Konservasi Sumber Daya Alam 19. Hayati dan Ekosistemnya 20. Program Pengembangan Perumahan		
			2 Penguatan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	0,63	%			21. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 22. Program Pengembangan Perumahan 23. Program Pengelolaan Hutan 24. Program Penanggulangan Bencana 25. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 26. Program Penanganan Bencana 27. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas PUPR, Dinas Kehutanan, BPBD, Dinkes, UPT Dinkes, Dinsos, Dinas PMD	

PERUBAHAN RKPD 2026 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 disusun untuk mencapai sasaran dan target pembangunan daerah Tahun 2026. Prioritas pembangunan terdiri dari program-program prioritas yang diselenggarakan oleh SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap target pencapaian prioritas pembangunan.

Disamping pelaksanaan program prioritas dan program rutin daerah, perlu upaya yang lebih masif untuk mendorong kinerja pencapaian target dimaksud melalui berbagai strategi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan komprehensif dan dapat dilaksanakan secara kolaboratif untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap keberhasilan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan. Upaya tersebut diantaranya dapat didorong melalui berbagai inovasi pembangunan baik yang bersifat sektoral maupun multisektor yang termuat dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pada Tahun 2026. Penjabaran pelaksanaan inovasi yang dilaksanakan pada Tahun 2026 termuat dalam Bab VI terkait Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.

4.3 Keselarasan Prioritas Pembangunan RKPD 2025 dan RKP

Program Prioritas tersebut juga tidak lepas dari agenda pembangunan dan program pembangunan yang pada Tahun 2025 ini merupakan penjabaran dari 5 Prioritas Daerah. Penjabaran Program prioritas disusun dengan harapan dapat menunjukkan kesungguhan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung prioritas pembangunan Nasional Tahun 2025. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Kalsel dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Sandingan Agenda Pembangunan/Program Pembangunan dengan Prioritas Daerah /Program Prioritas Provinsi Tahun 2025
2. Sandingan Prioritas Nasional dengan Prioritas Provinsi Tahun 2025
3. Sandingan Indikasi Intervensi Prioritas Nasional dengan Indikasi Intervensi Prioritas Provinsi Tahun 2025

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Tabel 4.5. Sandingan Agenda Pembangunan/Program Pembangunan dengan Prioritas Daerah /Program Prioritas Provinsi Tahun 2025

No	Agenda Pembangunan/ Program Pembangunan	No	Prioritas Daerah / Program Prioritas Provinsi
AP:Transformasi Sosial			PD 1 : Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan PD 2 : Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing
1	Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat		1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
2	Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat		
3	Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan		
No	Agenda Pembangunan/ Program Pembangunan	No	
4	Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola		
5	Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pra Sekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah)		
6	Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi Berkualitas dan Pengembangan STEAM		
7	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran		
8	Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas		
9	Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan		
10	Peningkatan Produktivitas, Daya Saing, dan Kemampuan Kerja		
11	Satu Sistem Registrasi Sosial Ekonomi		
12	Integrasi Bantuan Sosial, Jaminan Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat yang Adaptif		
13	Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional		
14	Pengembangan Ekonomi Perawatan (Care Economy) untuk Perluasan Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan		
15	Inklusi sosial untuk Kesejahteraan Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia, dan Kelompok Rentan Lainnya		
AP:Transformasi Ekonomi			PD 1 : Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan PD 3 : Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi
1	Penguatan Industri Dasar		15. Program Pengembangan Ekspor

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

No	Agenda Pembangunan/ Program Pembangunan	No	Prioritas Daerah / Program Prioritas Provinsi
2	Hilirisasi Industri Berbasis Mineral Penting		16. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 17. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan 18. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 19. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 20. Program Promosi Penanaman Modal 21. Program Pelayanan Penanaman Modal 22. Program Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal 23. Program Pengelolaan dan Sistem Informasi Penanaman Modal 24. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 25. Program Pemasaran Pariwisata 26. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 27. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
3	Hilirisasi Industri Berbasis Sumber Daya Hayati		
4	Pengembangan Industri Medium-High Technology		
5	Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi		
6	Pengembangan Ekonomi Biru Indonesia sebagai Sumber Pertumbuhan Baru		
7	Pembangunan Destinasi Pariwisata yang Berkualitas dan Berkelanjutan		
8	Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Budaya dan Intelektual		
9	Peningkatan Produktivitas BUMN		
10	Penguatan Ekonomi dan Keuangan Syariah		
11	Produktivitas Tenaga Kerja		
No	Agenda Pembangunan/ Program Pembangunan	No	
12	Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional		28. Program Pengembangan UMKM 29. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 30. Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi 31. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 32. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 33. Program Penyuluhan Pertanian 34. Program Perizinan Usaha Pertanian 35. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 36. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 37. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 38. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 39. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 40. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 41. Program Pengendalian Izin Industri 42. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 43. Program Perencanaan Tenaga Kerja
13	Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian		
14	Percepatan Transisi Energi		
15	Ekonomi Sirkular Industri		
16	Pengembangan Pekerjaan Hijau (Green Jobs)		
17	Penguatan Pondasi Utama Transformasi Digital		
18	Digitalisasi Sektor Ekonomi dan Sektor Strategis		
19	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Terintegrasi		
20	Optimalisasi Backbone Integrasi Ekonomi		
21	Perkuatan Sistem Logistik Nasional		
22	Peningkatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		
23	Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global		
24	Wilayah Metropolitan		
25	Pembangunan Ibu Kota Nusantara		



**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

No	Agenda Pembangunan/ Program Pembangunan	No	Prioritas Daerah / Program Prioritas Provinsi
26	Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan		44. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 45. Program Penempatan Tenaga Kerja 46. Program Hubungan Industrial 47. Program Pengawasan Ketenagakerjaan 48. Program Pengelolaan Energi Terbarukan 49. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 50. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 51. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 52. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 53. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 54. Program Pengembangan Perumahan 55. Program Kawasan Permukiman 56. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) 57. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 58. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 59. Program Pengelolaan Persampahan 60. Program Penyelenggaraan Jalan 61. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan 62. Program Penyelenggaraan Jalan 63. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 64. Program Pengelolaan Pelayaran 65. Program Pengelolaan Perkeretaapian 66. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 67. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 68. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 69. Program Penatagunaan Tanah 70. Program Pengelolaan Hutan 71. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 72. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian 73. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
AP: Transformasi Tata Kelola			PD 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik dan Investasi
1	Penguatan Tata Kelola Regulasi dan Pembentukan Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi		74. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik		75. Program Penataan Organisasi 76. Program Perekonomian dan Pembangunan
3	Penataan Proses Bisnis dan Kelembagaan Pembangunan		77. Program Kepegawaian Daerah
4	Transformasi Manajemen ASN		78. Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

No	Agenda Pembangunan/ Program Pembangunan	No	Prioritas Daerah / Program Prioritas Provinsi
5	Transformasi Kesejahteraan, Sistem Penggajian Tunggal dan Pensiunan ASN		79. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
6	Sistem Anti Korupsi dan Akuntabilitas Pembangunan		80. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
7	Penguatan Integritas Partai Politik		81. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
			82. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
AP:Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia			PD 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik dan Investasi
1	Transformasi Kelembagaan dan Tata Kelola Penguatan Ideologi, Politik, Hukum dan Keamanan Nasional		83. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
2	Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat Generaal		84. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
			85. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
3	Perlindungan, Pemenuhan dan Penghormatan HAM serta Transformasi Akses terhadap Keadilan		86. Program Penyelenggaraan Pengawasan
4	Penguatan Kelembagaan Hukum		87. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
5	Budaya Hukum		88. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
6	Penerapan dan Penegakan Hukum		89. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
7	Keamanan Dalam Negeri, Penguatan Intelijen, dan Penanggulangan Terorisme		90. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
8	Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi		91. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
9	Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal		92. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
10	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		
11	Keamanan Insani, Pelindungan WNI, Keimigrasian, dan Narkoba		93. Program Pelayanan Penghubung
12	Penguatan Kebebasan Sipil dan Kesenjangan		94. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
13	Komunikasi Publik		95. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (BLUD)
14	Penguatan Kapasitas, Fungsi, dan Integritas Lembaga Demokrasi		96. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
15	Optimalisasi Pendapatan Negara		97. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
16	Optimalisasi Belanja Negara		98. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
17	Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan		
18	Pengendalian Inflasi		
19	Stabilitas Sistem Keuangan		
20	Kedaulatan dan Stabilitas		
21	Politik Luar Negeri dan Kepemimpinan Indonesia		
22	Kerja Sama Pembangunan Internasional dan Diplomasi Ekonomi		
23	Diplomasi Publik, Sosial-Budaya, dan Jejaring Diaspora		
24	Peningkatan Kemampuan Pertahanan		
25	Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertahanan		

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

No	Agenda Pembangunan/ Program Pembangunan	No	Prioritas Daerah / Program Prioritas Provinsi
AP:Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi			PD 1 : Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan PD 2 : Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing PD 5 : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Ketahanan Bencana
1	Penguatan Beragama Maslahat dan Layanan Keagamaan Transformatif		99. Program Pengelolaan Pendidikan 100. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2	Penguatan Karakter Bangsa dan Pemajuan Kebudayaan		101. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
3	Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak		102. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4	Peningkatan Kualitas Pemuda		103. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
5	Peningkatan Ketangguhan Keluarga		
6	Penurunan Ketimpangan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan		104. Program Perlindungan Perempuan 105. Program Perlindungan Khusus Anak 106. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
7	Pengurangan Kehilangan Keanekaragaman Ekosistem dan Spesies		107. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
8	Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Berkelanjutan		108. Program Pengembangan Kebudayaan
9	Manajemen Sumber Daya Genetik Keanekaragaman Hayati		109. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
10	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup		110. Program Pembinaan Sejarah 111. Program Pengelolaan Permuseuman
No	Agenda Pembangunan/ Program Pembangunan	No	Prioritas Daerah / Program Prioritas Provinsi
11	Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan		112. Program Pembinaan Perpustakaan 113. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
12	Penerapan ekonomi sirkular dari sumber Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga secara partisipatif (hulu)		114. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 115. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
13	Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (hilir)		116. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
14	Percepatan Pemenuhan Akses Sanitasi Aman untuk Masyarakat		117. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
15	Peningkatan Ketersediaan Energi		118. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
16	Peningkatan Aksesibilitas Energi		119. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
17	Perluasan Keterjangkauan Energi		120. Program Pengelolaan Persampahan
18	Peningkatan Tingkat Penerimaan Energi		121. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
19	Peningkatan Ketahanan Air Nasional		122. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
20	Peningkatan Ketersediaan Pangan Nasional		123. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
21	Peningkatan Kualitas Konsumsi, Keamanan, serta Penanganan Kerawanan Pangan dan Giz		
22	Penguatan Tata Kelola Sistem Pangan		124. Program Pengendalian Bahan
23	Food, Energy, and Water (FEW) Nexus		

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

No	Agenda Pembangunan/ Program Pembangunan	No	Prioritas Daerah / Program Prioritas Provinsi
24	Pemenuhan Akses Air Minum Aman		Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 125. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH 126. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 127. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 128. Program Penanggulangan Bencana 129. Program Penanganan Bencana 130. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) 131. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 132. Program Penanganan Kerawanan Pangan 133. Program Pengawasan Keamanan Pangan
25	Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna		
26	Pembangunan Berketahanan Iklim		
27	Pembangunan Rendah Karbon		

4.4 Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Penyajian indikator kinerja daerah dibagi menjadi 4 (empat) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, serta indikator kinerja kunci. Indikator pada aspek Pelayanan Umum memberikan tolak ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Untuk indikator kinerja tahun 2026 disusun berdasarkan rencana prioritas pembangunan di mana 5 (lima) prioritas tersebut dilaksanakan secara terintegrasi.

PRIORITAS I – Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) selain difokuskan pada penguatan pendidikan dan kesehatan, juga diarahkan pada aspek spiritual dan nilai-nilai hidup yang luhur, berbudaya, dan berakhlak mulia. Sub prioritas terdiri atas : (1) Peningkatan Kualitas Pendidikan; (2) Peningkatan Kualitas Kesehatan; (3) Peningkatan Prestasi Olahraga dan Kepemudaan; (4) Penurunan Prevalensi Stunting; (5) Pelestarian Budaya; (6) Peningkatan Akses Disabilitas dan

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Pemenuhan Layanan Kesejahteraan Sosial. Program-program terkait akan mendukung pencapaian target indikator kinerja daerah pada

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - a. Fokus Kesejahteraan Sosial
2. Indikator kinerja kunci, terdiri dari :
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Sosial
 - d. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - e. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - f. Kepemudaan dan Olahraga
 - g. Kebudayaan
 - h. Perpustakaan
 - i. Kearsipan
 - j. Kesatuan Bangsa dan Politik

PRIORITAS II – Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Perekonomian Berbasis Kewilayahan. Pembangunan di berbagai sektor didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana yang diutamakan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mendorong perekonomian daerah serta posisi Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik. Penyediaan sarana dan prasarana diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan yang menjangkau seluruh wilayah serta tekoneksi dengan wilayah lain. Sub prioritas terdiri atas : (1) Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Dasar; (2) Penguatan Konektivitas antar Wilayah; (3) Pengembangan Moda Transportasi Massal; (4) Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi. Program-program terkait akan mendukung pencapaian target indikator kinerja daerah pada:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - a. Fokus Kesejahteraan Sdan Pemerataan Ekonomi
2. Indikator kinerja kunci, terdiri dari :
 - a. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - b. Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - c. Pertanahan
 - d. Lingkungan Hidup
 - e. Perhubungan

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

- f. Komunikasi dan Informatika
- g. Kelautan dan Perikanan
- h. Pertanian

PRIORITAS III – Peningkatan Sektor Unggulan (Industri, UMKM, Perdagangan, Pertanian dan Pariwisata) Didukung oleh Investasi, Tenaga Kerja Berdaya Saing, dan Energi Berkelanjutan. Perekonomian daerah dikembangkan dengan mengelola sumber daya alam didukung dengan sumber daya manusia yang unggul, dan infrastruktur yang handal. Penerapan inovasi serta teknologi informasi dan komunikasi dengan mengedepankan prinsip inklusif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan, menjadi keniscayaan untuk menjawab tantangan ekonomi global. Posisi strategis Kalimantan Selatan yang berdampingan dengan IKN menjadi peluang untuk mewujudkan gerbang logistik yang maju dan unggul. Sub prioritas terdiri atas : (1) Peningkatan Investasi Berdampaka pada daerah dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) Mendukung Hilirisasi Industri; (2) Peningkatan Produksi dan Produktivitas dengan Teknologi Pertanian Untuk Mendukung hilirisasi Industri; (3) Pengembangan Distribusi Logistik dan Penguatan UMKM Berbasis Digital Untuk Menuju Gerbang Logistik Kalimantan; (4) Peningkatan Pariwisata Unggulan Daerah dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing; (5) Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Transmigran yang Berdaya Saing. Dengan program-program terkait akan mendukung pencapaian target indikator kinerja daerah pada :

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
2. Aspek Daya Saing Daerah
3. Indikator kinerja kunci, terdiri dari :
 - a. Pendidikan
 - b. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - c. Tenaga Kerja
 - d. Pangan
 - e. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - f. Komunikasi dan Informatika
 - g. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - h. Penanaman Modal

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

- i. Kepemudaan dan Olahraga
- j. Kelautan dan Perikanan
- k. Pariwisata
- l. Pertanian
- m. Kehutanan
- n. Energi dan Sumber Daya Mineral
- o. Perdagangan
- p. Perindustrian
- q. Pengadaan

PRIORITAS IV – Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Kapasitas Mitigasi serta Penanganan Bencana Pembangunan daerah dilakukan secara lestari dan berkelanjutan, sehingga akan memperkuat ketahanan daerah terhadap perubahan iklim dan bencana. Sumber daya alam dan potensi wilayah dikelola secara berimbang sehingga selain bermanfaat untuk peningkatan perekonomian daerah, juga dapat mempertahankan kualitas lingkungan hidup. Sub prioritas terdiri atas : (1) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup; (2) Meningkatkan Ketahanan Daerah yang Berkelanjutan. Program-program terkait akan mendukung pencapaian target indikator kinerja daerah pada :

- 1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - a. Fokus Kesejahteraan Sosial
- 2. Indikator kinerja kunci, terdiri dari :
 - a. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - b. Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - c. Lingkungan Hidup
 - d. Kehutanan

PRIORITAS V – Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik. Penyelenggaraan pemerintahan daerah mengedepankan prinsip profesional, bersih, dan melayani serta berbasis digital Pelayanan publik yang mudah, cepat, dan transparan menjadi komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus daya tarik bagi peningkatan investasi daerah. Sub prioritas terdiri atas : (1) Penguatan Reformasi Birokrasi; (2) Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Rangka Meningkatkan

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Pelayanan Publik; (3) Pengembangan Satu Data Kalsel, dengan program-program terkait akan mendukung pencapaian target indikator kinerja daerah pada:

1. Indikator kinerja kunci, terdiri dari :
 - a. Kesehatan
 - b. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
 - c. Komunikasi dan Informatika
 - d. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - e. Kelautan dan Perikanan
 - f. Kehutanan
 - g. Energi dan Sumber Daya Mineral
 - h. Perencanaan dan Keuangan
 - i. Kepegawaian
 - j. Manajemen Keuangan

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 sebagaimana tertuang pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.6. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal		Target	Kondisi Akhir
			Realisasi 2024	Target 2025	2026	
1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
01.01	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
01.01.01	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,05	4,97 - 5,28	5,0 - 6,42	5,8 - 8,2
01.01.02	Persentase Penduduk Miskin	Persen	4,02	3,44-3,94	3,23-3,46	2,43-2,93
01.01.03	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	60.210	68,94-69,29	92,70	182,99-206,73
01.01.04	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	Ribu Rupiah/Orang/Tahun	13.399	13.860	14.338	16.417
01.01.05	Indeks Gini	Indeks	298	0,290 - 0,301	0,284 - 0,294	0,262-0,274
01.01.06	Return on Aset (ROA) BUMD	Persen	N/A	0,68	0,99	2,14
01.01.07	Konsumsi Listrik Per Kapita	Kwh/Kapita	939	942	1032	1409
01.01.08	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	75,7	72,32	72,51	73,30
01.01.09	Indeks Kualitas Air	Indeks	56,42	70,45	72,70	73,42
01.01.10	Indeks Kualitas Udara	Indeks	96,41	70,97	71,25	72,37

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal		Target	Kondisi Akhir
			Realisasi 2024	Target 2025	2026	
01.01.11	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	84,27	72,52	80,1	80,30
01.01.12	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	52	70,37	70,44	70,72
01.01.13	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	N/A	8,13	9,58	15,38
01.01.14	Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	9,2	9,76	10,32	13,26
01.01.15	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	65,85	66,41	66,97	67,41
01.01.16	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	belum rilis	75,97	76,41	82,88
01.01.17	Persentase Penurunan Emisi GRK (tahunan) (%)	Persen	24,6	22,95	26,86	40,43
01.01.18	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Persen	N/A	50	52,50	62
01.01.19	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	N/A	56,81	57,72	61,16
01.01.20	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi		N/A	7,28	7,13	6,53
01.01.21	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	Persen	N/A	70	71,88	79
01.01.22	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	N/A	64,62	65,71	69,83
01.01.23	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	Persen	N/A	31,62	33,80	42,08
01.01.24	Aset Dana Pensiun/PDRB	Persen	N/A	0,13	0,26	0,77
01.01.25	Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	Persen	N/A	2.302.966,62	3190579,06	6.563.506,33
01.01.26	Total Kredit/PDRB	Persen	N/A	23,5	25,86	34,81
01.01.27	Inklusi Keuangan	Persen	N/A	87,98	88,63	91,11
01.01.28	Intensitas Energi Primer	SBM/Rp milyar	N/A	170	171,88	179
01.01.29	Kapasitas Air Baku	m3/detik	N/A	5,40	5,42	5,48
01.01.30	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	N/A	45,91	49,29	62,14
01.01.31	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional WM Banjarmasin (terdiri dari Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar,	Persen	N/A	0,52	0,53	0,55

PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal		Target	Kondisi Akhir
			Realisasi 2024	Target 2025	2026	
	Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut)					
01.01.32	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	74,71	75,08	75,46	76,98
01.01.33	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Persen	3,83	3,81	3,59	2,76
01.02	Fokus Kesejahteraan Sosial					
01.02.01	Indeks Modal Manusia	Indeks	belum rilis	0,56	0,57	0,62
01.02.02	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,19	75,72	76,261	78,45
01.02.03	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,18	74,42	74,66	75,64
01.02.04	Prevalensi Stunting	Persen	22,9	23	19,5	16,83
01.02.05	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,62	8,74	8,83	10,00-10,03
01.02.06	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,87	13,33	13,46	13,99
01.02.07	Angka Literasi SMA	Angka	75,32	75,92	76,52	78,92
01.02.08	Angka Literasi SMK	Angka	72,38	73,68	74,98	80,18
01.02.09	Angka Literasi SDLB	Angka	70,83	72,43	74,03	80,43
01.02.10	Angka Literasi SMPLB	Angka	77,1	77,6	78,1	80,1
01.02.11	Angka Literasi SMALB	Angka	76,45	76,95	77,45	79,45
01.02.12	Angka Numerasi SMA	Angka	63,1	64,7	66,3	72,7
01.02.13	Angka Numerasi SMK	Angka	60,82	63,02	65,22	74,02
01.02.14	Angka Numerasi SDLB	Angka	72,66	73,26	73,86	76,26
01.02.15	Angka Numerasi SMPLB	Angka	73,84	74,09	74,34	75,34
01.02.16	Angka Numerasi SMALB	Angka	68,65	69,15	69,65	71,65
01.02.17	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	81,16	82,38	83,61	88,74
01.02.18	Indeks Literasi Digital	Indeks	belum rilis	3,88	4,03	4,66
01.02.19	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Indeks	96,76	96,88	96,99	97,46
01.02.20	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,2	3,63 - 4,18	3,56 - 4,14	3,20-3,83
01.02.21	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persen	N/A	34,16	37,2225	48,86
01.02.22	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	74,01	74,3	74,7	76,32
01.02.23	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	belum rilis	64,74	66,29	72,87
01.02.24	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	belum rilis	69,95	63	67
01.02.25	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	62,9	65,95	69,5	82,2
01.02.26	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	belum rilis	0,488	0,488	0,450
01.02.27	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	54,67	53,99	54,66	59,18
01.02.28	Indeks Risiko Bencana	Indeks	122,11	120.889	119.668	114.784

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal		Target	Kondisi Akhir
			Realisasi 2024	Target 2025	2026	
01.02.29	Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0,54	0,56	0,58	0,66
01.02.30	Indeks Desa	Persen	0,7903	0,7943	0,7983	0,8143
01.02.31	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka	N/A	189	178,31	137,7
01.02.32	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	Persen	N/A	66	67,81	74,7
01.02.33	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	Persen	N/A	88	88,68	91,2
01.02.34	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persen	N/A	98,9	98,94	99,07
01.02.35	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	11,67	12,67	13,76	19,15
01.02.36	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	Persen	N/A	74,78	75,42	77,85
01.02.37	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Persen	N/A	26	28,13	36,2
01.02.38	Proporsi Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	Persen	N/A	12,1	13,24	17,55
01.02.39	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi	Persen	N/A	10,72	10,90	11,58
01.02.40	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi	Persen	N/A	2,26	2,44	3,11
01.02.41	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	N/A	0,78	0,93	1,49
01.02.42	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:					
	i) Literasi Membaca	Persen	N/A	15,38	19,23	33,84
	ii) Numerasi	Persen	N/A	0,00-7,69	3,85	16,92
01.02.43	Kontribusi PDRB Provinsi	Persen	N/A	1,3	1,32	1,39
II	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
02.01.01	Rasio Ketergantungan	Persen	47,10	47,16	47,12	46,61
02.01.02	Indeks Williamson	Indeks	0,493	0,493	0,493	0,433
02.01.03	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	10,95	11,68-12,46	12,60	16,11-17,27

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal		Target	Kondisi Akhir
			Realisasi 2024	Target 2025	2026	
02.01.04	Kontribusi Akomodasi Makan dan Minum terhadap PDRB	Persen	1,98	2,12-2,37	2,21-2,48	2,56-2,89
02.01.05	Laju PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	Persen	4,16	4,19	4,22	4,33
02.01.06	Laju PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	Persen	8,07	8,08	8,09	8,10
02.01.07	Laju PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor (%)	Persen	6,36	6,37	6,37	6,40
02.01.08	Rasio Kewirausahaan	Persen	2,95	3,02	3,09	3,43
02.01.09	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	70,22	70,44	70,44	70,44
02.01.10	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	51,71	53	54	62
02.01.11	Indeks Ekonomi Hijau	Indeks	belum rilis	54,73	56,525	63,35
02.01.12	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Indeks	belum rilis	23,78	24,943	29,35
02.01.13	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	6,89	7,21	7,54	8,84
02.01.14	Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB	Persen	21,35	21,43	21,52	22,8
02.01.15	Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB	Persen	67,12	77,74	78,40	80,82
02.01.16	Indeks Infrastruktur	Indeks	N/A	0,59	0,61	0,67
02.01.17	Indeks Infrastruktur Dasar	Indeks	N/A	0,46	0,47	0,53
02.01.18	Indeks Konektivitas	Indeks	0,63	0,63	0,65	0,71
02.01.19	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	60,6	63,35	65,67	74,97
02.01.20	Persentase Desa Mandiri	Persen	43,35	46,02	48,69	59,38
02.01.21	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	1,54	1,92	1,91	1,85
02.01.22	Tingkat Inflasi	Persen	1,95	3,2-3,9	3075,00	2,6-3,8
02.01.23	Porsi EBT dalam bauran energi primer	Persen	11,96	15	16,8	24,0
III	ASPEK PELAYANAN UMUM					
03.01.01	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	84,54	84,68	84,82	85,39
03.01.02	Indeks Reformasi Hukum	Indeks		70	71,9	79
03.01.03	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis	Indeks	3,63	3,64	3,65	3,78

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal		Target	Kondisi Akhir
			Realisasi 2024	Target 2025	2026	
	Elektronik					
03.01.04	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,52	4,53	4,54	4,58
03.01.05	Indeks Integritas	Indeks	64,15	76,36	77,34	81,05
03.01.06	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	80,44	80,44	81,2	81,26
03.01.07	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,56	3,61	3,66	3,86
03.01.08	Nilai SAKIP	Nilai	A (82.04)	82,96	83,88	87,69
03.01.09	Opini BPK	WTP	belum rilis	WTP	WTP	WTP
03.01.10	Indeks Sistem Merit	Indeks	belum rilis	325,0	330,0	370,0
03.01.11	Indeks Manajemen Risiko	Indeks	2,929	2,841	2,756	2,440
IV	INDIKATOR KINERJA KUNCI					
04.01	PENDIDIKAN					
04.01.01	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang Berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Persen	72,31	72,95	73,59	76,16
04.01.02	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Persen	40,45	42,05	43,64	50,53
04.02	KESEHATAN					
04.02.01	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio Daya tampung per 1.000 Penduduk	1.5 : 1000	1.5 : 1000	1.5 : 1000	1.5 : 1000
04.02.02	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	Persen	100	100	100	100
04.02.03	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Persen	100	100	100	100
04.02.04	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	Persen	100	100	100	100
04.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
04.03.01	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Persen	46,44	0,62	3,68	35,59

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal		Target	Kondisi Akhir
			Realisasi 2024	Target 2025	2026	
04.03.02	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	Persen	4,53	6,8	15,51	61,39
04.03.03	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	56,76	39,08	40,08	44,08
04.03.04	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	Persen	82	70	73,33	86,67
04.03.05	Rasio kemantapan jalan	Persen	82,91	83,35	83,71	84,87
04.03.06	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Persen	99,61	64,29	69,29	89,29
04.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
04.04.01	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	98,67	100	100	100
04.04.02	Persentase Luas kawasan kumuh 10 - 15 Ha yang dapat ditangani	Persen	39,19	48,57	53,73	75,51
04.04.03	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persen	79,01	79,8	80,6	83,8
04.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
04.05.01	Persentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100
04.05.02	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	90,74	100	100	100
04.05.03	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Persen	100	100	100	100
04.05.04	Persentase penanganan pra bencana	Persen	100	100	100	100
04.05.05	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Persen	100	100	100	100

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal		Target	Kondisi Akhir
			Realisasi 2024	Target 2025	2026	
04.06	SOSIAL					
04.06.01	Persentase PPKS yang mandiri	Persen	20,51	20,79	21,29	23,29
04.06.02	Tingkat Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	94,17	100	100	100
04.06.03	Tingkat Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	100	100	100	100
04.06.04	Tingkat Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen (%)	100	100	100	100
04.06.05	Tingkat Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	100	100	100	100
04.06.06	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi	Persen	100	100	100	100
04.07	TENAGA KERJA					
04.07.01	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	Persen	100	100	100	100
04.07.02	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	Persen	48,35	28,41	43,58	45,09
04.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
04.08.01	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	32,95	50	33	35
04.08.02	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Rasio per 10.000 anak	4,2	1,27	4,15	4
04.08.03	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio per 100.000 Penduduk Perempuan	12,5	9,2	12,45	12,25
04.09	PANGAN					
04.09.01	Persentase Cadangan Pangan	Persen	214,88	248,45	251,52	252,14

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal		Target	Kondisi Akhir
			Realisasi 2024	Target 2025	2026	
04.10	PERTANAHAN					
04.10.01	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	0	100	100	100
04.10.02	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Persen	3,15	100	100	100
04.10.03	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota	Persen	0	100	100	100
04.11	LINGKUNGAN HIDUP					
04.11.01	Persentase penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi	Persen	3,2	0	0	0
04.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
04.12.01	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	Persen	100	100	100	100
04.12.02	Pemanfaatan data kependudukan	Persen	32,30	40	45	65
04.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
04.13.01	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	175,85	6,17	5,81	56,71
04.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
04.14.01	TFR (Angka Kelahiran Total)	Rasio Angka Kelahiran Total	2,24	2,21	2,23	2,19
04.14.02	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	71,8	75	76,37	78,87
04.14.03	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	6	5,7	5,06	5
04.15	PERHUBUNGAN					
04.15.01	Rasio konektivitas	Rasio Konektivitas	0,649	0,65	0,66	0,69
04.15.02	V/C Rasio	Rasio Volume/Capacity	0,618	0,6	0,6	0,65
04.16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
04.16.01	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) yang	Persen	100	100	100	100

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal		Target	Kondisi Akhir
			Realisasi 2024	Target 2025	2026	
	terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo					
04.16.02	Presentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Persen	100	100	60	100
04.16.03	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi	Persen	100	100	77	82
04.17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
04.17.01	Persentase Koperasi yang berkualitas	Persen	22,39	24,45	26,71	38,00
04.17.02	Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	Persen	0,30	21,17	22,67	28,67
04.18	PENANAMAN MODAL					
04.18.01	Persentase peningkatan investasi di provinsi	Persen	25,74	26,00	26,26	27,32
04.19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
04.19.01	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	13,8	17,01	20,96	48,38
04.19.02	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	20,49	20,87	21,25	22,85
04.19.03	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	355	100	110	200
04.20	STATISTIK					
04.20.01	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100
04.20.02	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100
04.21	PERSANDIAN					
04.21.01	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	84	70	73	85
04.22	KEBUDAYAAN					
04.22.01	Terlestariannya Cagar Budaya	Persen	16,67	19,66	23,19	44,86

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal		Target	Kondisi Akhir
			Realisasi 2024	Target 2025	2026	
04.23	PERPUSTAKAAN					
04.23.01	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Poin Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	74,63	76,12	77,65	84,05
04.24	KEARSIPAN					
04.24.01	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persen	N/A	47,5	47,74	48,70
04.24.02	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	N/A	100	100	100
04.25	KELAUTAN DAN PERIKANAN					
04.25.01	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi	Ton	369.460,00	408465	383.837,61	1.988.690,19
04.25.02	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Persen	100	100	100	100
04.26	PARIWISATA					
04.26.01	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	-2,43	5	5	5
04.26.02	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	Persen	1,30	10	10	10
04.26.03	Tingkat hunian akomodasi	Persen	47,05	52	54	62
04.26.04	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	1,92	2,44	2,46	2,61
04.27	PERTANIAN					
04.27.01	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton Per Hektar Per Tahun	442,05	444,84	447,65	459,06
04.27.02	Persentase Penurunan Kejadian dan	Persen	31,25	95	95	95

PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal		Target	Kondisi Akhir
			Realisasi 2024	Target 2025	2026	
	Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular					
04.28	KEHUTANAN					
04.28.01	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Persen	100	100	100	100
04.28.02	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	Persen	0,23	0,25	0,26	0,30
04.28.03	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Persen	46,01	48	50	58
04.29	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
04.29.01	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	Persen	100	100	100	100
04.29.02	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	Persen	99,35	99,40	99,45	99,65
04.30	PERDAGANGAN					
04.30.01	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	Persen	-13,5	12	14	18
04.30.02	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Persen	100	100	100	100
04.30.03	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	Persen	100	100	100	100
04.30.04	Tertib Usaha	Persen	100	100	100	100
04.30.05	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	52,36	70,92	70,95	80,30
04.30.06	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang - Undangan	Persen	97	100	100	100
04.30.07	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Koefisien Variasi harga barang (Rata-rata)	0,03	0,05	0,04	0,01
04.31	PERINDUSTRIAN					
04.31.01	Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi	Persen	21,11	4,59	5,26	6,94
04.31.02	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	90,1	100	100	100
04.31.03	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri	Persen	75	100	100	100

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal		Target	Kondisi Akhir
			Realisasi 2024	Target 2025	2026	
	(IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait					
04.31.04	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	N/A	100	100	100
04.31.05	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	N/A	100	100	100
04.31.06	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Nilai Total Kelengkapan Informasi Industri (%)	125	100	100	100
04.32	PERENCANAAN DAN KEUANGAN					
04.32.01	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Persen	47	24,89	16,1	17,42
04.32.02	Rasio PAD	Persen	42,96	46,15	46,27	57,87
04.32.03	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	Persen	0,4653	0,48	0,53	0,57
04.32.04	Opini Laporan Keuangan	Jumlah 1 - 10 Opini WTP	blm rilis	WTP	WTP	WTP
04.32.05	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2,934	Level 3	Level 3	Level 3
04.32.06	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
04.33	PENGADAAN					
04.33.01	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0	0	0	0
04.33.02	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	18.57	10	10	10
04.33.03	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui	Persen	73.36	30	30	30

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal		Target	Kondisi Akhir
			Realisasi 2024	Target 2025	2026	
	pengadaan					
04.33.04	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Persen	81,74	40	40	45
04.34	KEPEGAWAIAN					
04.34.01	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	76,5	77	77,5	80
04.34.02	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	17,31	17,5	18	20
04.34.03	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	65,63	67	69	77
04.35	MANAJEMEN KEUANGAN					
04.35.01	Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	Persen	16,74	0,06	9,8	4,32

4.5 Arah Kebijakan Kewilayahan Berdasarkan Pembagian Klaster

A. Arah Kebijakan Banjarbakula dan Sekitarnya

Pada tahun 2024, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut telah disahkan melalui Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2024 tentang RTR KSN Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula. Perpres tersebut mencakup keseluruhan wilayah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, sebagian wilayah Kabupaten Banjar, dan sebagian wilayah Kabupaten Barito Kuala.

Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan sebagai pusat kegiatan ekonomi berskala internasional melalui perdagangan dan jasa, pariwisata, industri, industri kelautan, pertanian,

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

dan pengembangan pusat pelayanan yang terkoneksi antar kawasan berbasis pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel 5. 1 Kebijakan dan Strategi Kawasan Metropolitan Banjarbakula

No.	Kebijakan	Strategi
1	<p>Pengembangan dan pemantapan fungsi Kawasan Perkotaan Inti sebagai pusat perdagangan jasa, pelayanan umum dan ekonomi berskala internasional, dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sebagai kawasan pendukung perkotaan inti melalui kegiatan industri, pengolahan hasil pertanian, dan pengembangan permukiman perkotaan</p>	<p>a. Mengembangkan Kawasan Perkotaan Inti sebagai pusat pemerintahan provinsi, pusat pendidikan tinggi, pusat perekonomian skala regional, nasional, dan internasional sekaligus sebagai pintu gerbang skala regional, nasional, dan internasional melalui sektor perhubungan;</p> <p>b. Meningkatkan keterkaitan Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya untuk mendorong berkembangnya potensi sektor pertanian dan industri agro;</p> <p>c. Meningkatkan keterkaitan Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya untuk mendorong perkembangan potensi sektor industri;</p> <p>d. Mengembangkan fungsi permukiman perkotaan pada Kawasan Perkotaan di Sekitarnya dalam rangka mengantisipasi meningkatnya kebutuhan permukiman di Kawasan Perkotaan Inti</p> <p>e. Mempertahankan fungsi-fungsi pusat kegiatan utama dan kegiatan pendukung secara optimal;</p> <p>f. Mengendalikan pusat kegiatan yang berkembang tidak sesuai dengan fungsi dan konsep perkotaan;</p> <p>g. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi pusat kegiatan baru yang mendukung pengembangan Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula; dan</p> <p>h. Mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan dan distribusi penduduk melalui penyediaan kebutuhan lahan pengembangan pembangunan melalui manajemen lahan yang sesuai.</p>

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

No.	Kebijakan	Strategi
2	<p>Penetapan dan pengembangan pusat pertumbuhan kelautan yang terintegrasi dalam rangka mendukung daya saing kawasan sebagai pusat kegiatan ekonomi berskala internasional;</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan dan mengembangkan sentra kegiatan perikanan sebagai pusat bahan baku, pengumpul, pengolah, dan distribusi produk perikanan b. Meningkatkan peran Pelabuhan Perikanan untuk optimalisasi usaha perikanan tangkap; c. Meningkatkan peran Pelabuhan laut untuk optimalisasi distribusi produk perikanan; d. Mengembangkan dan mengefektifkan sentra industri dan jasa maritim; e. Mengembangkan industri pengolahan ikan dalam rangka hilirisasi usaha perikanan tangkap dan budi daya; dan f. Menyediakan prasarana dan sarana pendukung kelautan dan perikanan, perdagangan dan jasa, serta industri dan pertanian.
3	<p>Peningkatan konektivitas antar Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya, serta dengan pusat pertumbuhan kelautan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan jaringan transportasi yang terintegrasi dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan dan Kawasan Hutan; b. Mengembangkan sistem transportasi yang terintegrasi dengan pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (Transit Oriented Development). c. Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang mengintegrasikan Kawasan Perkotaan Inti dengan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan; d. Mengembangkan sistem transportasi sungai yang menghubungkan antar Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya; e. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas serta jangkauan pelayanan jaringan transportasi perkotaan yang seimbang dan terpadu untuk menjamin aksesibilitas yang tinggi antara Kawasan Perkotaan Inti dengan

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

No.	Kebijakan	Strategi
		<p>Kawasan Perkotaan di Sekitarnya, dan pusat pertumbuhan kelautan;</p> <p>f. Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan transportasi laut yang terkoneksi dengan jaringan transportasi lainnya dalam mendorong konektivitas antarkawasan, distribusi barang dan jasa, pemerataan pertumbuhan, dan pengembangan ekonomi wilayah pesisir, dan mendukung kegiatan industri; dan</p> <p>g. Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan transportasi udara melalui pengembangan bandar udara.</p>
4	<p>Pengembangan sistem jaringan prasarana untuk meningkatkan keterkaitan dan fungsi antarkawasan di dalam Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula, serta antara Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula dengan wilayah di sekitarnya;</p>	<p>a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan sistem jaringan prasarana regional pada perkotaan inti dan perkotaan sekitarnya melalui sistem kerja sama antarkabupaten/kota;</p> <p>b. Mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan fasilitas umum berskala regional dan nasional dalam mendukung pelayanan perkotaan inti dan perkotaan sekitarnya;</p> <p>c. Mengembangkan dan meningkatkan sistem prasarana pendukung industri agro dan maritim untuk menjamin aksesibilitas kegiatan produksi, pengolahan, dan distribusi hasil kegiatan dari hulu ke hilir;</p> <p>d. Mengembangkan dan meningkatkan sistem prasarana pendukung industri pengolahan untuk peningkatan investasi di Kawasan Industri;</p> <p>e. Meningkatkan penyediaan sistem prasarana permukiman, terutama permukiman di sepanjang aliran sungai, dalam rangka peningkatan kualitas hidup Masyarakat dan lingkungan;</p> <p>f. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sistem jaringan energi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pengembangan energi alternatif;</p> <p>g. Meningkatkan kualitas sistem jaringan telekomunikasi yang mencapai seluruh</p>

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

No.	Kebijakan	Strategi
		<p>pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula;</p> <p>h. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya air melalui upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air;</p> <p>i. Mengembangkan dan mengatur jaringan transportasi laut termasuk Alur Pelayaran untuk mendukung konektivitas antara Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula dan wilayah sekitarnya; dan</p> <p>j. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana bawah laut.</p>
5	<p>Penetapan dan pemantapan fungsi lindung baik di darat maupun Perairan Pesisir dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan;</p>	<p>a. Menetapkan dan memantapkan Kawasan Lindung untuk perlindungan sumber air;</p> <p>b. Mencegah terjadinya alih fungsi lahan Kawasan Lindung dengan tetap mempertahankan fungsi lindungnya;</p> <p>c. Mengendalikan kegiatan budi daya yang berbatasan dengan Kawasan Lindung;</p> <p>d. Mengembalikan fungsi lindung bagi Kawasan Lindung yang mengalami alih fungsi dan merehabilitasi kerusakan fungsi lindung;</p> <p>e. Mengembangkan kegiatan Pariwisata berbasis ramah lingkungan;</p> <p>f. Melaksanakan mitigasi bencana alam dan perubahan iklim yang dapat mencegah dan menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan, banjir, longsor, abrasi, dan gelombang pasang;</p> <p>g. Menetapkan sempadan sungai untuk menjamin kelestarian sungai;</p> <p>h. Menetapkan dan mengatur kawasan sempadan pantai untuk mendukung pembangunan berkelanjutan;</p> <p>i. Mengalokasikan ruang, menetapkan, dan mengatur pemanfaatan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan laut;</p> <p>j. Meningkatkan pengawasan dan pemantauan kegiatan pemanfaatan</p>

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

No.	Kebijakan	Strategi
		<p>Kawasan Lindung termasuk kawasan konservasi di laut; dan</p> <p>k. Mengoptimalkan ruang perikanan secara seimbang dan berkelanjutan di kawasan konservasi.</p>
6	<p>Pengembangan, pemantapan, dan pengendalian fungsi budidaya dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan</p>	<p>a. Menetapkan lokasi dan arahan pemanfaatan kegiatan budi daya sesuai kriteria teknis dengan mempertimbangkan faktor fisik lingkungan, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan negara;</p> <p>b. Mengembangkan kegiatan budi daya secara terpadu, serasi, dan selaras sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;</p> <p>c. Menetapkan arahan penataan Kawasan Permukiman di sempadan sungai dalam rangka mewujudkan Kawasan Permukiman yang layak huni dan tetap memperhatikan kearifan lokal;</p> <p>d. Mempertahankan kawasan penyangga lingkungan dan mengembangkan sentra produksi pangan untuk mendukung keberlangsungan Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula;</p> <p>e. Mengembangkan dan mengelola prasarana waduk dan jaringan irigasi untuk mendukung pertanian;</p> <p>f. Mengoptimalkan alokasi Ruang darat, pesisir, dan laut untuk pengembangan usaha kegiatan dan hilirisasi perikanan;</p> <p>g. Mengembangkan konsep wanamina dan minapadi untuk optimalisasi produktivitas perikanan;</p> <p>h. Mengembangkan konsep agropolitan melalui penetapan keterkaitan fungsi kawasan penyedia lahan baku dan Kawasan Industri agro serta agrowisata;</p> <p>i. Mengembangkan dan mengatur ruang untuk kepelabuhanan, terminal untuk kepentingan sendiri, dan terminal khusus;</p>

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

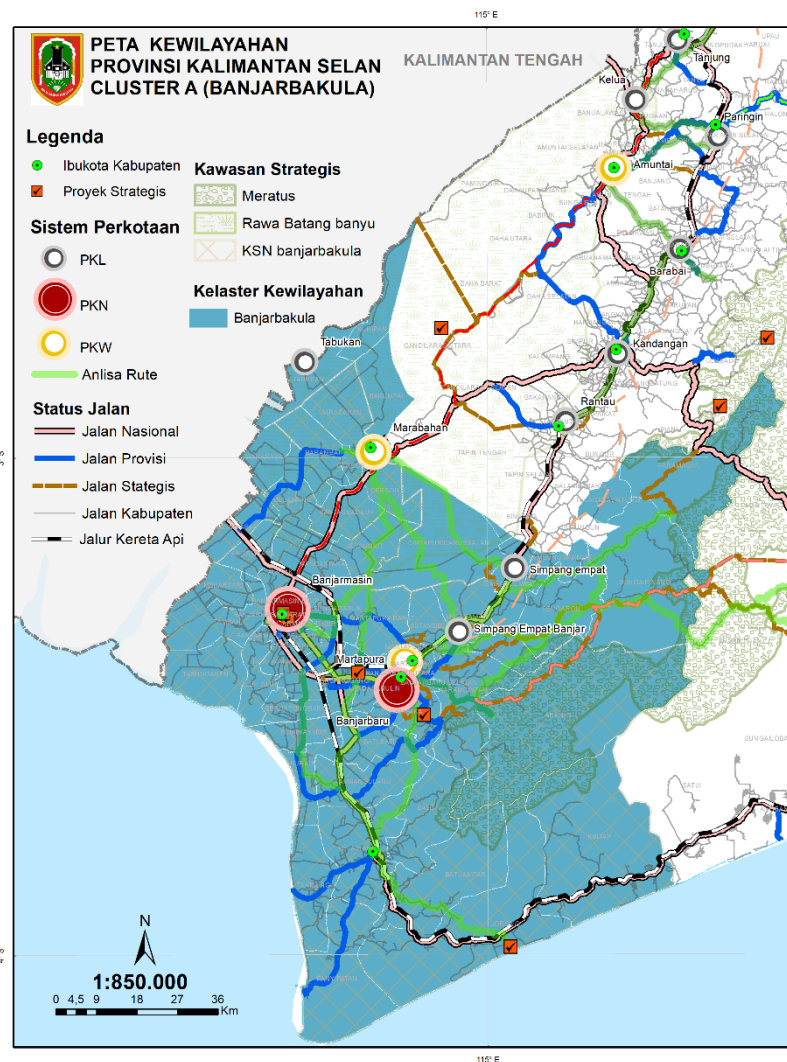
No.	Kebijakan	Strategi
		<ul style="list-style-type: none"> j. Meningkatkan fungsi Kawasan Hutan produksi untuk menjaga fungsi daerah tangkapan air; k. Mengatur dan mengendalikan kegiatan budi daya dari hulu ke hilir yang berpotensi menimbulkan dampak ke lingkungan; dan l. Memantapkan fungsi wilayah pertahanan dan keamanan negara.
7	<p>Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan keterpaduan perencanaan dan pembangunan antar sektor, antarkawasan, dan penguatan peran masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi, fasilitasi kerja sama, dan kemitraan dalam penyelarasan perencanaan, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pembangunan Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula; b. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi pembangunan antarsektor, serta antara Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota; c. Meningkatkan penguatan peran Masyarakat dalam proses perencanaan, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang perkotaan; dan d. Melindungi dan menjamin akses ruang untuk masyarakat lokal dalam pengusahaan kegiatan ekonomi.

Sumber: Perpres No. 85 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut

Pembagian klaster yang telah dilakukan, salah satunya bertujuan untuk mengakomodir sebagian wilayah Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala yang tidak masuk ke dalam Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula. Hal ini dilakukan agar pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh bagian wilayah.

Zona Banjarbakula yang merupakan pusat perdagangan dan jasa, dimana wilayah inti adalah Banjarbaru dan Banjarmasin, sedangkan kawasan penyangga terdiri dari Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut.

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



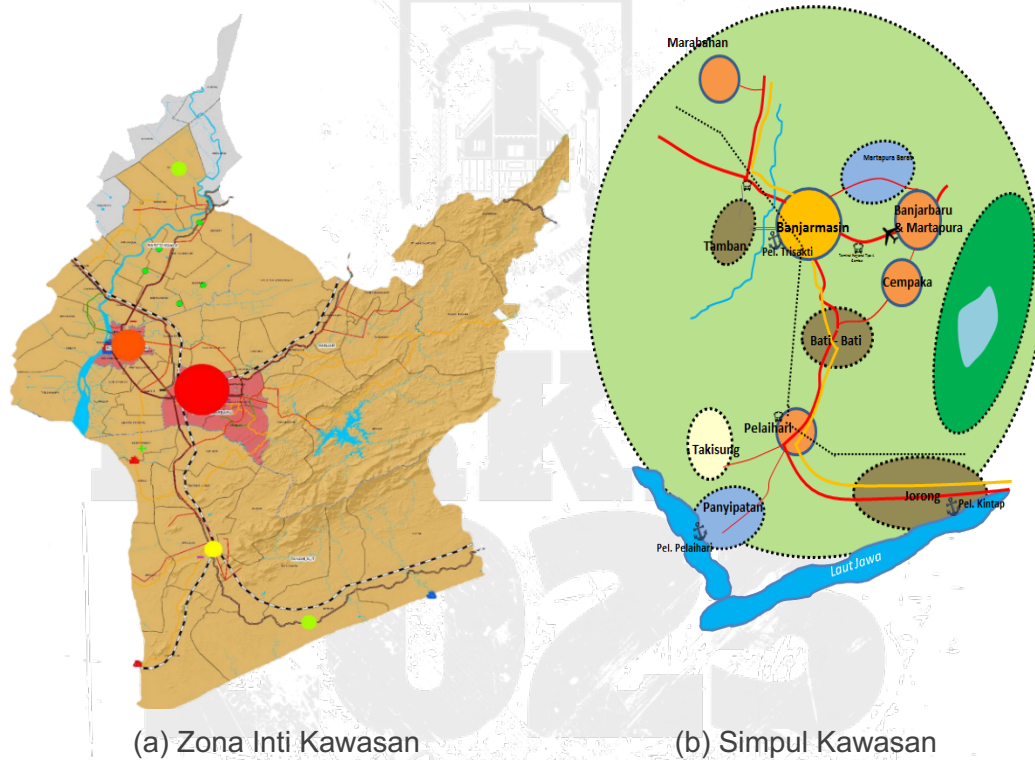
Gambar 5.1 *Peta Kelaster A - Banjarbakula*

Kota Banjarmasin yang dijadikan sebagai pusat perbankan, perdagangan dan jasa, pusat pendidikan tinggi, pusat kesehatan, wisata budaya (pasar terapung) dan Kawasan Industri Mantuil yang simpul konektivitasnya pelabuhan Trisakti. Kota Banjarbaru yang merupakan ibu kota provinsi merupakan wilayah pusat pemerintahan, pusat perdagangandan jasa, perhotelan, persampahan, Ekowisata & Wisata Geopark, Aero City, Sport City, dan sebagai pintu gerbang Kalimantan Selatan melalui Bandara Internasional Syamsuddin Noor.

Kawasan penyangga Banjarbakula, Kabupaten Barito Kuala diperuntukan sebagai pusat kegiatan pertanian dan perkebunan, kawasan pendukung ketahanan pangan kabupaten ini merupakan kawasan produksi beras terbesar di Kalimantan Selatan, dan juga pusat pendidikan tinggi untuk wilayah (*hinterland*) wilayah Barito Kuala di sekitar kawasan inti. Kabupaten Banjar dengan potensi

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

kawasan produksi beras terbesar kedua di Kalimantan Selatan yang pusat kegiatan pertanian dan perikanan dan juga ekowisata dan wisata geopark. Kabupaten Tanah Laut sebagai pusat pertanian, perikanan, peternakan, agribisnis, dan Kawasan Industri Jorong yang didukung simpul konektivitas Pelabuhan Swarangan.

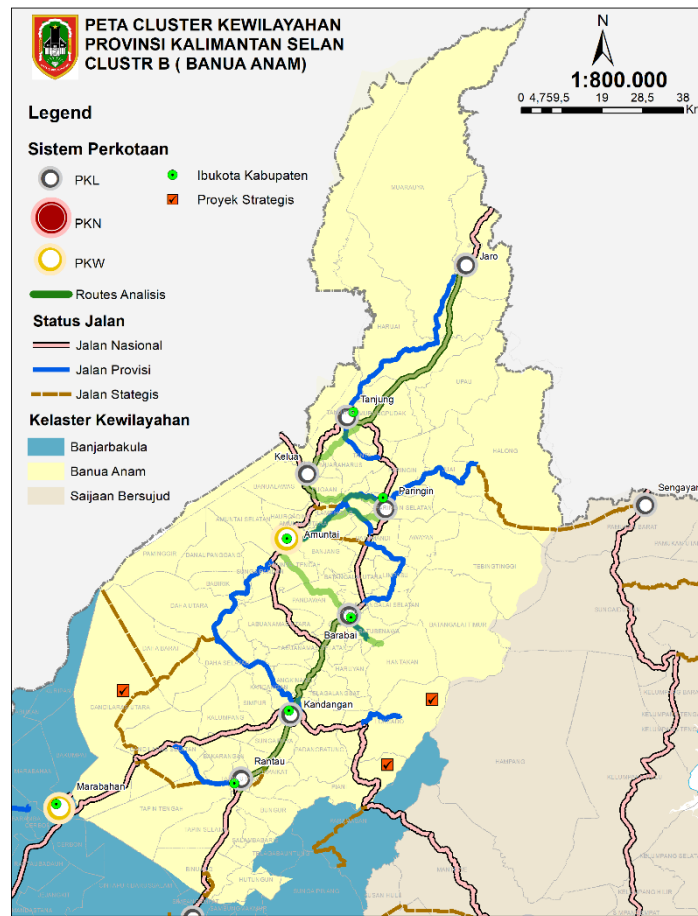


Gambar 5.2 Peta Pengembangan Kewilayahan Zona Banjarbakula

B. Arah Kebijakan Banua Anam

Wilayah Banua Anam merupakan wilayah ketahanan pangan dan kerajinan dengan potensi perkebunan terutama sayuran dan buah-buahan yang dapat menopang wilayah Banjarbakula dan Ibukota Nusantara, potensi perikanan air tawar yang besar yang perlu dikembangkan ke dalam ikan kemasan dan albumin ikan gabus agar mampu bersaing masuk ke pasar Ibu Kota Nusantara dan masuk ke pasar internasional. Industri perkebunan karet yang dihasilkan wilayah ini diharapkan mampu menyediakan kebutuhan di zona industri Batulicin dan Kotabaru, untuk itu perlu adanya jalur konektivitas yang menghubungkan wilayah gerbang ibukota seperti Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan memiliki jalur distribusi ke wilayah industri dan pesisir.

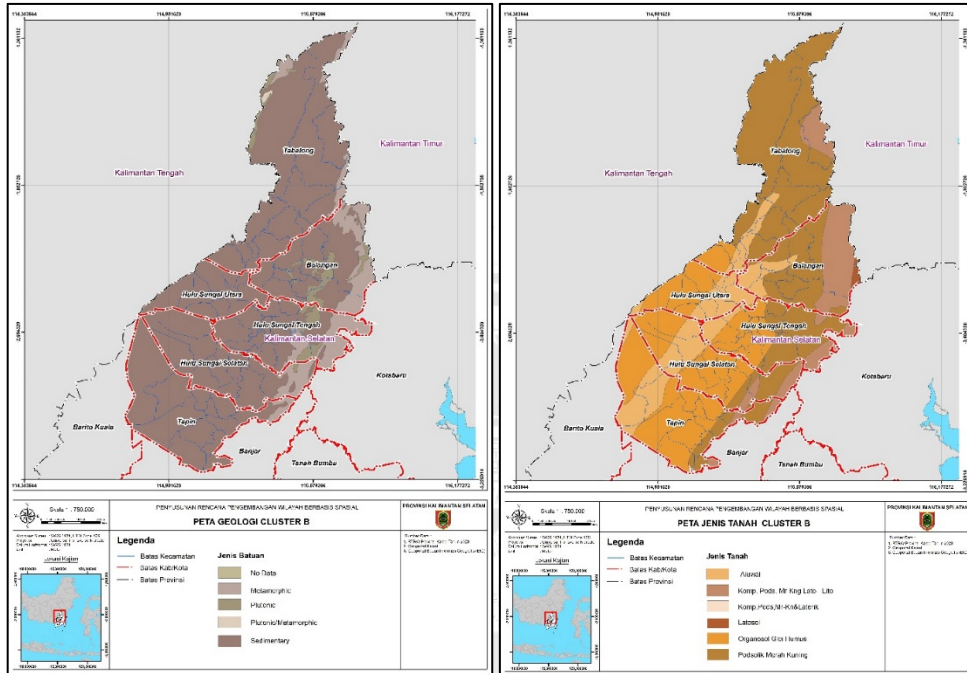
PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



Gambar 5.3 Peta Klaster B - Wilayah Banua Anam

Berdasarkan kondisi Geologi di cluster ini adalah, bahwa daerah ini sebagian besar merupakan daerah subur dan sangat cocok untuk kegiatan bercocok tanam (pertanian dan perkebunan). Pada cluster ini memiliki potensi kekayaan sumberdaya mineral sehingga bisa dijadikan wilayah eksplorasi seperti untuk penggalian.

PERUBAHAN RKPD 2026 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



Gambar 5.4 Peta Geologi dan Jenis Tanah Cluster Banua Anam

Berdasarkan jenis tanah pada cluster ini didominasi tanah yang sangat lembab, rawa-rawa atau selalu tergenang air. Tanah jenis ini juga subur cocok untuk pertanian, namun masih dapat untuk didirikan bangunan di atasnya. Potensi yang menjadi sektor basis di Kawasan. Kawasan Klaster Banua Anam untuk mendukung Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Gerbang Logistik dengan potensi wilayah Pertanian (padi, Hortikultura), Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan tangkap dan budidaya (darat), Tambang (batubara, kapur, migas, dsb).

Kawasan Klaster Banua Anam merupakan perwujudan swasembada sektor pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan yang memperhatikan ketahanan iklim. Rencana pengembangan berdasarkan prioritas dan menjadi sektor unggulan pada Klaster Banua Anam yaitu :

1. Pusat Produksi

- Pabrik Karet di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- Kawasan Industri dan rencana KPI Seradang Kabupaten Tabalong
- hilirisasi industri tambang (bahan bangunan - semen)
- Kawasan Industri Tapin (TIPE) di Kabupaten Tapin (industry agro)

2. Pusat Distribusi:

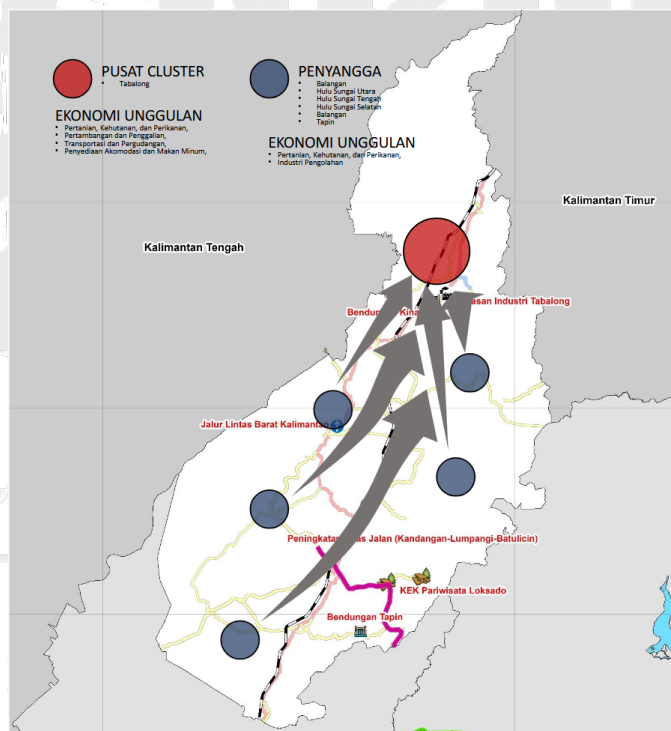
- Kabupaten Tapin di Pelabuhan Margasari;

PERUBAHAN RKPD 2026 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Terminal Induk dan Cargo, Terminal Pasar kramat;
- Kabupaten Tabalong di Terminal Barang Murung Pudak dan Kelua, Penumpang tipe A, Bandara Udara Krambitan;
- Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Terminal Penumpang Kandangan;
- Kabupaten Hulu Sungai Utara di Terminal Banua Lima, dan
- Kabupaten Balangan di Terminal Barang Pasar Batu Mandi dan Haur Batu.

3. Pariwisata

- Pegunungan meratus
- Loksado
- Wisata alam lainnya
- Sentra kerajinan dan kuliner



Gambar 5.5 Peta Arahan Pusat Kegiatan, Potensi dan Distribusi Klaster Banua Anam

Sumber : *Anlisa Kajian Kewilayahan, 2024*

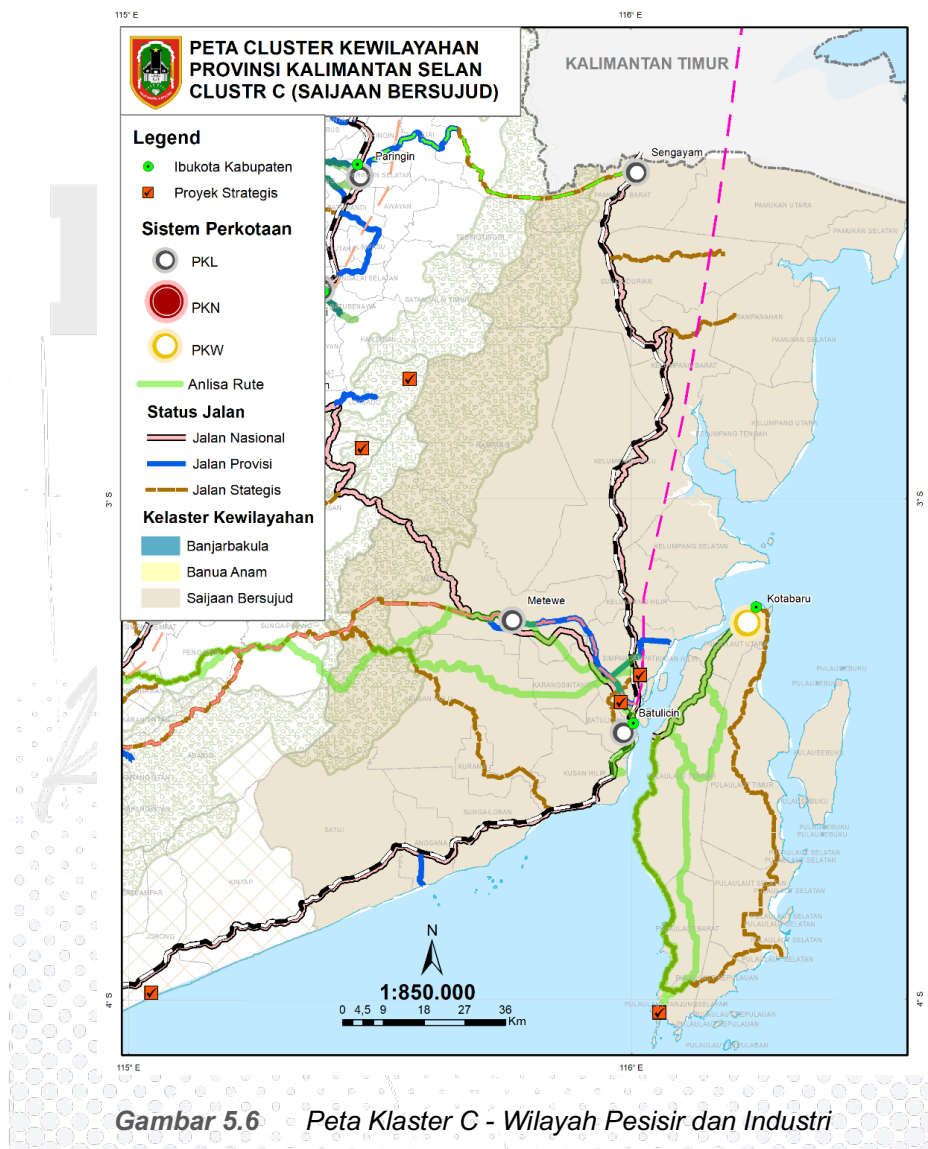
Untuk mewujudkan transformasi ekonomi sebagai misi yang tercantum dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan, maka pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, berkelanjutan, dan beradaptasi dengan perubahan iklim untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan

PERUBAHAN RKPD 2026 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

cadangan pangan, menjaga produktivitas pertanian dan perkebunan, serta peningkatan kesejahteraan petani di Klaster Banua Anam.

C. Arah Kebijakan Wilayah Saijaan Berujud

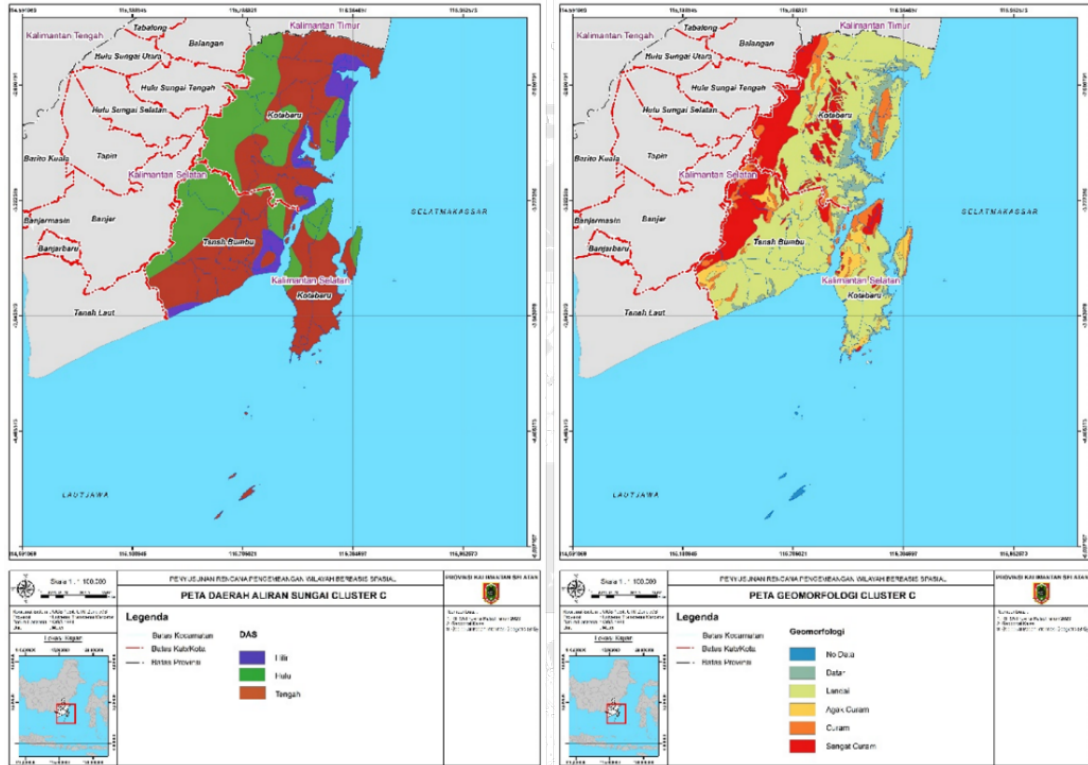
Wilayah industri dan pesisir merupakan kawasan hilirisasi hasil tambang dan perkebunan, pusat pengembangan perikanan air laut, geosite dan wisata pantai dan laut. Wilayah ini dengan potensi pelabuhan internasional dan laut dalam setara berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II) potensi ini, diharapkan menjadikan wilayah ini penyedia bahan baku industri besar dan menengah.



Dengan potensi mangrove dan terumbu karang serta ikan laut yang kaya diharapkan menjadi wilayah perikanan terpadu yang terkoneksi dengan wisata pesisir dan pulau-pulau kecil. Agar dapat menjadikan potensi alam berkelanjutan

PERUBAHAN RKPD 2026 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

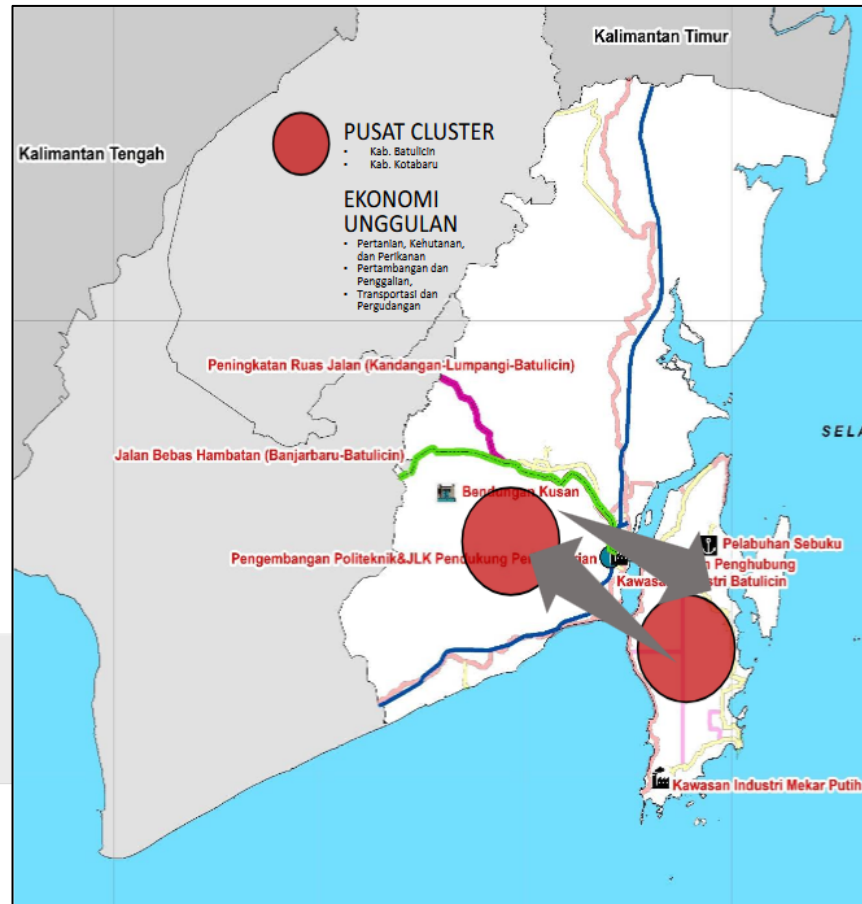
dan ramah lingkungan. Peningkatan dan pelestarian mangrove merupakan kegiatan strategis dalam pencegahan erosi dan pengrusakan pantai agar dapat menjaga ekosistem air dan perikanan di pesisir.



Gambar 5.7 Peta DAS dan Geomorfologi Wilayah Sajjaan Bersujud

Pada cluster ini memiliki daya dukung air kategori baik sehingga memiliki kemampuan tinggi dalam penyediaan sumber daya air yang dapat menjamin ketersediaan air baku untuk kebutuhan air minum. Berdasarkan kondisi geomorfologi yang relatif datar dan landai ini memberikan keuntungan dalam pengembangan infrastruktur di Cluster ini. Wilayah Kalimantan Selatan yang banyak dialiri sungai ini menjadikan potensi besar terhadap pengembangan pertanian, pariwisata, dan perdagangan.

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



Gambar 5.8 Peta Arahon Pusat Kegiatan, Potensi dan Distribusi Klaster Saijaan Bersujud

Berdasarkan hasil analisa potensi wilayah, maka pusat Klaster ini berada di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru dengan ekonomi unggulan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, pengembangan hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi, serta berorientasi ekspor.

Rencana pengembangan berdasarkan prioritas dan menjadi sektor unggulan pada Klaster Saijaan Bersujud yaitu:

1. Pusat Produksi

- Kawasan Industri Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu : industry agro
- KEK Setangga : Industri Hilirisasi Sawit (Biodiesel, Refinery Minyak Goreng, kimia), Smelter, besi.
- KI Sebuku : hilirisasi industry logam (besi baja, baterai, kimia, dsb)

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

- Rencana KEK Mekar Putih : hilirisasi hasil tambang Batubara, pasir kwarsa (syngas, pupuk, kimia, baterai, besi baja, plastik, kaca, bahan bangunan, dsb), hilirisasi perkebunan (CPO, olahan makanan, pupuk, kimia, dsb),
- KI Tarjun → hilirisasi industri perikanan (pengalengan, olahan hasil laut, cold storage, pabrik es batu, dsb).

2. Pusat Distribusi

- Kabupaten Tanah Bumbu : Pelabuhan KEK Setangga, Pelabuhan Batulicin, Pelabuhan Satui, Bandara Bersujud, Terminal Barang Angsana, Terminal Kersik Putih.
- Kabupaten Kotabaru : Pelabuhan Kotabaru, Pelabuhan Stagen, Pelabuhan Sebuku, Pelabuhan Mekarputih, Bandara Gusti Syamsir Alam, pengembangan terminal penumpang di Sengayam.

3. Sektor Pariwisata

- Wisata Alam yaitu : Pulau Sumber Gelap, Pantai Teluk Tamiang, Pulau Tanjung Kunyit, Pulau Denauan, Pulau Pemalihan, Pulau Birah-Birahan, Pantai Gedambaan (SarangTiung), Pantai Teluk Gosong, Goa Temuluang, Bukit Mamake, Bukit Bapake, Hutan Meranti, Air Terjun Tumpang Dua dan wisata alam lainnya.

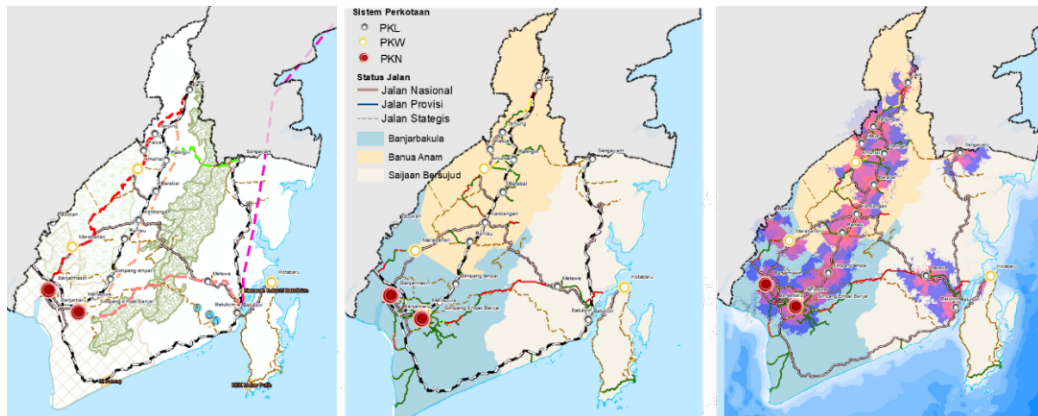
4.5.1 Analisa Layanan Kawasan

Cakupan layanan kawasan merupakan analisa ketersediaan akses dan fasilitas pendukung konektivitas, analisa ini membantu menggambarkan pusat-pusat produksi terhadap kemampuan distribusinya. Selain itu juga dapat menggambarkan seberapa mudah masyarakat dapat mengakses layanan, dan dapat mengevaluasi kesenjangan layanan antar kawasan;

A. Cakupan Layanan Sistem perkotaan

- Sistem Perkotaan yang memiliki konektifitas yang baik tentunya akan dapat memudahkan distribusi barang dan jasa, selain itu setiap perkotaan memiliki potensi yang berbeda-beda, perbeaan ini akan menjadi saling melengkapi dengan konektifitas yang mantap.

PERUBAHAN RKPD 2026 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

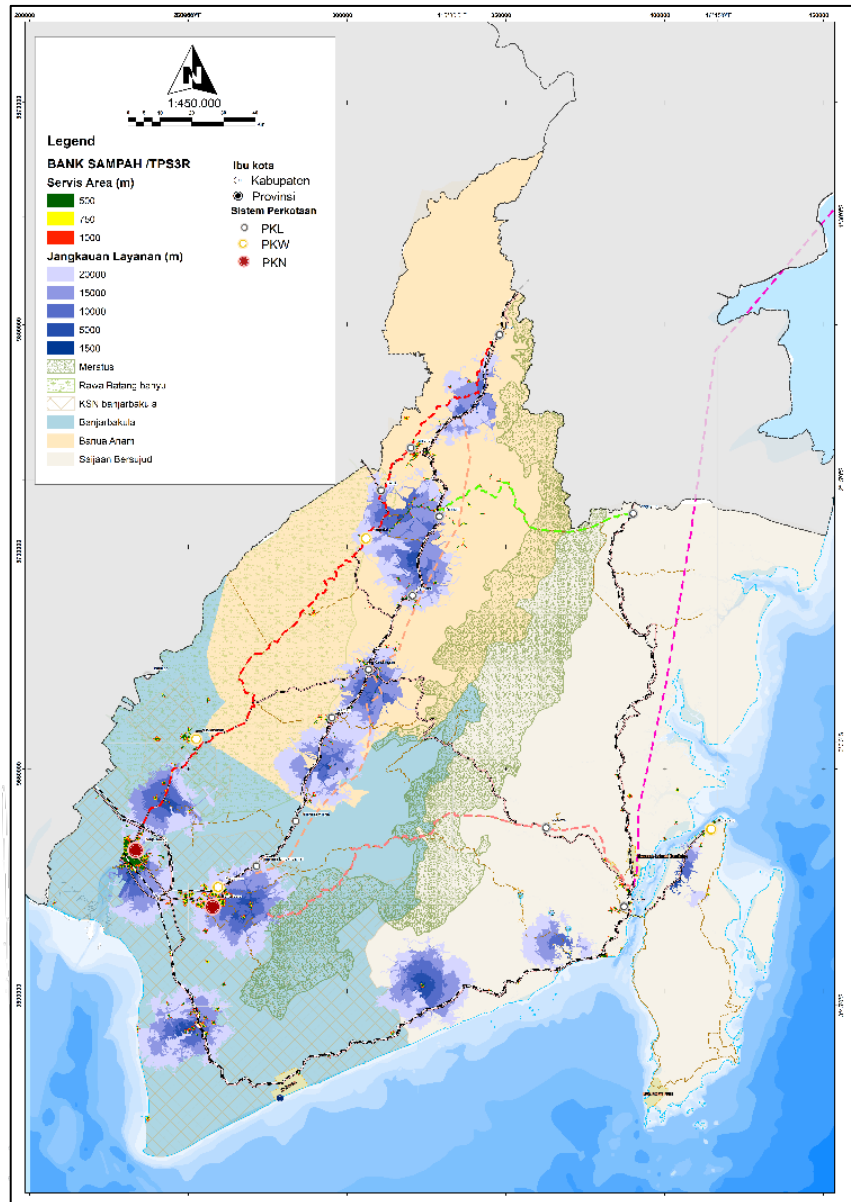


Gambar 5.9 Peta Sistem Perkotaan

B. Cakupan Layanan Fasilitas Persampahan

Sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh pihak, mulai dari individu, komunitas, hingga pemerintah dan sektor swasta. Dengan menerapkan prinsip dan praktik ini, kita dapat menciptakan sistem manajemen persampahan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, sehingga dapat menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



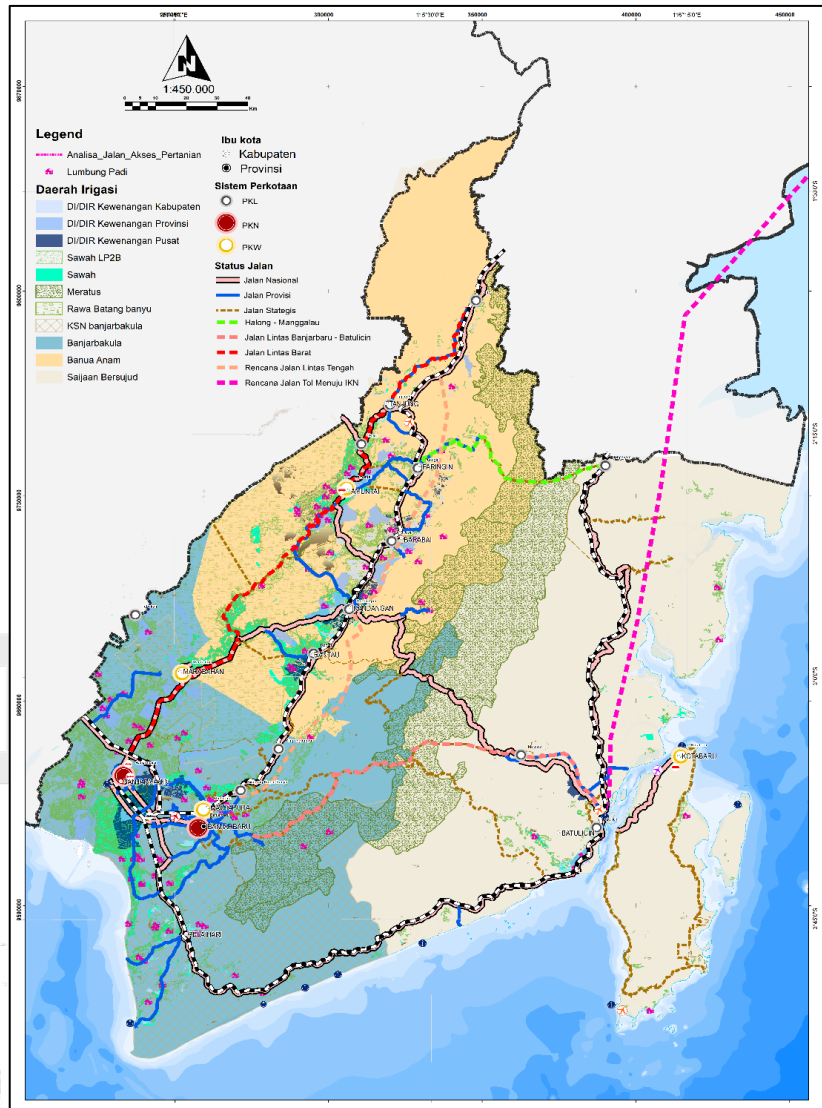
Gambar 5.10 Peta Cakupan Layanan Fasilitas Persampahan

Sumber : Analisa Data Persampahan dari SICIKI PUPR Prov.Kalsel dengan model Network Analyst

C. Cakupan Layanan Irigasi Pertanian

Pengembangan daerah irigasi sudah bersesuaian dengan areal persawahan yang berada di kawasan pengembangan pertanian pangan.

PERUBAHAN RKPD 2026 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

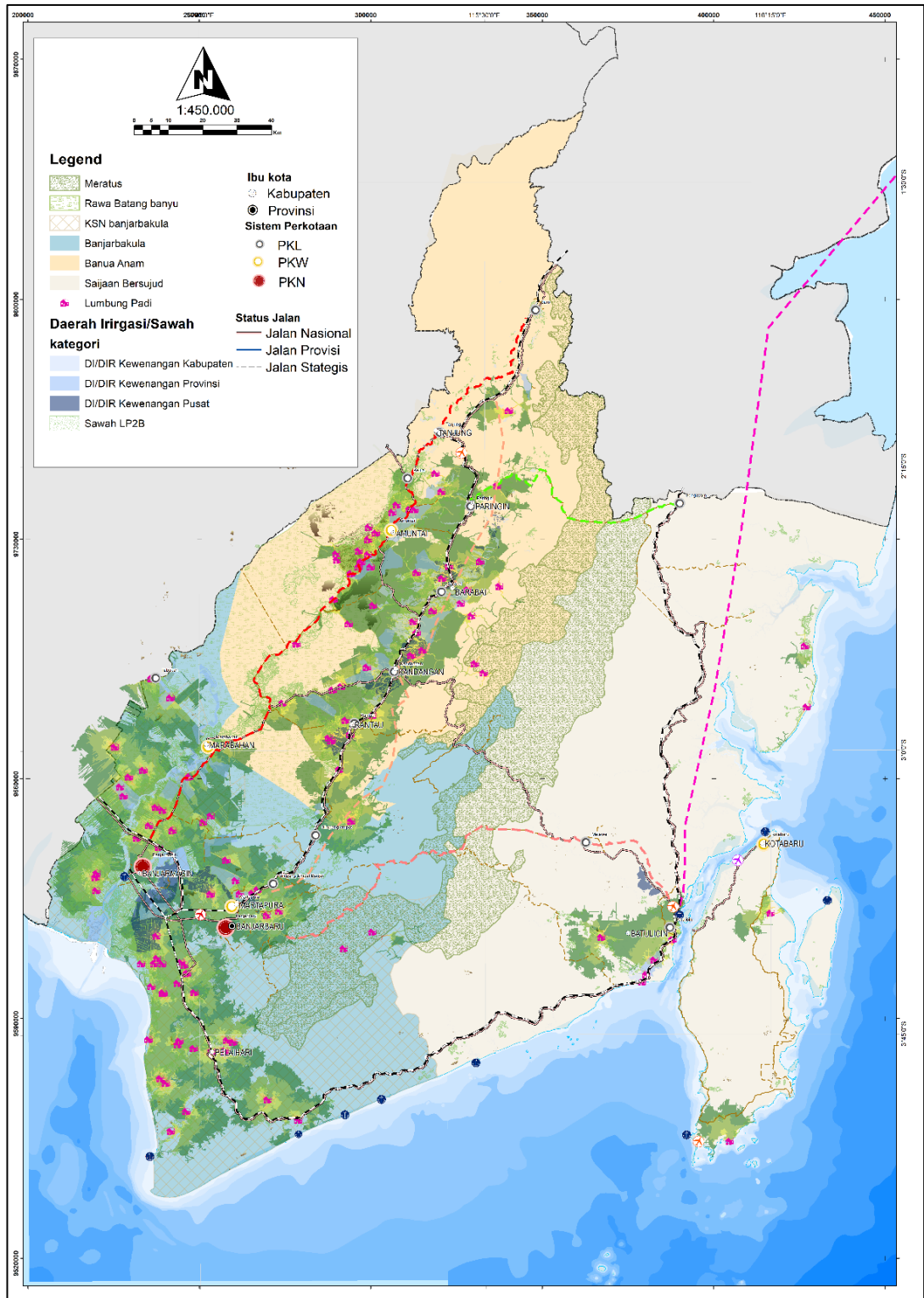


Gambar 5. 1 Peta Daerah Irigasi

Sumber : Peta Daerah Irigasi, LBS 2021 DPKP Prov.Kalsel

Cakupan layanan lumbung pangan dengan daerah irigasi dan sawah menunjukkan secara akses cukup baik, hanya beberapa lokasi lumbung pangan yang memiliki jangkauan layanan yang terisolir, ini dikarenakan berada pada zona pegunungan meratus. Dari segi kawasan rawa batang banyu yang diperuntukan untuk pertanian dan perkebunan secara sistem layanan memadai, namun masih perlu di tingkatkan untuk mencover wilayah pertanian yang dekat dengan perbatasan Kalimantan Tengah, selain itu peningkatan kualitas jaringan jalan untuk melayani angkutan pangan menu Kelaster Kawasan Sajaan Bersujud.

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



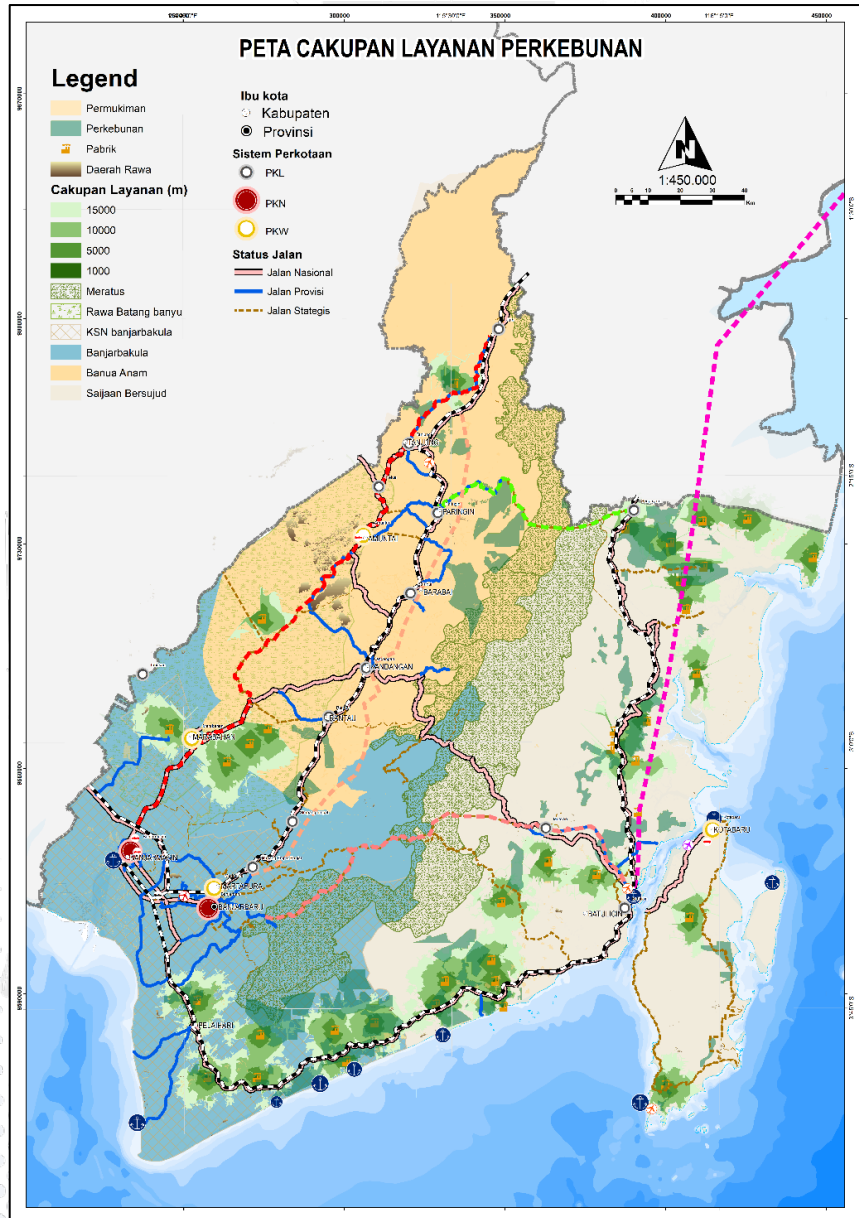
Gambar 5.11 Peta Cakupan Layanan Lumbung Padi

Sumber : Anlisa Daerah Irigasi, LBS 2021 DPKP dan Lumbung Padi dengan model Network Analyst

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

D. Cakupan Layanan Perkebunan

Road Network Service Area pabrik terhadap Kawasan Perkebunan menggambarkan kemadirian kawasan perkebunan, hasil perkebunan yang diolah lebih awal di dalam pabrik, ini menggambarkan distribusi bahan mentah yang minimal, sehingga mengurangi beban jalan.



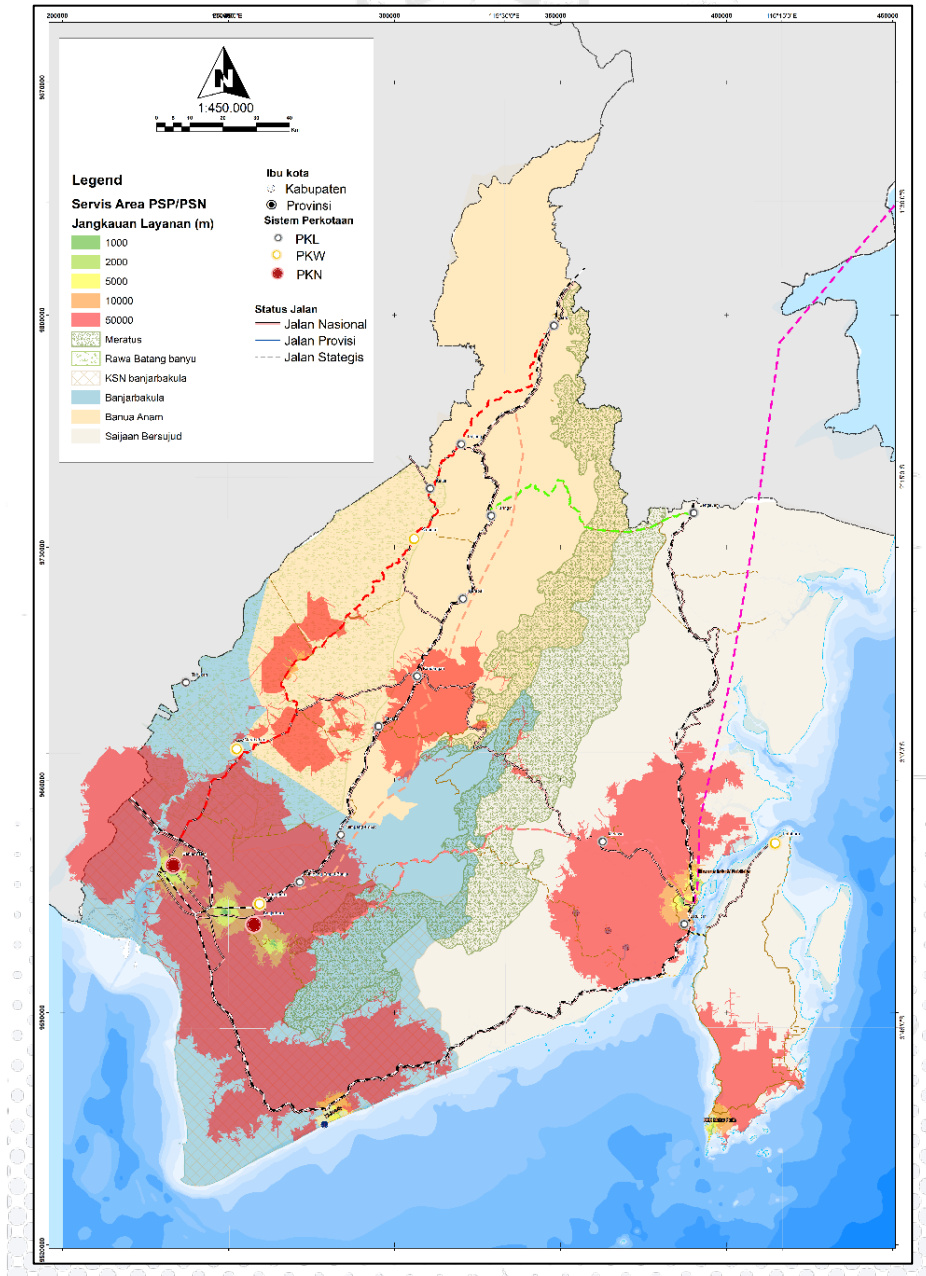
Gambar 5.12 Cakupan Layanan Pabrik Perkebunan

Sumber : Anlisa Sebaran Pabrik dengan Daerah Perkebunana dengan model Network Analyst

PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

E. Cakupan Layanan PSP/PSN

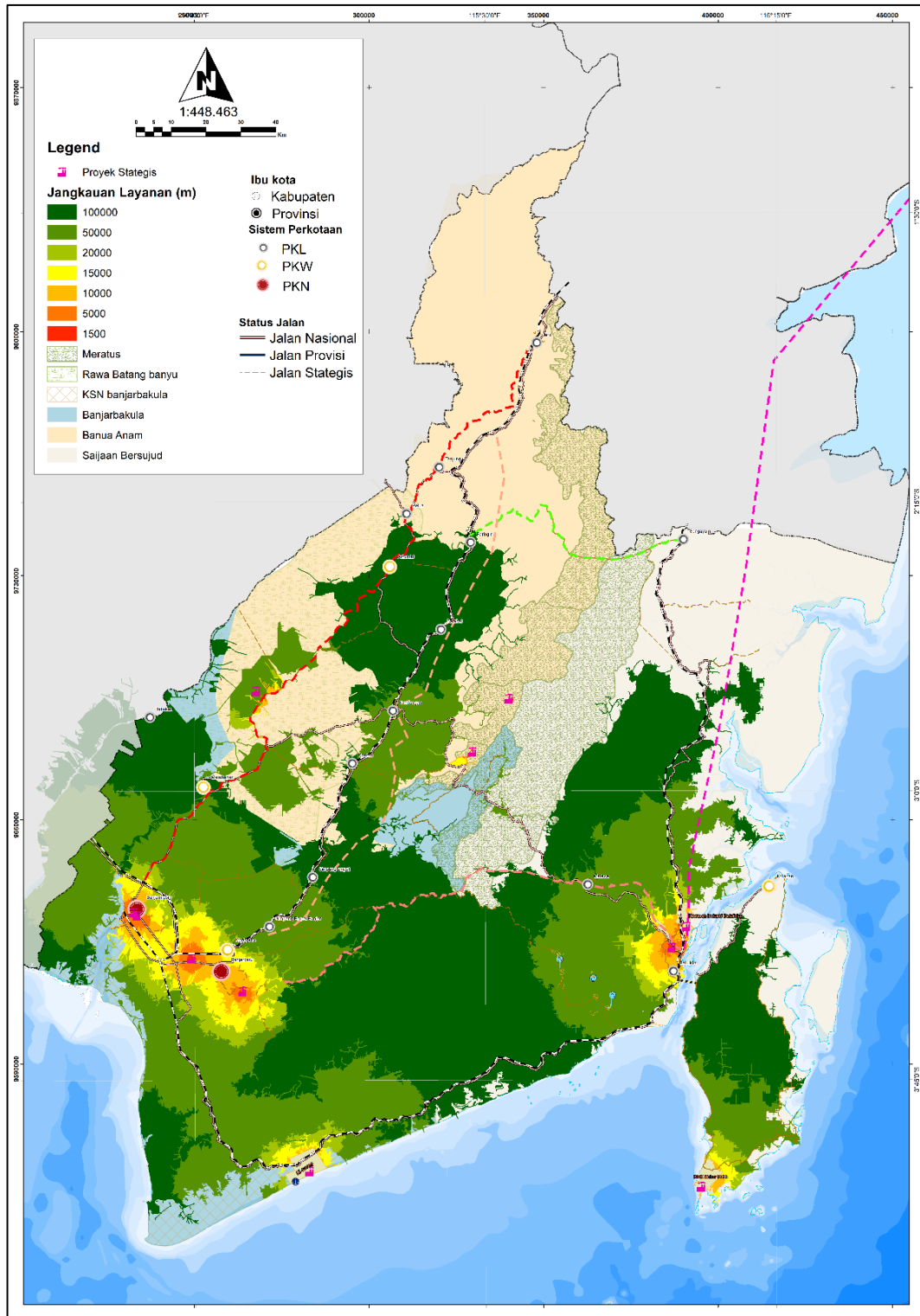
Cakupan layanan proyek strategis secara umum memiliki korelasi layanan konektifitas yang cukup, namun memang beberapa lokasi memiliki keterbatasan akses seperti Bendungan Tapin yang memiliki jangkauan layanan kecil, ini dikarenakan jaringan jalan yang terbatas sehingga nilai yang dikeluarkan *Network Analyst Service Area* menjadi kecil.



Gambar 5.13 Analisa Layanan Kawasan Proyek Strategis

Sumber : Anlisa Sebaran Proyek Strategis dengan model Network Analyst

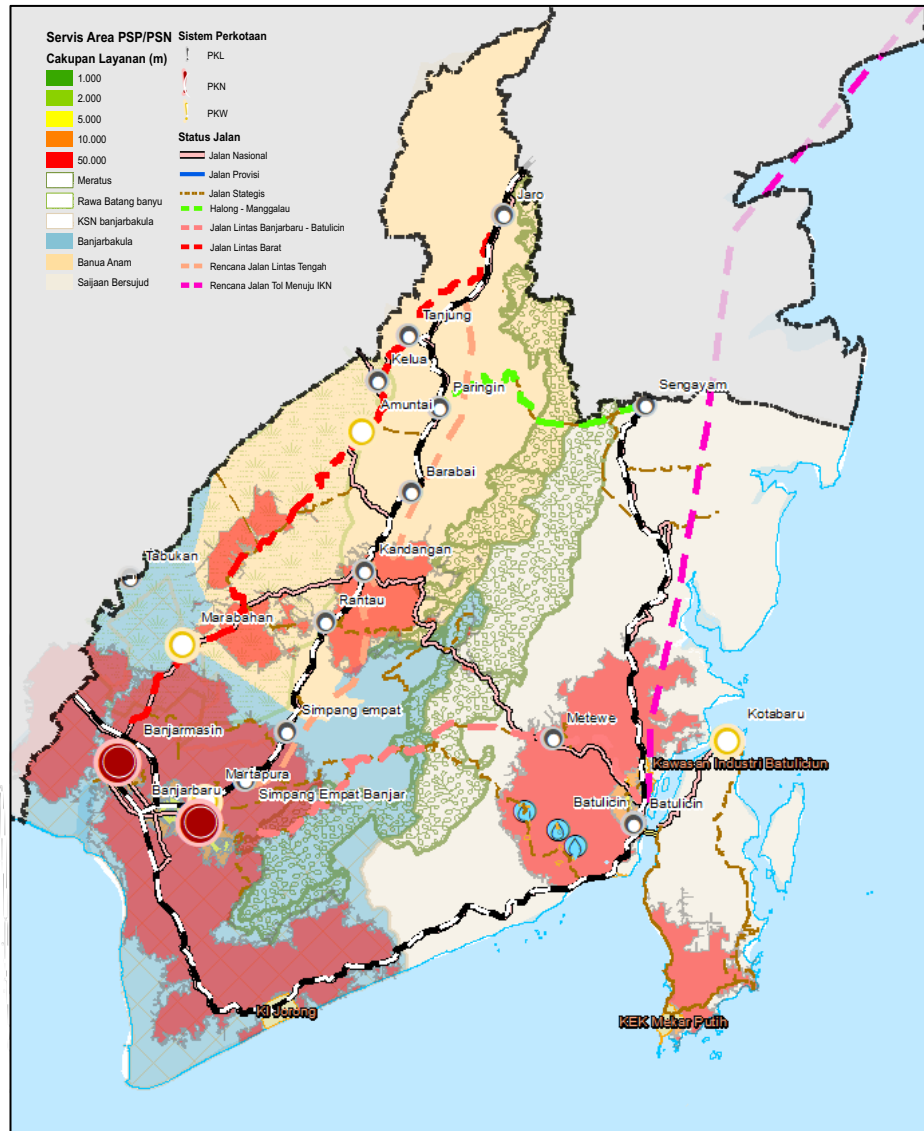
**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



Gambar 5.14 Analisa Layanan Kawasan Proyek Strategis Dalam Sekala 100 Km

Sumber : Anlisa Sebaran Proyek Strategis dengan Jangkauan Layanan 100Km dengan model Network Analyst

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



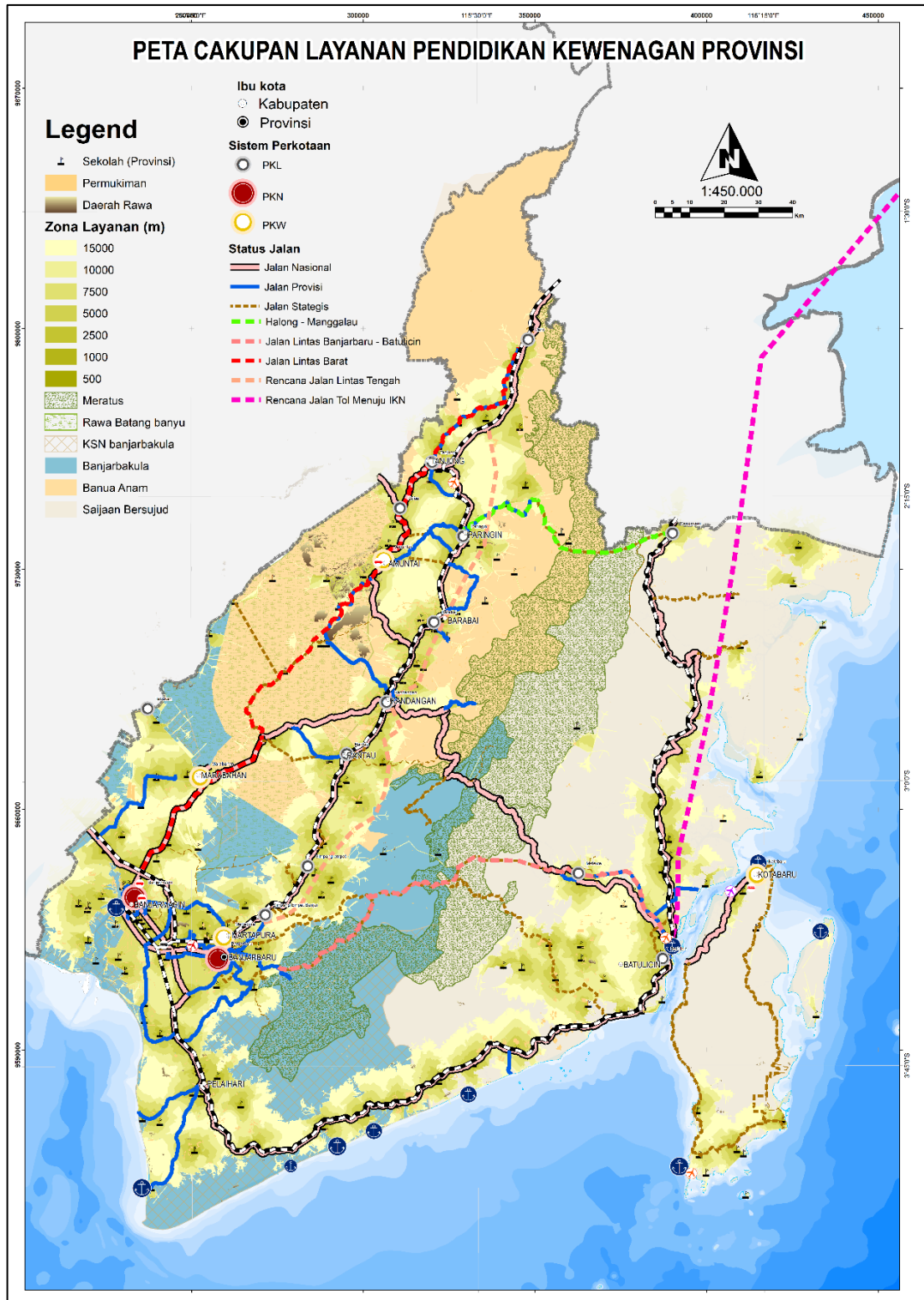
Gambar 5.15 Road Network Analisis Proyek Strategis

Sumber : Anlisa Sebaran Proyek Strategis model Network Analyst- Service Area

F. Cakupan Layanan Pendidikan

Cakupan Layanan Pendidikan yang di analisa berdasarkan *Road Network Service Area* menggambarkan beberapa seolah yang berada pada wilayah di sekitaran sisi pegunungan meratus secara akses tersedia hanya luas cover area nya saja yang kecil ini dikarenakan Kawasan permukiman yang kecil serta jaringan jalan yang tidak banyak. Secara umum cakupan layanan pendidikan kewenangan pemerintah provinsi dinilai cukup menyebar disemua kabupaten.

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



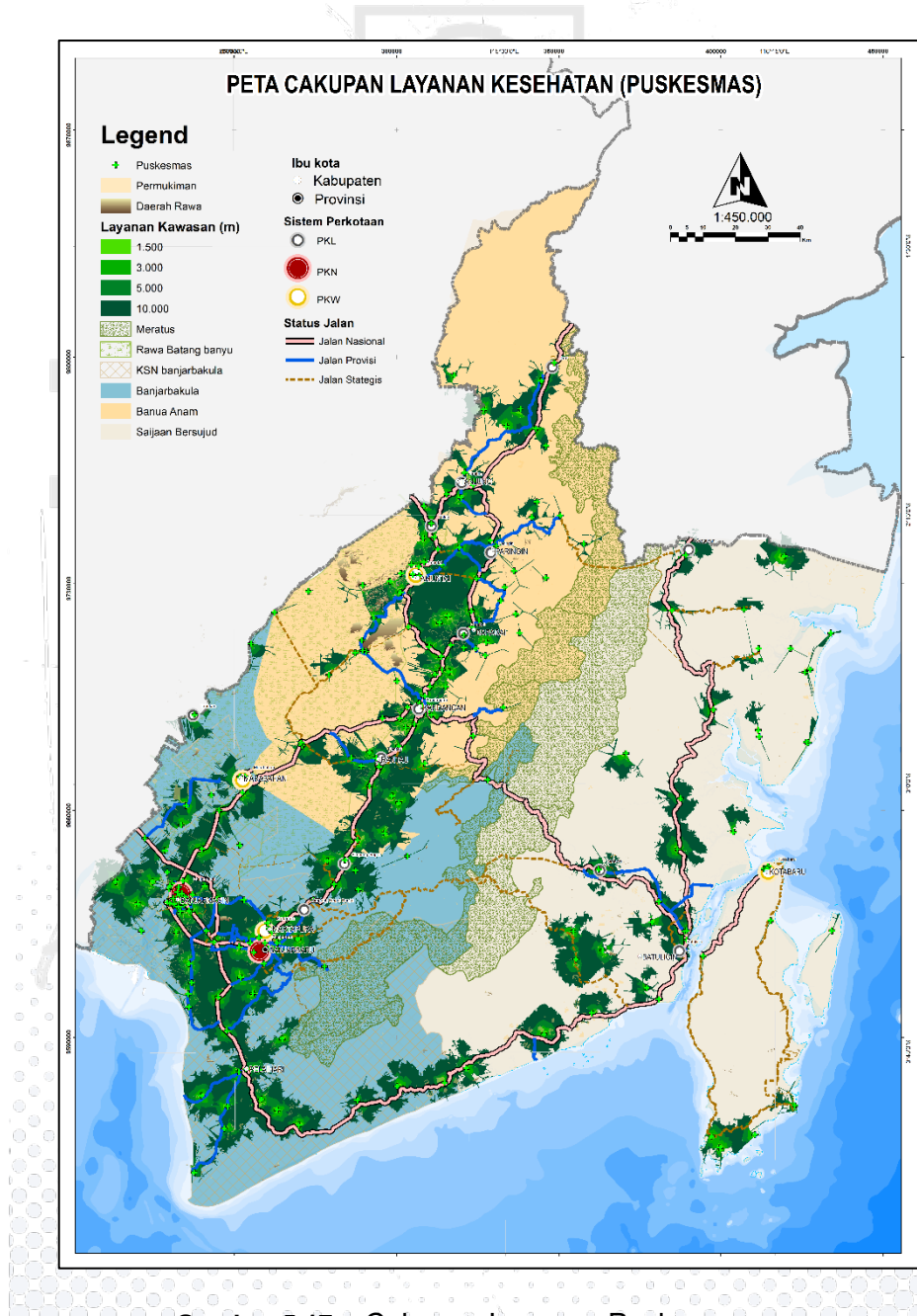
Gambar 5.16 Peta Jangkauan Layanan Pendidikan

Sumber : Peta Sebaran Sekolah (SMA/SMK/SLB) DISDIK Prov.Kalsel dianalisa dengan model Network Analyst

PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

G. Cakupan Layanan Kesehatan

Pusat Layanan Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) yang di tinjau dari segi sebaran lokasi puskesmas ditemukan jangkauan layanan puskesmas tidak melebar pada daerah tertentu, akan tetapi ditemukan pada daerah kotabaru di pulau Kalimantan, terdapat layanan puskesmas yang cukup luas.

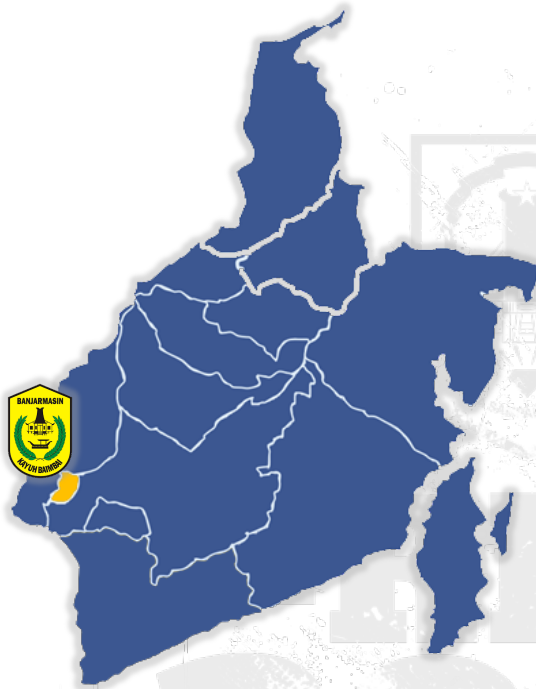


Gambar 5.17 Cakupan Layanan Puskesmas

Sumber : Peta Sebaran Puskesmas dari DINKES Prov.Kalsel dianalisa dengan model Network Analyst

4.6 ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA

4.6.1 Kota Banjarmasin



Potensi Ekonomi :

1. Pusat perdagangan dan jasa
2. KI Mantuil
3. Metropolitan Banjarbakula
4. Pengembangan UNESCO Global Geopark pada situs rute barat (pasar terapung, kampung sasairangan, dll)
5. wisata religi dan budaya
6. Kota pendidikan (ULM, Uniska, UIN, dll)
7. Pusat pelayanan kesehatan (RSUD terpadu seperti jantung)
8. Pusat distribusi dan pengembangan pusat logistik melalui Pelabuhan Trisakti

Tenaga Kerja :

(Prioritas) Capaian TPT **DI ATAS**

dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan TPT **LEBIH TINGGI** dari capaian provinsi

1. peningkatan produktifitas & kualitas tenaga kerja, kesempatan kerja, dan link and match dunia usaha dan pendidikan
2. peningkatan wisausaha
3. pelatihan tenaga kerja, UMKM, dan IKM.

Pemerataan :

(Prioritas) Capaian indeks gini **DI ATAS** dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan indeks gini **LEBIH RENDAH** dari capaian provinsi kesempatan kerja pada sektor unggulan daerah dan peningkatan pendidikan untuk masyarakat menengah kebawah & miskin.

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kota Banjarmasin tahun 2026, antara lain:

A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. Program-program penanggulangan kemiskinan
2. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

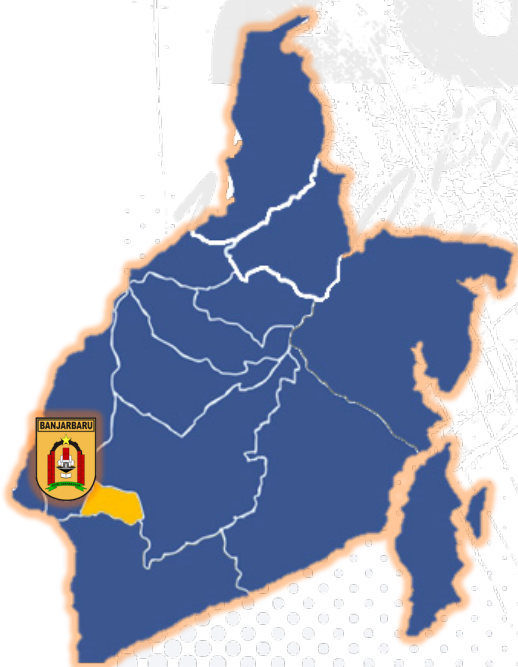
B. Aspek Pembangunan Ekonomi

1. Sebagai Kota yang berfokus pada kegiatan penduduknya (Program kegiatan diarahkan ke penataan permukiman, sarana dan prasarana transportasi, perdagangan dan jasa dan pusat ekonomi).
2. Pengembangan industri pengolahan.
3. Pengembangan dan pembinaan destinasi wisata;
4. Pemberdayaan masyarakat melalui koperasi UKM dan pembinaan wirausaha baru;
5. Dukungan terhadap pembangunan pusat distribusi regional dan pasar rakyat.

C. Aspek Pengembangan Infrastruktur

1. Pengembangan pasar induk dan pusat-pusat distribusi regional;
2. Pengembangan kawasan industri dan pelabuhan utama;
3. pemetaan komponen kerentanan dan kapasitas, penguatan instrumen peringatan dini bencana;
4. Penguatan konektivitas jalan dan pengembangan transportasi perkotaan yang terintegrasi dengan Transit Oriented Development (TOD)

4.6.2 Kota Banjarbaru



Potensi Ekonomi :

1. Ibu Kota Provinsi dan Pusat Pemerintahan Provinsi
2. Aero City
- 3.. Gerbang Logistik Udara
4. Kota pendidikan (ULM)
6. Pengembangan pariwisata UNESCO Global Geopark Meratus pad Situs Rute Barat dan Selatan
7. Pusat perdagangan dan jasa
8. Kota Event
9. Wisata buatan (amanah)
10. Kota event music

Tenaga Kerja :

(Perlu Perhatian) Capaian Persentase Penduduk Miskin **LEBIH BAIK** capaian provinsi dan Besar Perubahan Persentase

Penduduk Miskin **TIDAK BAIK DARI** dari capaian provinsi

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

peningkatan produktifitas & kualitas tenaga kerja, kesempatan kerja, dan link and match dunia usaha dan pendidikan 2. peningkatan wirausaha 3. pelatihan tenaga kerja, UMKM, dan IKM.

Pemerataan :

(Perlu Perhatian) Capaian indeks gini **DI ATAS** capaian provinsi dan Besar Perubahan indeks gini **TIDAK LEBIH BAIK DARI** dari capaian provinsi

kesempatan kerja pada sektor unggulan daerah dan peningkatan pendidikan untuk masyarakat menengah kebawah & miskin.

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kota Banjarbaru tahun 2026 antara lain:

A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. Pada bidang pendidikan dengan program/kegiatan pembangunan dan rehabilitasi SMK pendukung pariwisata dan penerbangan
2. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.
3. Pelayanan peringatan dini multi-ancaman bencana, dengan output penguatan instrumen peringatan dini bencana;
4. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan darurat.

B. Aspek Pembangunan Ekonomi

1. Pada bidang pariwisata dengan program/kegiatan pengembangan wisata budaya Banjar, pendulangan intan, wisata buatan dan pelaksanaan festival budaya.
2. Pada bidang koperasi, UMKM dengan pembinaan dan pelatihan menjadi wirausaha baru.

C. Aspek Pengembangan Infrastruktur

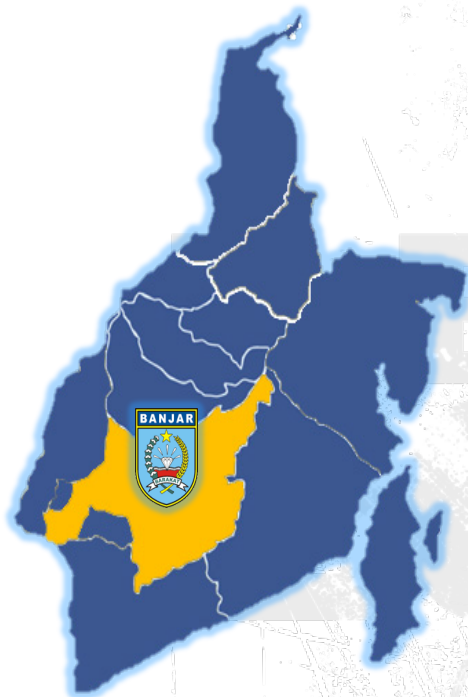
1. Sebagai bagian dari Metropolitan Banjarbakula dan ibukota provinsi, fungsi dari kota berfokus pada kegiatan permukiman, sarana dan prasarana, transportasi, perdagangan dan jasa dan perkantoran pemerintah.
2. Untuk bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan melanjutkan program/kegiatan SPAM regional dan TPA regional Banjarbakula.

4.6.3 Kabupaten Banjar

Potensi Ekonomi :

(Perlu Perhatian) capaian LPE **LEBIH RENDAH** dan Share Perekonomian **TIDAK LEBIH BAIK** dibanding capaian provinsi

1. kawasan penyangga ibu kota provinsi 2. Pengembangan pesantren modern 3. wisata halal 4. wisata religi (haul guru) 5. wisata geopark meratus, pendulangan intan, pasar terapung lok baintan, aranio, kiram, dll 5. pengembangan pertanian dan perikanan 6. metropolitan banjarkakula



Tenaga Kerja :

1. peningkatan produktifitas & Kualitas tenaga kerja, kesempatan kerja, dan link and match dunia usaha dan pendidikan 2. peningkatan tenaga pendidik di pesantren/OPOP 3. pelatihan tenaga kerja, UMKM, dan IKM

Pemerataan :

kesempatan kerja pada sektor unggulan daerah dan peningkatan pendidikan untuk masyarakat menengah kebawah/miskin

Arah kebijakan provinsi untuk perencanaan pembangunan provinsi pada Kabupaten Banjar tahun 2026, antara lain:

A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. Pada bidang pendidikan dengan program/kegiatan pendidikan vokasi/SMK pariwisata; dan program kejar paket B-C.
2. Pada bidang pemberdayaan masyarakat desa dengan program/kegiatan pembangunan masyarakat desa; dan pemberdayaan kelompok tani.
3. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.
4. Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa.

B. Aspek Pembangunan Ekonomi

1. Pada bidang koperasi UMKM dan perindustrian dengan program/kegiatan pengembangan kawasan industri kecil hasil hutan.

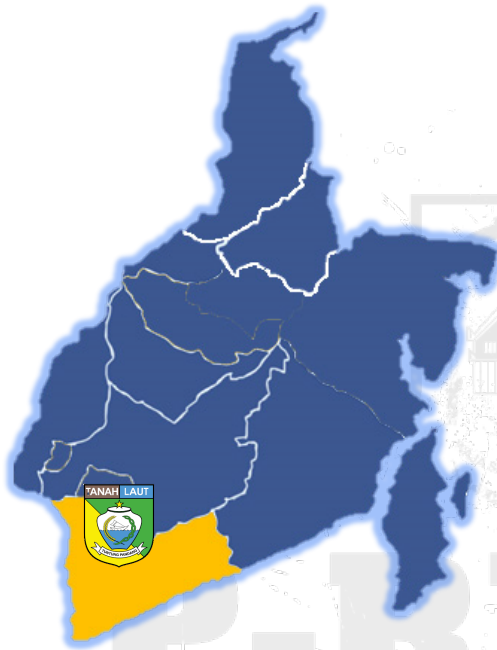
**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

2. Pada bidang pertanian dengan pengembangan kawasan lahan basah komoditas unggulan padi dan hortikultura, pengembangan kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian tadah hujan, sentra produksi pangan dan sentra agribisnis hortikultura.
3. Pada bidang kehutanan dengan program/kegiatan penyediaan bibit pohon, pembinaan serta pemberian teknologi budidaya hutan; dan pelaksanaan perhutanan sosial.
4. Pengembangan sentra industri dan perdagangan batu permata
5. Peningkatan indeks pertanaman (intensifikasi), dengan output kawasan karet;
6. Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, dan lainnya);
7. Pengembangan *eco-tourism* kelas dunia berbasis aset alam (termasuk menjadi *global geopark*) di Geopark Geosite Meratus dan di Kawasan Loksado dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja;
8. Pelindungan dan pelestarian warisan budaya melalui pelestarian warisan budaya pada situs-situs cagar budaya di kawasan Geopark Meratus dan Kawasan Loksado dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diplomasi budaya;

C. Aspek Pengembangan Infrastruktur

1. Pada bidang pekerjaan umum dan pertanahan dengan program/kegiatan penyelesaian TORA; dan sertifikasi lahan hutan.
2. Pengembangan daerah irigasi untuk mendukung ketahanan pangan Provinsi dan Nasional dan peningkatan produksi beras lokal berkualitas;
3. Peningkatan ketersediaan pangan, dengan output intervensi cetak sawah;
4. Pengembangan pengairan dan irigasi;

4.6.4 Kabupaten Tanah Laut



Potensi Ekonomi :

1.peningkatan produktifitas komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan unggulan 2. melakukan hilirisasi dengan pemanfaatan KI Jorong. 3. pengembangan pariwisata (pantai,dll) 4. pengembangan sekolah pertanian 5. pengembangan politeknik tala untuk mendukung pertanian dan industry 6.metropolitan banjarbakula

Tenaga Kerja :

1. peningkatan produktifitas & Kualitas tenaga kerja, kesempatan kerja, dan link and match dunia usaha dan pendidikan 2. peningkatan SMA pertanian dan Poltek tanah laut 3. pelatihan tenaga kerja, UMKM, dan IKM

Pemerataan :

kesempatan kerja pada sektor unggulan daerah dan peningkatan pendidikan untuk masyarakat menengah kebawah/miskin

Arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kab. Tanah Laut Tahun 2026, sebagai berikut :

A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. Bidang pendidikan dengan program/kegiatan pendidikan vokasi/SMK pertanian.
2. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.

B. Aspek Pembangunan Ekonomi

1. Industri pengolahan, dengan dukungan pada KI Jorong yang telah ditetapkan sebagai proyek prioritas pemerintah;
2. Pengadaan listrik dan gas, dengan dukungan pembangunan PLTU asam unit 5, 6 dan 7; dan dukungan pembangunan PLT Bayu.
3. Bidang tanaman pangan dan hortikultura dengan program/kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan aneka tanaman terutama komoditas

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

sayur dan cabai; pembinaan pengembangan mekanisasi pertanian; dan perluasan areal lahan.

4. Bidang perkebunan dan peternakan dengan program/kegiatan peningkatan jumlah ternak bibit; pemantapan pelaksanaan IB; dan pengendalian pemotongan ternak produktif.
5. Bidang kelautan dan perikanan dengan program/kegiatan peningkatan perikanan tangkap; dan pembangunan unit pengolahan ikan.
6. Pengembangan industri karet output penyusunan data *supply-demand* sektor tekstil, kulit dan alas kaki, dan penerapan tingkat komponen dalam negeri - industri kecil, peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan industri karet, serta pengembangan produk, pendampingan IKM, peningkatan kreativitas, dan informasi pasar, promosi dan pemasaran.
7. Pengembangan *eco-tourism* kelas dunia berbasis aset alam (termasuk menjadi *global geopark*) di Geopark Geosite Meratus dan di Kawasan Loksado dengan melibatkan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja;
8. Pelindungan dan pelestarian warisan budaya melalui pelestarian warisan budaya pada situs-situs cagar budaya di kawasan Geopark Meratus dan Kawasan Loksado dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diplomasi budaya;
9. Penguatan industri dasar seperti hilirisasi kimia berbasis batubara.

C. Aspek Pengembangan Infrastruktur

1. Pengembangan Infrastruktur Energi Terbarukan/Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB);
2. Pengembangan Destinasi wisata pesisir dan Mangrove, serta infrastruktur pengaman pantai;
3. Pengembangan hilirisasi kelapa sawit;

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

4.6.5 Kabupaten Tanah Bumbu



Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kab. Tanah Bumbu tahun 2026, antara lain:

A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. Pada bidang pendidikan dengan program/kegiatan peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan vokasi (SMK dan politeknik).

2. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan

dengan dunia usaha.

3. Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa;

B. Aspek Pembangunan Ekonomi

1. Pada bidang perindustrian dengan program/kegiatan pengembangan kawasan industri batulicin.

2. Pengembangan kawasan budidaya pertanian dan perkebunan.

3. Pengembangan kawasan budidaya perikanan dan kelautan.

4. Pengembangan industri karet output penyusunan data *supply-demand* sektor tekstil, kulit dan alas kaki, dan penerapan tingkat komponen dalam negeri - industri kecil, peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan industri karet, serta pengembangan produk, pendampingan IKM, peningkatan kreativitas, dan informasi pasar, promosi dan pemasaran.

5. Penguatan industri dasar seperti hilirisasi kimia berbasis batubara.

6. Peningkatan investasi hilirisasi besi baja;

7. Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, dan lainnya)

C. Aspek Pengembangan Infrastruktur

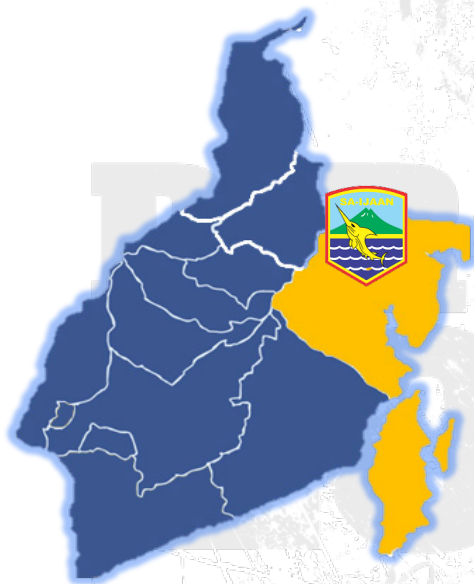
1. Pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan program/kegiatan pembangunan jalan bebas hambatan Batulicin – Banjarbaru;

2. Pembangunan jembatan penghubung pulau Kalimantan dengan pulau laut; dan pembangunan bendungan kusan;

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

3. Untuk bidang perhubungan dengan dukungan pengembangan bandara bersujud; dan dukungan pengembangan pelabuhan;
4. Pengembangan Destinasi wisata pesisir dan Mengrove, serta infrastruktur pengaman pantai.
5. Pengembangan akses Jembatan Laut Pulau Kalimantan;
6. Pengembangan hilirisasi nikel;
7. Pengembangan hilirisasi kelapa sawit;

4.6.6 Kabupaten Kotabaru



IKN.

Potensi Ekonomi :

(Perlu Perhatian) capaian LPE **LEBIH BAIK** dan Share Perekonomian **TIDAK LEBIH BAIK** dibanding capaian provinsi

1. Penetapan KEK Mekar Putih
2. hilirisasi industri dengan pemanfaatan kawasan KEK mekar putih dan KI sebuku
3. Pembangunan SKPT.
4. Gerbang logistik dengan pelabuhan laut dalam mekar putih
5. pengembangan pariwisata (teluk tamiyang, bukit mamake, dll)
6. kawasan penyangga

Tenaga Kerja :

- (Perlu Perhatian) capaian Persentase Penduduk Miskin **DI ATAS** capaian provinsi dan Besar Perubahan Persentase Penduduk Miskin **TIDAK LEBIH BAIK DARI** dari capaian provinsi
- 1. peningkatan produktifitas & kualitas tenaga kerja, kesempatan kerja, dan link and match dunia usaha dan pendidikan 2. peningkatan spesifikasi tenaga kerja sesuai kebutuhan industri yang ada 3. pelatihan tenaga kerja, UMKM, dan IKM

Pemerataan :

- (Perlu Perhatian) capaian indeks gini **DI ATAS** capaian provinsi dan Besar Perubahan indeks gini **LEBIH BAIK DARI** dari capaian provinsi

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

- kesempatan kerja pada sektor unggulan daerah dan peningkatan pendidikan untuk masyarakat menengah kebawah/miskin

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kab. Kotabaru Tahun 2026 sebagai berikut:

A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia

Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.

B. Aspek Pembangunan Ekonomi

1. Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan mengembangkan Sentra Kelautan Terpadu sebagai upaya peningkatan pendapatan nelayan dan mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian secara luas;
2. Bidang industri pengolahan, dengan mendukung pengembangan KEK Mekar Putih;
3. Pengembangan industri karet output penyusunan data *supply-demand* sektor tekstil, kulit dan alas kaki, dan penerapan tingkat komponen dalam negeri - industri kecil, peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan industri karet, serta pengembangan produk, pendampingan IKM, peningkatan kreativitas, dan informasi pasar, promosi dan pemasaran.
4. Penguatan industri dasar seperti hilirisasi kimia berbasis batubara.
5. Peningkatan investasi hilirisasi besi baja;
6. Pengembangan *eco-tourism* kelas dunia berbasis aset alam (termasuk menjadi *global geopark*) di Geopark Geosite Meratus dan di Kawasan Loksado dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja;
7. Pelindungan dan pelestarian warisan budaya melalui pelestarian warisan budaya pada situs-situs cagar budaya di kawasan Geopark Meratus dan Kawasan Loksado dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diplomasi budaya.

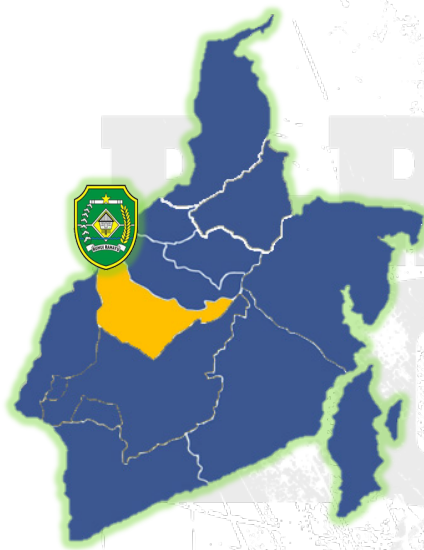
C. Aspek Pengembangan Infrastruktur

1. Pengembangan Industri di dalam Kawasan Ekonomi khusus dan Pelabuhan Utama untuk mendukung distribusi hasil industry;
2. Peningkatan Jalan akses menuju KEK Mekarputih, Destiniasi Wisata Teluk Tamiang dan Pusat Perikanan Terpadu serta infrastruktur pengaman pantai.

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

3. Pengembangan bandara, dengan output Pengembangan Bandar Udara Gusti Syamsir Alam.
4. Pengembangan Pelabuhan logistic di Pulau Laut
5. Pengembangan/pembangunan/rehabilitasi pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan;
6. Pelayanan peringatan dini multi-ancaman bencana, dengan output penguatan instrumen peringatan dini bencana;
7. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan darurat.
8. Pengembangan hilirisasi kelapa sawit;

4.6.7 Kabupaten Tapin



Potensi Ekonomi :

Prioritas) capaian LPE dan Share Perekonomian **LEBIH RENDAH** dibanding capaian provinsi jadi Prioritas

peningkatan produktifitas komoditas unggulan (Padi, Jagung, Karet, Olahan ikan nila, Kain sasirangan, Anyaman purun, Tikar dalit, Sambal cabai rawit hiyung, dan Kopian jangang) 2. pengembangan kawasan industri margasari/KI tapin 3. pemanfaatan bedungan tapin untuk wisata dan perikanan

Tenaga Kerja :

1. peningkatan produktifitas & kualitas tenaga kerja, kesempatan kerja, dan link and match dunia usaha dan pendidikan 2. peningkatan spesifikasi tenaga kerja sesuai kebutuhan industri yang ada 3. pelatihan tenaga kerja, UMKM, dan IKM.

Pemerataan :

Kesempatan kerja pada sektor unggulan daerah dan peningkatan pendidikan untuk masyarakat menengah kebawah/miskin.

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kabupaten Tapin tahun 2026, antara lain:

A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. Pendidikan vokasi/SMK pertanian

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

2. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.

B. Aspek Pembangunan Ekonomi

1. Pada bidang kelautan dan perikanan dengan penyediaan paket budidaya, pembinaan serta pemberian teknologi budidaya; dan pengembangan budidaya ikan lokal.
2. Pengembangan kawasan industri kecil pengolahan pertanian untuk bidang koperasi UKM dan perindustrian.
3. Pada bidang tanaman pangan dan hortikultura dengan program/kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan aneka tanaman terutama komoditas sayur dan cabai; pembinaan dan pengembangan mekanisasi pertanian; dan perluasan areal lahan.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas input peternakan, dengan output: benih ternak unggul;
5. Pengembangan pada kawasan budidaya perkebunan kelapa sawit, kopi, lada dan karet serta mengembangkan kawasan budidaya peternakan unggas, kambing dan sapi.
6. Peningkatan indeks pertanaman (intensifikasi), dengan output kawasan karet;
7. Pengembangan *eco-tourism* kelas dunia berbasis aset alam (termasuk menjadi *global geopark*) di Geopark Geosite Meratus dan di Kawasan Loksado dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja;
8. Pelindungan dan pelestarian warisan budaya melalui pelestarian warisan budaya pada situs-situs cagar budaya di kawasan Geopark Meratus dan Kawasan Loksado dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diplomasi budaya;

C. Aspek Pengembangan Infrastruktur

1. Pada bidang pekerjaan umum dengan program/kegiatan dukungan Pengembangan daerah irigasi bendungan tapin; dan pembangunan jalan lingkar barat Kalsel.
2. Peningkatan ketersediaan pangan, dengan ouput intervensi cetak sawah;
3. Pengembangan pengairan dan irigasi.

4.6.8 Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Potensi Ekonomi :



(Prioritas) capaian LPE dan Share Perekonomian **LEBIH BAIK** dibanding capaian provinsi jadi Prioritas

1. peningkatan produktifitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan (ikan gabus, dll)
2. potensi pariwisata alam yang meliputi destinasi wisata Sungai Amandit, air terjun, sumber air panas, loksado
3. wisata kuliner
4. wisata budaya

Tenaga Kerja :

1. peningkatan produktifitas & kualitas tenaga kerja, kesempatan kerja, dan link and match dunia usaha dan pendidikan
2. peningkatan wisausaha
3. pelatihan tenaga kerja, UMKM, dan IKM

Pemerataan :

Kesempatan kerja pada sektor unggulan daerah dan peningkatan pendidikan untuk masyarakat menengah kebawah/miskin

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2026, antara lain:

A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.
2. Pelayanan peringatan dini multi-ancaman bencana, dengan output penguatan instrumen peringatan dini bencana;
3. Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan darurat.

B. Aspek Pembangunan Ekonomi

1. Pada bidang pariwisata dengan program/kegiatan pelaksanaan festival bamboo rafting; pengembangan akomodasi pendukung pariwisata; penyiapan daya Tarik wisata; dan pengusulan taman nasional loksado.

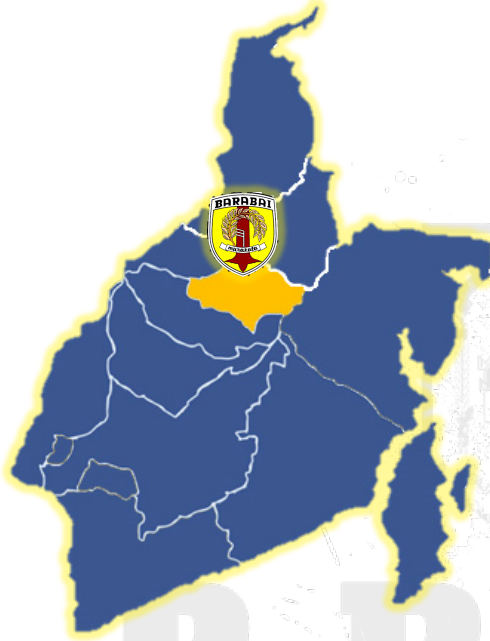
**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

2. Pada bidang koperasi UKM dan perdagangan dengan program/kegiatan pengembangan kawasan industri kecil pendukung pariwisata.
3. Pada bidang kehutanan dengan pengembangan hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas, sentra penghasil hutan kayu, sentra penghasil hutan non kayu dan kawasan hutan penunjang industri pariwisata.
4. Peningkatan indeks pertanaman (intensifikasi), dengan output kawasan karet;
5. Pengembangan korporasi petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak, dengan output: sarana perbenihan ikan yang disalurkan ke masyarakat, dan pusat produksi benih dan induk;
6. Pengembangan *eco-tourism* kelas dunia berbasis aset alam (termasuk menjadi *global geopark*) di Geopark Geosite Meratus dan di Kawasan Loksado dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja;
7. Pelindungan dan pelestarian warisan budaya melalui pelestarian warisan budaya pada situs-situs cagar budaya di kawasan Geopark Meratus dan Kawasan Loksado dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diplomasi budaya.

C. Aspek Pengembangan Infrastruktur

1. Pada bidang pekerjaan umum dengan program/kegiatan pembangunan jalan lingkar barat; dan peningkatan jalan kandang-lumpangi-batulicin.
2. Peningkatan ketersediaan pangan, dengan output intervensi cetak sawah
3. Pengembangan pengairan dan irigasi.

4.6.9 Kabupaten Hulu Sungai Tengah



Potensi Ekonomi :

(Prioritas) capaian LPE dan Share Perekonomian **LEBIH RENDAH** dibanding capaian provinsi jadi Prioritas

1. produk makanan olahan, kerajinan, dan UKM (anyaman purun, kerajinan eceng gondok, kerajinan bambu, kerajinan rotan, meubel, kue kering, apam hambuku, kerupuk olahan, telur asin, ikan asin, gula batu itik, beras organik,). pengolahan telur asin, pengolahan ikan asin, dan peralatan kerajinan sapu ijuk dan mainan

tradisional 2. pengembangan pariwisata

Tenaga Kerja:

1. peningkatan produktifitas & kualitas tenaga kerja, kesempatan kerja, dan link and match dunia usaha dan pendidikan 2. peningkatan wisausaha 3. pelatihan tenaga kerja, UMKM, dan IKM

Pemerataan :

Kesempatan kerja pada sektor unggulan daerah dan peningkatan pendidikan untuk masyarakat menengah kebawah/miskin

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) tahun 2026, antara lain:

A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. Pada bidang pendidikan dengan program/kegiatan pendidikan vokasi/SMK pertanian.
2. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.

B. Aspek Pembangunan Ekonomi

1. Pada bidang tanaman pangan dan hortikultura dengan program/kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan aneka tanaman terutama komoditas

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

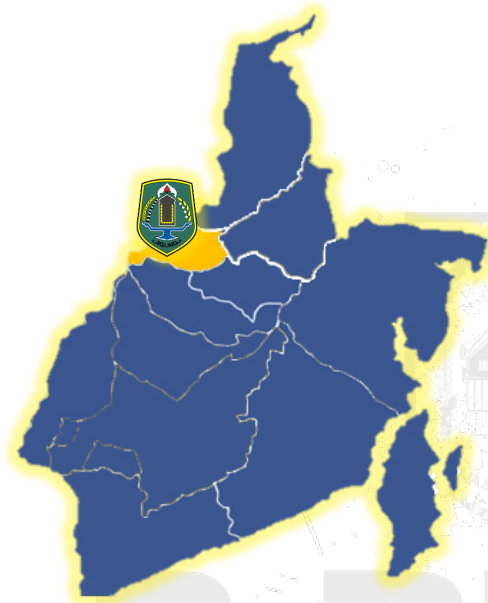
sayur dan cabai; pembinaan dan pengembangan mekanisasi pertanian; dan perluasan areal lahan.

2. Pada bidang koperasi UKM dan perindustrian yaitu dengan program/kegiatan pengembangan kawasan industri kecil pengolahan pertanian.
3. Pada bidang kehutanan dengan pengembangan hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas, sentra penghasil hutan kayu dan kawasan hutan penunjang industri pariwisata;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas input peternakan, dengan output: benih ternak unggul;
5. Peningkatan indeks pertanaman (intensifikasi), dengan output kawasan karet;
6. Pengembangan *eco-tourism* kelas dunia berbasis aset alam (termasuk menjadi *global geopark*) di Geopark Geosite Meratus dan di Kawasan Loksado dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja;
7. Pelindungan dan pelestarian warisan budaya melalui pelestarian warisan budaya pada situs-situs cagar budaya di kawasan Geopark Meratus dan Kawasan Loksado dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diplomasi budaya.

C. Aspek Pengembangan Infrastruktur

1. Pada bidang pekerjaan umum dengan program/kegiatan pembangunan bendungan batang alai; dan pembangunan pengendali banjir.
2. Pada bidang lingkungan hidup dan kehutanan dengan program/kegiatan perlindungan, rehabilitasi, pemulihan dan konservasi cadangan SDA dan LH.
3. Peningkatan ketersediaan pangan, dengan output intervensi cetak sawah;
4. Pengembangan pengairan dan irigasi;
5. Pelayanan peringatan dini multi-ancaman bencana, dengan output penguatan instrumen peringatan dini bencana;
6. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan darurat.

4.6.10 Kabupaten Hulu Sungai Utara



Potensi Ekonomi :

1. Pengembangan kawasan peruntukan industri seradang 2, kawasan peyangga IKN 3. jalur logistik antara kaltim/IKN ke Kalimantan selatan 4. madu kelulut, kopi pasak bumi, dan kulinernya seperti paliat. Lain-lain produk unggulan termasuk anyaman bambu, anyaman purun, dan beragam olahan kreasi seni tangan dari bahan organik seperti kayu limbah, eceng gondok, dan olahan kayu. Komoditas perkebunan dan pertanian yang penting di

Tabalonenantias karet, kakao, dan kelapa sawit

Tenaga Kerja :

1. peningkatan produktifitas & kualitas tenaga kerja, kesempatan kerja, dan link and match dunia usaha dan pendidikan 2. peningkatan spesifikasi tenaga kerja sesuai kebutuhan industri yang ada 3. pelatihan tenaga kerja, UMKM, dan IKM

Pemerataan :

kesempatan kerja pada sektor unggulan daerah dan peningkatan pendidikan untuk masyarakat menengah kebawah/miskin

Arah Kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Tahun 2026, antara lain:

A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. Pada bidang kesehatan dengan program/kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular; pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular; penyuluhan masyarakat pola hidup sehat; pelayanan kesehatan inklusi, peningkatan fasilitas kesehatan dasar, penurunan angka stunting dan pencegahan pernikahan usia dini.
2. Pada bidang pendidikan dengan program/kegiatan pendidikan vokasi/SMK pertanian; dan program kejar paket b-c.
3. Pada bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat desa dengan program/kegiatan pengentasan kemiskinan dan darah tertinggal.

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

4. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.

B. Aspek Pembangunan Ekonomi

1. Pada bidang perkebunan dan peternakan dengan program/kegiatan peningkatan jumlah ternak bibit; peningkatan produksi daging unggas dan petelur; serta pengendalian pemotongan ternak produktif.
2. Pada bidang kelautan dan perikanan dengan program/kegiatan penyediaan paket budidaya, pembinaan serta pemberian teknologi budidaya; pengembangan budidaya ikan lokal papuyu dan haruan.
3. Pada bidang koperasi UKM dan perindustrian yaitu dengan program/kegiatan pengembangan kawasan industri kecil pengolahan peternakan dan perikanan.
4. Pada bidang tanaman pangan dan hortikultura dengan program/kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan aneka tanaman terutama komoditas sayur dan cabai; pembinaan dan pengembangan mekanisasi pertanian; dan perluasan areal lahan.
5. Pada bidang pariwisata dengan program/kegiatan pengembangan ecotourism swimming buffalo dan orang utan.
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas input peternakan, dengan output: benih ternak unggul;
7. Pengembangan korporasi petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak, dengan output: sarana perbenihan ikan yang disalurkan ke masyarakat, dan pusat produksi benih dan induk;
8. Pengembangan *eco-tourism* kelas dunia berbasis aset alam (termasuk menjadi *global geopark*) di Geopark Geosite Meratus dan di Kawasan Loksado dengan melibatkan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja;
9. Pelindungan dan pelestarian warisan budaya melalui pelestarian warisan budaya pada situs-situs cagar budaya di kawasan Geopark Meratus dan Kawasan Loksado dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diplomasi budaya.

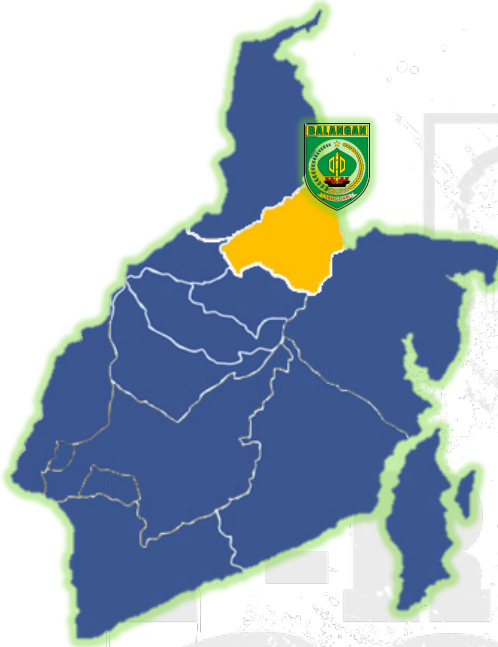
C. Aspek Pengembangan Infrastruktur

1. Pada bidang Pekerjaan umum dengan program/kegiatan pembangunan jalan lingkar barat Kalsel.

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

2. Peningkatan ketersediaan pangan, dengan output intervensi cetak sawah;
3. Pengembangan pengairan dan irigasi.

4.6.11 Kabupaten Balangan



Potensi Ekonomi :

1. kerajinan tangan seperti kain Sasirangan, tas anyaman dari bamban dan tirik. Selain itu, Kabupaten Balangan juga memamerkan produk dari alam seperti madu, jahe merah, hanau gula merah, kopi pasak bumi, mandai, dan sirup Batumandi
2. wisata di Kabupaten Balangan adalah Gunung Batu Sumsum, Goa Hantanung, Makam Datuk Kandang Haji, Benteng Tundakan, Air Terjun Manyandar, dan berbagai acara budaya seperti Pesta

Panen Raya, Aruh Adat Baharin, Tarian Gintor, dan Balian

Tenaga Kerja :

1. peningkatan produktifitas & kualitas tenaga kerja, kesempatan kerja, dan link and match dunia usaha dan pendidikan
2. peningkatan spesifikasi tenaga kerja sesuai kebutuhan industri yang ada
3. pelatihan tenaga kerja, UMKM, dan IKM

Pemerataan :

kesempatan kerja pada sektor unggulan daerah dan peningkatan pendidikan untuk masyarakat menengah kebawah / miskin

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi di Kabupaten Balangan pada tahun 2026, antara lain:

A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. Bidang pendidikan dan tenaga kerja dengan pendidikan vokasi/SMK pertanian dan program kejar paket B-C.
2. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

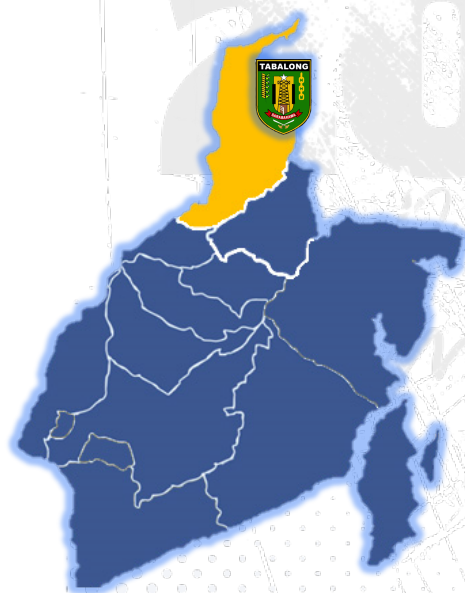
B. Aspek Pembangunan Ekonomi

1. Bidang perkebunan dan peternakan dengan program/kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan.
2. Pada bidang pertanian dengan program/kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan aneka tanaman terutama komoditas sayur dan cabai; pembinaan dan pengembangan mekanisasi pertanian; dan perluasan areal lahan.
3. Peningkatan indeks pertanaman (intensifikasi), dengan output kawasan karet;
4. Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, dan lainnya).

C. Aspek Pengembangan Infrastruktur

Pada bidang pekerjaan umum dengan program/kegiatan rehabilitasi jalan dan jembatan Pada bidang Pekerjaan umum dengan program/kegiatan pembangunan jalan lingkaran barat Kalsel.

4.6.12 Kabupaten Tabalong



Potensi Ekonomi :

1. Pengembangan kawasan peruntukan industri seradang 2, kawasan peyangga IKN 3. jalur logistik antara kaltim/IKN ke Kalimantan selatan 4. madu kelulut, kopi pasak bumi, dan kulinernya seperti paliat. Lain-lain produk unggulan termasuk anyaman bambu, anyaman purun, dan beragam olahan kreasi seni tangan dari bahan organik seperti kayu limbah, eceng gondok, dan olahan kayu. Komoditas perkebunan dan pertanian yang penting di

Tabalonenantias karet, kakao, dan kelapa sawit

Tenaga Kerja :

1. peningkatan produktifitas & kualitas tenaga kerja, kesempatan kerja, dan link and match dunia usaha dan pendidikan 2. peningkatan spesifikasi tenaga kerja sesuai kebutuhan industri yang ada 3. pelatihan tenaga kerja, UMKM, dan IKM

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Pemerataan :

kesempatan kerja pada sektor unggulan daerah dan peningkatan pendidikan untuk masyarakat menengah kebawah/miskin

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kabupaten Tabalong pada tahun 2026, antara lain:

A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. Bidang pendidikan dan kebudayaan melalui peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan vokasi (SMK dan politeknik).
2. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.
3. Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa;

B. Aspek Pembangunan Ekonomi

1. Pada Bidang perindustrian dengan mengembangkan kawasan industri Tabalong.
2. Pengembangan kawasan budidaya perkebunan, pertanian, tanaman pangan dan hortikultura.
3. Pengembangan kawasan budidaya perikanan dan peternakan.
4. Peningkatan indeks pertanaman (intensifikasi), dengan output kawasan karet;
5. Pengembangan *eco-tourism* kelas dunia berbasis aset alam (termasuk menjadi *global geopark*) di Geopark Geosite Meratus dan di Kawasan Loksado dengan melibatkan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja;
6. Pelindungan dan pelestarian warisan budaya melalui pelestarian warisan budaya pada situs-situs cagar budaya di kawasan Geopark Meratus dan Kawasan Loksado dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diplomasi budaya.

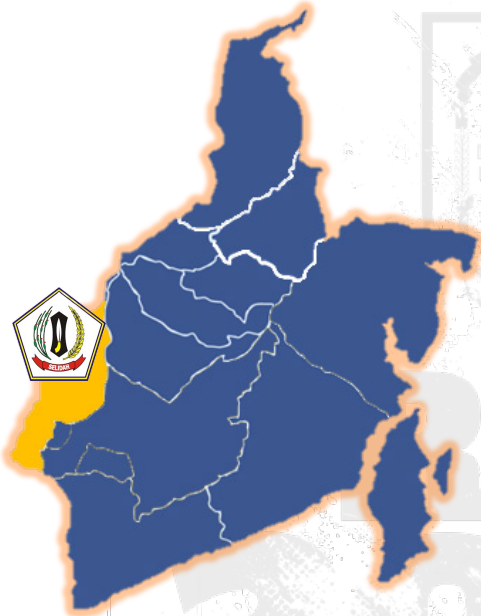
C. Aspek Pengembangan Infrastruktur

1. Bidang perhubungan dengan dukungan pembangunan jalur kereta api dan dukungan pengembangan bandara Warukin;
2. Bidang Pekerjaan Umum dengan pembangunan jalan lingkaran barat, jalan akses Kalsel - Kalteng dan jalur distribusi pusat perikanan ke IKN;

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

3. Pengembangan industri pengolahan hasil tambangan dan perkebunan.
4. Peningkatan ketersediaan pangan, dengan output intervensi cetak sawah;
5. Pengembangan pengairan dan irigasi.

4.6.13 Kabupaten Barito Kuala



Potensi Ekonomi :

(Prioritas) capaian LPE dan Share Perekonomian **LEBIH RENDAH** dibanding capaian provinsi jadi Prioritas

1. peningkatan produktifitas komoditas unggulan (padi/beras, jeruk, dll)
2. wisata geopark (pulau bekantan/pulau curiak)
3. metropolitan banjarbakula
6. kabupaten pendidikan (UMB dan UNISKA)

Tenaga Kerja :

1. peningkatan produktifitas & Kualitas tenaga kerja, kesempatan kerja, dan link and match dunia usaha dan pendidikan
2. pelatihan tenaga kerja, UMKM, dan IKM

Pemerataan :

kesempatan kerja pada sektor unggulan daerah dan peningkatan pendidikan untuk masyarakat menengah kebawah/miskin

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kab. Barito Kuala tahun 2026, antara lain:

A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. Pada bidang pendidikan dengan program/kegiatan pendidikan vokasi/SMK pertanian/perkebunan.
2. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.

B. Aspek Pembangunan Ekonomi

1. Pada bidang tanaman pangan dan hortikultura dengan program/kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan aneka tanaman; dan pembinaan pengembangan mekanisasi pertanian.

**PERUBAHAN RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

2. Pengembangan kawasan industri pengolahan hasil pertanian, industri pengolahan hasil hutan, perabot dan kayu.
3. Pada bidang perkebunan dan peternakan dengan program/kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas input peternakan, dengan output: benih ternak unggul;
5. Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, dengan output bantuan sarana produksi pertanian.

C. Aspek Pengembangan Infrastruktur

1. Pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan program/kegiatan dukungan pengembangan jalan lingkar barat kalsel; dan rehabilitasi jalan dan jembatan;
2. Peningkatan Infrastruktur Daerah Irigasi Rawa dan Irigasi Permukaan;
3. Peningkatan industri pengolahan hasil pertanian;
4. Redistribusi aset (tanah) transmigrasi, dengan output: fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi.
5. Pengembangan pengairan dan irigasi;
6. Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, dengan output pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, sistem drainase, dan sarana permukiman.